



RENCANA KONTINGENSI

BENCANA GEMPA BUMI KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2024



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Gambiran No.26, Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta
Telp. (0274) 4298225/0811 2828 911
E-mail : bpbd@jogjakota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen rencana kontingensi bencana gempa bumi Kota Yogyakarta Tahun 2024 telah selesai disusun. Rangkaian proses kegiatan penyusunan mulai dari lokakarya untuk menyamakan persepsi, pengumpulan data dan pembaruan data, forum diskusi kelompok terarah, dan rapat konsultasi publik telah dilalui dengan melibatkan peran aktif berbagai pihak dan pemangku kepentingan di Kota Yogyakarta. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama-sama dengan segenap OPD dan lembaga terkait untuk membangun kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana gempa bumi.

Secara sistematis dokumen rencana kontingensi ini menjabarkan mengenai: 1). Pendahuluan (latar belakang, landasan hukum, kebijakan dan strategi, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pendekatan, metode, tahapan proses, masa berlaku dan pemutakhiran, dan aktivasi rencana kontingensi menjadi rencana operasi), 2). Situasi (karakteristik bahaya, skenario kejadian, dan asumsi dampak), 3). Tugas pokok dan fungsi sistem komando penanganan darurat bencana (tugas pokok dan sasaran), 4). Pelaksanaan (konsep operasi dan sasaran tindakan, struktur organisasi komando, fungsi dan kegiatan pokok, tugas bidang-bidang, dan instruksi koordinasi), 5). Administrasi dan logistik, 6). Pengendalian (komando, kendali, koordinasi, komunikasi, dan informasi), 7). Rencana tindak lanjut (penguatan komitmen para pihak dan perencanaan kesiapsiagaan). Pengerahan berbagai sumber daya dan peran dari masing-masing pihak ini diatur dalam mekanisme koordinasi yang disepakati secara bersama-sama melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan seluruh jajaran MUSPIDA, OPD, Lembaga/Organisasi non pemerintah, perguruan tinggi, media, dunia usaha dan masyarakat. Diharapkan melalui mekanisme ini, semua proses perencanaan penanganan darurat bencana gempa bumi dapat dilakukan dengan baik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam proses penyusunan dokumen rencana kontingensi ini. Semoga dokumen ini dapat kita pedomani sebagai upaya membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan bersama menghadapi potensi bencana gempa bumi Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, 30 September 2024

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Yogyakarta



Drs. NurHidayat, M.Si.
NIP. 1971119 199263 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Bencana gempa bumi merupakan salah satu bencana yang berisiko di Kota Yogyakarta. Matriks prioritas risiko bencana mengidentifikasi bahwa bencana gempa bumi memiliki tingkat risiko tinggi dan kecenderungan meningkat. Gempa bumi menjadi salah satu bahaya yang memiliki warna merah sehingga merupakan prioritas dalam kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan (Rencana Penanggulangan Bencana Kota Yogyakarta, 2023).

Dokumen rencana kontingensi gempa bumi Kota Yogyakarta disusun sebagai landasan strategi, operasional, dan pedoman penanganan keadaan darurat bencana dan sebagai dasar pengalokasian sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan di wilayah Kota Yogyakarta yang terlibat dalam menangani keadaan darurat bencana gempa bumi. Dokumen rencana kontingensi bencana gempa bumi Kota Yogyakarta berlaku selama (5) tahun. Masa berlaku tersebut ditetapkan agar rencana kontingensi sesuai dengan situasi terbaru, misalnya perubahan dinamika skala bencana, perubahan besaran jenis kerentanan, kapasitas atau kemampuan.

Kota Yogyakarta secara geografis terletak di pulau Jawa bagian selatan yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Wilayah ini merupakan pertemuan dua lempeng raksasa yaitu lempeng Indo Australia dan lempeng Eurasia. Pertemuan kedua lempeng tersebut tepat berada di selatan pulau Jawa atau bagian selatan Kota Yogyakarta. Gempa bumi di Kota Yogyakarta juga diakibatkan oleh aktivitas sesar mayor aktif. Sesar mayor aktif yaitu sesar Opak yang berada di perbatasan antara Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul dan memanjang sampai Kabupaten Klaten. Kota Yogyakarta memiliki dua Kemantren yang teridentifikasi berpotensi mengalami kerusakan sedang sampai dengan berat yaitu Kemantren Kotagede dan Umbulharjo, sedangkan Kemantren Mergangsan, Matri Jeron, Kraton, Gondomanan, Danurejan, Pakualaman, Gondokusuman, Wirobrajan, Ngampilan, Gedongtengen, Jetis, dan Tegaltrejo memiliki potensi kerusakan sedang.

Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Kota Yogyakarta melaksanakan penanganan kedaruratan bencana sejak penetapan status darurat bencana Tanggap Darurat selama 14 hari atau status darurat bencana Transisi Darurat ke Pemulihan 90 hari atau dapat lebih singkat atau diperpanjang sesuai dengan kondisi yang ada. Konsep operasi penanganan darurat bencana gempa bumi Kota Yogyakarta meliputi 2 (dua) fase/status kedaruratan, yaitu Status Tanggap Darurat dan Status Transisi Darurat ke Pemulihan.

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Walikota menetapkan Status Darurat bencana gempa bumi selama 14 hari berdasarkan rekomendasi BPBD Kota Yogyakarta. Lama masa tanggap darurat akan dilakukan evaluasi berdasarkan eskalasi kejadian bencana gempa bumi atau rekomendasi dari BPBD Kota Yogyakarta apabila diperlukan, masa tanggap darurat bencana gempa bumi dapat diperpanjang. Pimpinan penanganan darurat bencana adalah Kepala Daerah. Kepala Daerah dapat menunjuk Komandan dan Wakil Komandan untuk dapat melaksanakan operasi penanganan darurat bencana.

Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai POSKO PDB Kota Yogyakarta bertugas melaksanakan fungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana. Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana yang selanjutnya disebut Pos Lapangan PDB adalah institusi yang berfungsi secara langsung sebagai pelaksana operasi penanganan darurat bencana. Pos pendukung dibentuk untuk mendukung kelancaran akses masuk, keluar, dan pendistribusian bantuan penanganan darurat bencana, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Dokumen rencana kontingensi ini dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan penyusunannya, diperlukan komitmen semua pihak, baik Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Media, Lembaga Keagamaan, organisasi penyandang disabilitas maupun Organisasi Non Pemerintah, untuk dapat berperan, mengampu tugas dan fungsinya dalam SKPDB gempa bumi di Kota Yogyakarta. Untuk memperkuat dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat, dokumen rencana kontingensi ditandatangani dalam lembar komitmen, serta disahkan oleh Walikota Kota Yogyakarta.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
DAFTAR ISTILAH	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Ruang Lingkup.....	6
1.5 Kebijakan dan Strategi.....	7
A. Kebijakan.....	7
B. Strategi	8
1.6 Pendekatan, Metode dan Tahapan Proses.....	9
1.7 Umpan Balik.....	12
1.8 Masa Berlaku dan Pematkhiran.....	12
1.9. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi	12
BAB II SITUASI.....	13
2.1 Karakteristik Bahaya.....	13
2.2 Skenario Kejadian.....	14
2.3 Asumsi Dampak Gempa Bumi.....	17
A. Aspek Kependudukan.....	17
B. Aspek Fisik.....	19
C. Aspek Ekonomi.....	29
D. Aspek Lingkungan	30
E. Aspek Layanan Publik.....	31
BAB III TUJUAN DAN SASARAN.....	32

3.1	Tujuan	32
3.2	Sasaran	32
BAB IV PELAKSANAAN		34
4.1	Konsep Operasi	34
4.1.1	Status Tanggap Darurat.....	34
4.1.2	Status Transisi Darurat ke Pemulihan	35
4.2	Struktur Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana.....	36
4.2.1	Fungsi	36
4.2.2	Struktur Organisasi Pelaksana PDB.....	38
4.3	Kegiatan Pokok	40
4.3.1	Kegiatan Pokok Pelaksana Penanganan Tanggap Darurat	40
4.3.2	Kegiatan Pokok Pelaksana Penanganan Transisi Darurat Ke Pemulihan	51
BAB V ADMINISTRASI DAN SUMBER DAYA		64
5.1	Administrasi.....	64
5.2	Sumber Daya	67
BAB VI PENGENDALIAN		69
6.1	Instruksi Koordinasi	69
6.2	Komando.....	70
6.3	Kendali	73
6.4	Koordinasi.....	73
6.5	Komunikasi.....	73
6.6	Informasi.....	74
BAB VII PEMUTAKHIRAN DAN PENGUJIAN.....		85
7.1	Pemutakhiran.....	85
7.2	Pengujian.....	85
DAFTAR REFERENSI		87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Diagram Alur Penyusunan Rencana Kontingensi.....	10
Gambar 2. 1 Peta Sebaran Gempa Bumi Tahun 2009-2023 di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	13
Gambar 2. 2 Peta Seismisitas Sesar Opak	14
Gambar 2. 3 Peta Skenario Gempa Bumi	15
Gambar 2. 4 Peta Skenario Model Tingkat Guncangan Shakemap Gempa Bumi Sesar Opak (Skenario Terburuk) Kota Yogyakarta	16
Gambar 4. 1 Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Kota Yogyakarta.	38
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Pelaksana Penanganan Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi Kota Yogyakarta.....	39

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Ringkasan Skenario Kejadian Gempa Bumi Kota Yogyakarta	16
Tabel 2. 2 Penduduk Terdampak Bencana Gempa Bumi di Kota Yogyakarta	18
Tabel 2. 3 Wisatawan Terdampak Bencana Gempa Bumi di Kota Yogyakarta.....	19
Tabel 2. 4 Jumlah dan Tingkat Kerusakan Rumah Terdampak di Kota Yogyakarta	20
Tabel 2. 5 Jumlah dan Tingkat Kerusakan Jalan dan Jembatan Terdampak di Kota Yogyakarta	21
Tabel 2. 6 Jumlah dan Tingkat Kerusakan Bangunan Sekolah Terdampak di Kota Yogyakarta.	22
Tabel 2. 7 Jumlah dan Tingkat Kerusakan Bangunan Sekolah Terdampak di Kota Yogyakarta.	23
Tabel 2. 8 Jumlah dan Tingkat Kerusakan Fasilitas Perkantoran Terdampak di Kota Yogyakarta	23
Tabel 2. 9 Jumlah dan Tingkat Kerusakan Layanan Kesehatan Terdampak di Kota Yogyakarta	24
Tabel 2. 10 Jumlah dan Tingkat Kerusakan Fasilitas Publik, Fasilitas Telekomunikasi, Fasilitas Energi Terdampak di Kota Yogyakarta.....	25
Tabel 2. 11 Jumlah dan Tingkat Kerusakan Fasilitas Publik, Fasilitas Telekomunikasi, Fasilitas Energi Terdampak di Kota Yogyakarta.....	25
Tabel 2. 12 Jumlah dan Tingkat Kerusakan Fasilitas Air Bersih dan Fasilitas Perekonomian Terdampak di Kota Yogyakarta.....	26
Tabel 2. 13 Jumlah dan Tingkat Kerusakan Fasilitas Perekonomian dan Fasilitas Perhotelan Terdampak di Kota Yogyakarta.....	28
Tabel 2. 14 Jumlah dan Tingkat Kerusakan Fasilitas Peribadatan Terdampak di Kota Yogyakarta	29
Tabel 2. 15 Dampak Aspek Ekonomi Bencana Gempa Bumi Kota Yogyakarta	30
Tabel 2. 16 Dampak Aspek Lingkungan Bencana Gempa Bumi Kota Yogyakarta.....	31
Tabel 5. 1 Sumber Keuangan Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi	65
Tabel 6. 1 Pos Pendukung PDB Kota Yogyakarta	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi: Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat.....	88
Lampiran 2 Proyeksi Dampak	86
Lampiran 3 Alur Sistem Komunikasi Peringatan Dini Gempa Bumi.....	97
Lampiran 4 Alur Penyebaran Berita Gempa Bumi dan Peringatan Tanda Bahaya.....	98
Lampiran 5 Alur Pelayanan Peringatan Tanda Bahaya Gempa Bumi Kepada Masyarakat.....	99
Lampiran 6 Jaring Komunikasi Komando dan Bidang.....	100
Lampiran 7 Ketersediaan Sumber Daya	101
Lampiran 8 Peta-Peta.....	181
Lampiran 9 Standar Operasional Prosedur	188
Lampiran 10 Lembar Komitmen	207

DAFTAR ISTILAH

Untuk lebih jauh memahami Rencana Kontingensi Gempa Bumi Kota Yogyakarta, maka disajikan daftar istilah kata dan frasa sebagai berikut:

1. **Ancaman (*hazard*)** adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mempunyai kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
2. **Aksi Antisipasi** adalah serangkaian intervensi yang dilakukan ketika ancaman yang menimbulkan bahaya yang akan segera terjadi berdasarkan prakiraan, peringatan dini, atau analisis risiko prabencana (*ASEAN Framework on Anticipatory Action in Disaster Management*).
3. **Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika**, yang selanjutnya disingkat BMKG adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. **Badan Nasional Penanggulangan Bencana**, yang selanjutnya disingkat BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam melakukan penanggulangan bencana.
5. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana di Daerah.
6. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan / atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. **Data dan Informasi Bencana Indonesia**, selanjutnya disebut DIBI adalah sebuah aplikasi perangkat analisis yang digunakan untuk menyimpan data bencana serta mengelola data spasial maupun data non spasial baik bencana skala kecil maupun bencana dalam skala besar terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan terjadinya risiko bencana.

8. **Forum Pengurangan Risiko Bencana**, yang selanjutnya disingkat FPRB adalah platform yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan, yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana.
9. **Kajian Risiko Bencana** adalah mekanisme terpadu untuk memberikan Gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis Tingkat ancaman, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk dokumen tertulis dan peta.
10. **Kapasitas (*capacity*)** adalah penguasaan sumber daya, cara, dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan dalam mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
11. **Kerentanan (*vulnerability*)** adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh berbagai penyebab.
12. **Kesiapsiagaan (*preparedness*)** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
13. **Komando** adalah kewenangan untuk memberikan perintah, mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi upaya penanganan darurat bencana.
14. **Korban bencana** adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
15. **Mitigasi (*mitigation*)** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
16. **Mitigasi fisik (*structural mitigation*)** adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun infrastruktur.
17. **Mitigasi non-fisik (*non structural mitigation*)** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/ atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.

18. **Pemulihan** (*recovery*) adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
19. **Penanggulangan bencana** (*disaster management*) adalah upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi
20. **Penyelenggaraan penanggulangan bencana** adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
21. **Peringatan dini** (*early warning*) adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
22. **Penanganan darurat bencana (PDB)** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman/ penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan.
23. **Pencegahan** (*prevention*) adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
24. **Pengungsi** adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
25. **Pos Komando Penanganan Darurat Bencana** adalah satuan tugas yang berfungsi sebagai pusat komando operasi tanggap darurat bencana, untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tanggap darurat bencana.
26. **Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana** merupakan satuan tugas yang bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana secara langsung di lokasi bencana.
27. **Rehabilitasi** (*rehabilitation*) adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
28. **Rekonstruksi** (*reconstruction*) adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya,

tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

29. **Rencana Kontingensi** adalah suatu dokumen rencana yang didasarkan pada keadaan kontingensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontingensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.
30. **Risiko (*risk*)** bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
31. **Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana** yang selanjutnya disingkat SKPDB adalah satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab Bencana dan menanggulangi dampak pada saat Keadaan Darurat.
32. **Status keadaan darurat bencana** adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
33. **Standar Operasi Prosedur**, yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
34. **Siaga darurat** adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di Masyarakat.
35. **Tanggap darurat (*emergency response*)** bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
36. **Transisi darurat** adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun/mereda eskalasinya atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bencana gempa bumi merupakan salah satu bencana yang berisiko di Kota Yogyakarta. Matrik prioritas risiko bencana mengidentifikasi bahwa bencana gempa bumi memiliki tingkat risiko tinggi dan kecenderungan meningkat. Gempa bumi menjadi salah satu bahaya yang memiliki warna merah sehingga merupakan prioritas dalam kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan (Rencana Penanggulangan Bencana Kota Yogyakarta, 2023). Kota Yogyakarta secara tektonik merupakan kawasan dengan tingkat aktivitas kegempaan yang cukup tinggi. Secara kondisi tektonik Kota Yogyakarta berdekatan dengan zona tumbukan lempeng Samudera dan banyak terdapat aktivitas sesar-sesar lokal di daratan. Sejarah gempa bumi menunjukkan bahwa Yogyakarta menunjukkan bahwa ada 12 kali bencana gempa bumi yang merusak (Koenti, 2016). Data gempa pertama yang ditemukan terjadi pada tahun 1840, 1859, 1867, 1875, 1937, 1943, 1957, 1981, 1992, 2001, 2004, dan 2006. Gempa bumi dengan jumlah korban yang sangat besar terjadi pada tahun 1867, 1943, dan 2006. Gempa bumi pada tahun 1867 mengakibatkan dampak kerusakan bangunan kraton dan kantor pemerintah Hindia Belanda. Tahun 1867 gempa bumi mengakibatkan dampak korban meninggal sebanyak 5 orang dan rumah roboh sebanyak 327, dan tahun 1943 bencana gempa bumi mengakibatkan dampak sebanyak 250 orang meninggal, dan 28.000 rumah roboh, serta gempa bumi tahun 2006 mengakibatkan dampak 6.234 orang meninggal dan 390.077 rumah roboh (Kajian Risiko Bencana Kota Yogyakarta, 2022).

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunungapi, atau runtuhnya batuan (BNPB, 2019). Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan mendadak di dalam kerak bumi yang menghasilkan gelombang seismik. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya gempa bumi yaitu adanya aktivitas tektonik yang sering terjadi di zona subduksi yakni satu lempeng tektonik bergerak di bawah lempeng lain. Gempa bumi juga dapat terjadi di zona pemekaran yang terjadi pada lempeng-lempeng tektonik bergerak menjauh satu sama lain. Aktivitas gunung api juga sering dikaitkan dengan gempa bumi. Gempa bumi vulkanik terjadi akibat pergerakan magma di bawah permukaan bumi yang menyebabkan tekanan dan pecahnya batuan. Aktivitas seperti pengeboran minyak dan gas serta penambangan juga dapat menyebabkan

gempa bumi buatan atau induksi. Penyusutan atau pengangkatan tanah yang terjadi akibat aktivitas geologis seperti pelarutan batuan karbonat di bawah permukaan yang menciptakan gua dan menyebabkan runtuhnya permukaan tanah.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu dilaksanakan di Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kapasitas dan meminimalkan risiko bencana. Penanggulangan bencana terdapat tahap pra-bencana yang meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana dan terdapat potensi bencana. Pada situasi tidak terjadi bencana, salah satu upaya yang dilakukan adalah penguatan kesiapsiagaan dimana salah satu kegiatannya adalah menyusun Rencana Kontingensi (Renkon). Kota Yogyakarta telah melaksanakan penyusunan Dokumen RPKB pada tahun 2024 dan akan melanjutkan pada penyusunan dokumen rencana kontingensi.

Perencanaan kontingensi adalah pendekatan terbaru dalam respons bencana yang cepat, tepat, efektif, efisien, dan akuntabel, yang mengintegrasikan pelaksanaan, perlindungan, dan evakuasi masyarakat terdampak bencana. Proses ini melibatkan kerjasama terpadu antara pemerintah, perguruan tinggi, media, dunia usaha, dan masyarakat. Konstruksi logika dan hukumnya ada pada undang-undang, peraturan, SNI, pedoman-pedoman dan sistem respon kemanusiaan global. Perencanaan Kontingensi adalah suatu proses perencanaan penanganan situasi darurat bencana pada jenis bahaya tertentu, dalam keadaan yang tidak menentu, dengan skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat dan ditetapkan secara formal (BNPB, 2021).

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas, maka Kota Yogyakarta dipandang perlu untuk Menyusun Dokumen Rencana Kontingensi Gempa Bumi. Dokumen Rencana Kontingensi Gempa Bumi memiliki manfaat untuk melindungi warga negara dan pemenuhan kebutuhan warga negara sehingga menjadi pedoman Kota Yogyakarta dalam mewujudkan penyelenggaraan darurat bencana. Dokumen rencana kontingensi ini diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam menyelenggarakan kegiatan tanggap darurat bencana gempa bumi. Dokumen rencana kontingensi ini memuat tentang kebijakan, strategi, dan langkah-langkah operasional dalam menghadapi situasi darurat akibat kegagalan teknologi bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*), sehingga

penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat akan lebih terpadu dan terkoordinir dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan amanat dari UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

1.2. Landasan Hukum

Rencana kontingensi bencana gempa bumi Kota Yogyakarta dibuat berdasarkan landasan Hukum Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan landasan konstitusional berupa Undang-Undang Dasar 1945. Landasan operasional:

1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan PPPA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Hak Perempuan pada Situasi Darurat dan Kondisi Khusus.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemulihan Dengan Segera Prasarana Sarana Vital.
21. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat Bencana.
22. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana.
23. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan.
24. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 05 Nomor 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu.
25. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2018 Penerimaan Bantuan Internasional dalam Keadaan Darurat Bencana.
26. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.
27. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2022 Pemulihan Dengan Segera Prasarana dan Sarana Vital.
28. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2022 tentang Klaster Logistik Penanggulangan Bencana.
29. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Satu Data Bencana.

30. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 014 tentang 2022 tentang Pelaksanaan Peringatan Dini Bencana pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
31. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat.
32. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi.
33. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Masyarakat Untuk Bantuan Penanggulangan Bencana.
34. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana.
35. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 08 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan.
36. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 Pedoman Pusat Pengendalian dan Operasi Bencana (Pusdalops-PB).
37. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Gudang Logistik dan Peralatan Dalam Status Keadaan Darurat Bencana.
38. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Radio Komunikasi Kebencanaan.
39. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana.
40. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Peralatan Khusus Penanggulangan Bencana.
41. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana.
42. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Penanggulangan Bencana.

43. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2014 Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana.
44. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 26 Tahun 2014 Pemanfaatan Bantuan Logistik Penanggulangan Bencana.
45. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
46. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat Bencana.
47. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
48. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 8 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana.
49. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah.
50. SNI 7937:2013 tentang Layanan Kemanusiaan dalam Bencana.
51. SNI 8851:2019 tentang Perencanaan Kontingensi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen rencana kontingensi gempa bumi Kota Yogyakarta disusun sebagai landasan strategi, operasional, dan pedoman penanganan keadaan darurat bencana dan sebagai dasar pengalokasian sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan di wilayah Kota Yogyakarta yang terlibat dalam menangani keadaan darurat bencana gempa bumi.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup rencana kontingensi ini mencakup hal-hal yang perlu dilaksanakan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya peristiwa dan situasi darurat bencana gempa bumi di wilayah Kota Yogyakarta, meliputi:

1. Peristiwa Gempa Bumi yang berdampak pada aspek kependudukan, aspek fisik, aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek layanan pemerintahan/publik.
2. Keadaan darurat bencana yang melingkupi wilayah Kemantren.

3. Penatakelolaan dan penatalaksanaan penanganan kedaruratan gempa bumi melalui pengorganisasian para pihak dan penetapan rencana kerja, serta pengelolaan sumber daya untuk penanganan darurat secara menyeluruh, terstruktur, dan terpadu dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip kerja kemanusiaan.

1.5 Kebijakan dan Strategi

Pelaksanaan penanganan darurat bencana secara cepat, tepat, efektif bertujuan untuk mengurangi korban jiwa dan kerugian akibat bencana. Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan kebijakan dan strategi umum dalam penanganan kedaruratan bencana sebagai arahan/pedoman umum yang bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berikut adalah kebijakan dan strategi penanganan kedaruratan bencana Pemerintah Kota Yogyakarta.

A. Kebijakan

1. Pemerintah Kota Yogyakarta bertanggung jawab atas penanganan kedaruratan bencana di Wilayah Kota Yogyakarta.
2. Penetapan koordinasi dalam pelaksanaan penanggulangan kedaruratan bencana dilakukan secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
3. Penetapan status keadaan darurat bencana.
4. Penetapan struktur koordinasi penanggulangan kedaruratan bencana.
5. Penetapan lokasi pos kendali koordinasi dan logistik dalam penanganan kedaruratan bencana.
6. Pelibatan dan pengerahan sumber daya dari seluruh unsur pentahelix Kota Yogyakarta (Lembaga Pemerintah, Lembaga Swasta, Organisasi Masyarakat Sipil, Media massa dan Akademisi) termasuk masyarakat terdampak dalam penanggulangan kedaruratan bencana.
7. Pencarian, Pertolongan, Evakuasi, dan penanganan korban terdampak bencana.
8. Pemenuhan kebutuhan dasar yang aksesibel bagi masyarakat terdampak bencana diantaranya: pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, rasa aman, dll.
9. Perlindungan Masyarakat yang terdampak bencana dengan mengutamakan kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, lansia, dan penyandang disabilitas.
10. Penanganan kedaruratan bencana dilaksanakan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, serta standar pelayanan minimum pada situasi darurat bencana.

11. Perlindungan terhadap aset pemerintah dan masyarakat terdampak bencana.
12. Pemulihan fungsi dengan segera sarana dan prasarana vital.
13. Pengalokasian dan pengelolaan anggaran daerah untuk penanggulangan kedaruratan bencana secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan pengelolaan keuangan yang berlaku.
14. Pelaksanaan validasi data pemerintah terkait dengan penanganan kedaruratan bencana.
15. Pelaksanaan penanganan kedaruratan bencana yang bersifat inklusif.
16. Pelaporan pelaksanaan penanganan darurat bencana yang transparan dan akuntabel.

B. Strategi

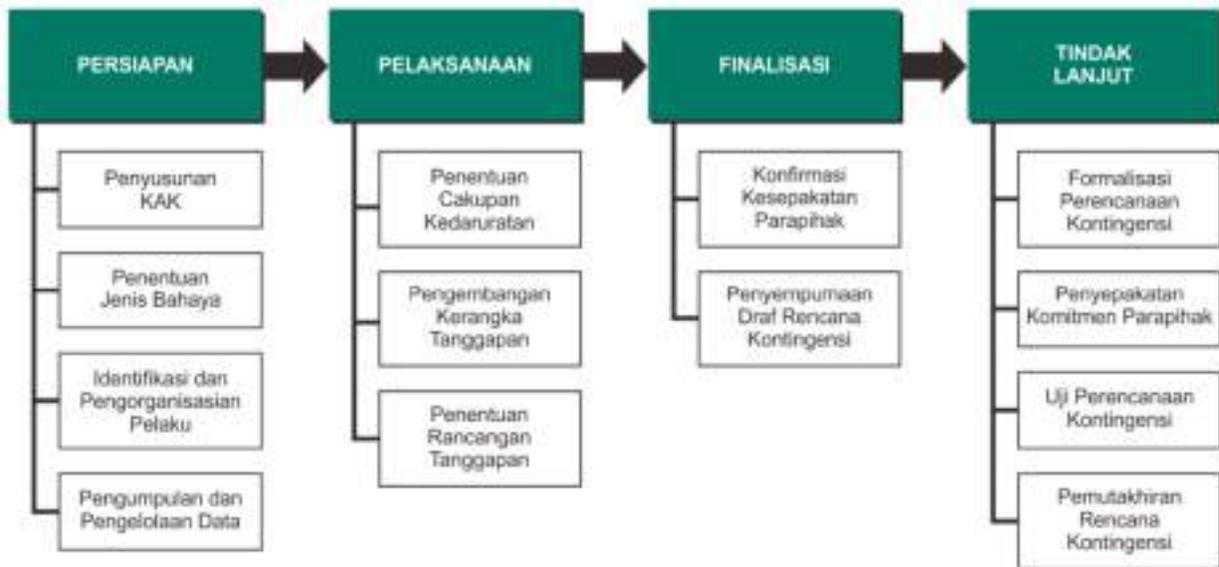
1. Melakukan koordinasi dengan lembaga terkait yang berwenang dan memiliki kapasitas dalam menjalankan sistem peringatan dini bahaya bencana.
2. Pengkajian cepat terhadap peringatan bahaya, kejadian, dampak bencana, dan penanganan kedaruratan.
3. Penetapan status kedaruratan bencana yaitu status siaga darurat dan/atau status tanggap darurat dan/atau transisi darurat ke pemulihan
4. Pengaktifan sistem komando kendali dan koordinasi dalam penanggulangan darurat bencana (Sistem Komando Penanggulangan Bencana /SKPDB).
5. Pengaktifan Pos Komando (Posko), koordinasi dan logistik dalam Penanganan Darurat Bencana.
6. Menjalinkan kerja sama dengan multi pihak dalam hal pengerahan sumber daya untuk penanganan darurat bencana.
7. Menyiapkan personel yang terlatih untuk penanganan evakuasi pencarian, pertolongan dan perawatan korban bencana.
8. Memanfaatkan semua fasilitas umum yang aman baik milik pemerintah, swasta atau masyarakat sebagai ruang evakuasi bencana.
9. Optimalisasi akses informasi satu data penanggulangan bencana termasuk penyediaan data terpilah *gender* dan kelompok rentan.
10. Optimalisasi pengerahan sumber daya personel, peralatan, dan logistik Kota Yogyakarta dalam penanganan kedaruratan bencana, baik dari pemerintah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha.

11. Menyediakan hunian sementara untuk penyintas bencana dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan.
12. Melakukan koordinasi dengan pihak keamanan untuk menghindari adanya tindakan kriminal pada saat situasi darurat bencana.
13. Melaksanakan pengerahan cadangan logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.
14. Menyediakan pelayanan *Psychological First Aid*.
15. Mendirikan posko bantuan Bencana.
16. Pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi korban bencana.
17. Melakukan pengerahan anggaran penanganan darurat bencana yang bersumber dari pemerintah maupun donasi dari swasta dan masyarakat.
18. Perbaikan sarana dan prasarana vital, serta pemulihan fungsi layanan umum terkait kebutuhan dasar masyarakat.
19. Pencegahan dan penanganan korban kekerasan berbasis gender dalam situasi bencana.
20. Pelaksanaan dan penegakan protokol kesehatan dalam penanganan kedaruratan bencana.
21. Pemantauan dan evaluasi penanganan kedaruratan bencana di semua sektor.
22. Pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan keuangan yang berlaku baik di Nasional maupun Kota Yogyakarta.
23. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanganan darurat bencana secara berkala.
24. Penyusunan laporan penanganan darurat bencana.
25. Penyusunan pelaporan keuangan untuk penanganan darurat bencana.

1.6 Pendekatan, Metode dan Tahapan Proses

Pendekatan partisipatif merupakan sebuah pendekatan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan terkait urusan-urusan publik agar keputusan yang diambil memiliki dasar informasi yang mendekati sempurna dengan tingkat penerimaan masyarakat yang tinggi (pihak mana saja masyarakat yang terlibat dalam penyusunan dokumen). Konsep ini menempatkan masyarakat lapisan bawah sebagai perencana dan penentu kebijakan di tingkat lokal. Pendekatan partisipatif dilakukan untuk memastikan bahwa penyusunan rencana kontingensi ini disepakati para pihak yang terlibat dalam penanganan darurat bencana gempa bumi di Kota Yogyakarta.

Perencanaan kontingensi merupakan suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan partisipatif yang melibatkan para pihak untuk membangun kesepakatan dan komitmen. Kegiatan dilaksanakan melalui pertemuan rapat dan lokakarya terdiri dari 4 tahapan, yaitu Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Finalisasi, dan Tahap Tindak Lanjut. Setiap tahapan terdiri dari beberapa kegiatan seperti digambarkan dalam diagram berikut ini.



Gambar 1. 1 Diagram Alur Penyusunan Rencana Kontingensi

1) Tahap Pelaksanaan

Tahap ini merupakan tahapan substantif penyusunan perencanaan kontingensi yang dilaksanakan melalui *focus group discussion* (FGD) untuk membangun kesepakatan perencanaan. Proses *focus group discussion* dipandu oleh fasilitator untuk menyepakati:

a) Penentuan Cakupan Kedaruratan

Meliputi cakupan geografis, demografis, dan intensitas kedaruratan yang dirangkum dalam 3 bagian, yakni karakteristik bahaya/ancaman, skenario kejadian, dan asumsi dampak bencana.

b) Pengembangan Kerangka Tanggapan

Meliputi turunan dari kebijakan dalam RPKB untuk mengarahkan tanggapan, seperti azas, prinsip, kerangka kebijakan-strategi dan tujuan.

c) Penentuan Rancangan Tanggapan

Merupakan pengorganisasian dari sistem yang akan mengarahkan paraparap dan mengendalikan jalannya operasi penanganan kedaruratan.

2) Tahap Finalisasi

a) Konfirmasi Kesepakatan Para Pihak

Diseminasi rencana kontingensi ditujukan kepada pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan lembaga usaha, agar diperoleh informasi dan timbul pemahaman terkait tugas dan kewajiban pada saat penanganan darurat bencana. Diseminasi dilaksanakan melalui diskusi dalam forum untuk memperoleh kesepakatan para pihak.

b) Penyempurnaan Draft Rencana Kontingensi

Penyempurnaan draft rencana kontingensi dapat dilakukan dengan diskusi dan review bersama dengan OPD dan para pihak yang bertugas dalam penanganan darurat bencana gempa bumi di Kota Yogyakarta.

3) Tahap Tindak Lanjut

a) Formalisasi Perencanaan Kontingensi

Proses formalisasi perencanaan kontingensi melalui penetapan/legalisasi. Perencanaan Kontingensi sebagai peraturan atau perundangan daerah yang menjadi lembar daerah.

b) Penyepakatan Komitmen Para Pihak

Memastikan komitmen para pihak dalam penanganan kedaruratan perlu diwujudkan dalam sebuah kesepakatan formal. Komitmen yang dibangun dan disepakati meliputi:

- a. Komitmen peran, tugas, dan tanggungjawab dalam bidang dan atau kegiatan penanganan kedaruratan.
- b. Komitmen mobilisasi sumber daya untuk mengurangi dan menghilangkan kesenjangan (gap) dari proyeksi kebutuhan sumber daya. Pokok sumber daya yang menjadi objek komitmen meliputi kuantitas dan kualitas

c) Uji Perencanaan Kontingensi

Pengujian sistem melalui latihan kesiapsiagaan untuk (1) pengujian operasionalisasi perencanaan dan mobilisasi sumber daya; (2) membangun kesadaran peran para pihak dalam penanganan kedaruratan, dan (3) membangun pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan kedaruratan.

d) Pemutakhiran Dokumen Rencana Kontingensi

1.7 Umpan Balik

Rencana kontingensi perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terbaru maka diperlukan masukan-masukan dari semua pihak termasuk didalamnya masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana gempa bumi. Rencana kontingensi bencana gempa bumi juga untuk mengakomodasi perubahan-perubahan tata kelola dan nomenklatur kelembagaan dari setiap lembaga yang ada di Kota Yogyakarta, maka perlu disediakan ruang untuk koordinasi dan konsolidasi dalam rangka perbaikan, peningkatan efektifitas atau penyesuaian terhadap perkembangan kontekstual wilayah. Masukan-masukan dan pengelolaan umpan balik ini dapat dikoordinasikan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta.

1.8 Masa Berlaku dan Pemutakhiran

Dokumen rencana kontingensi bencana gempa bumi Kota Yogyakarta berlaku selama tiga tahun. Masa berlaku tersebut ditetapkan agar rencana kontingensi sesuai dengan situasi terbaru, misalnya perubahan dinamika skala bencana, perubahan besaran jenis kerentanan, kapasitas atau kemampuan. Selain itu, pemutakhiran rencana kontingensi gempa bumi Kota Yogyakarta dilakukan melalui pengujian dan evaluasi (geladi) untuk memastikan kesesuaian dan pemahaman pemangku tugas tentang kerangka kerja dan langkah-langkah operasi penanganan kedaruratan.

1.9. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi

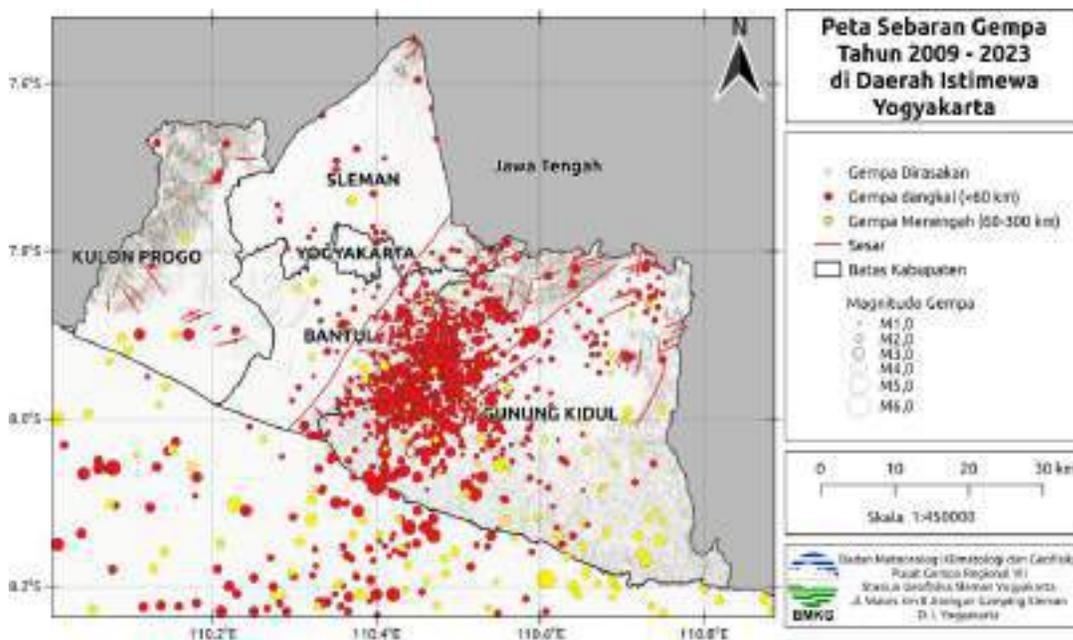
Rencana kontingensi ini dapat menjadi dasar dalam menyusun Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Kota Yogyakarta dengan penyesuaian dengan mempertimbangkan kejadian dan akibat langsung bencana yang terjadi.

BAB II

SITUASI

2.1 Karakteristik Bahaya

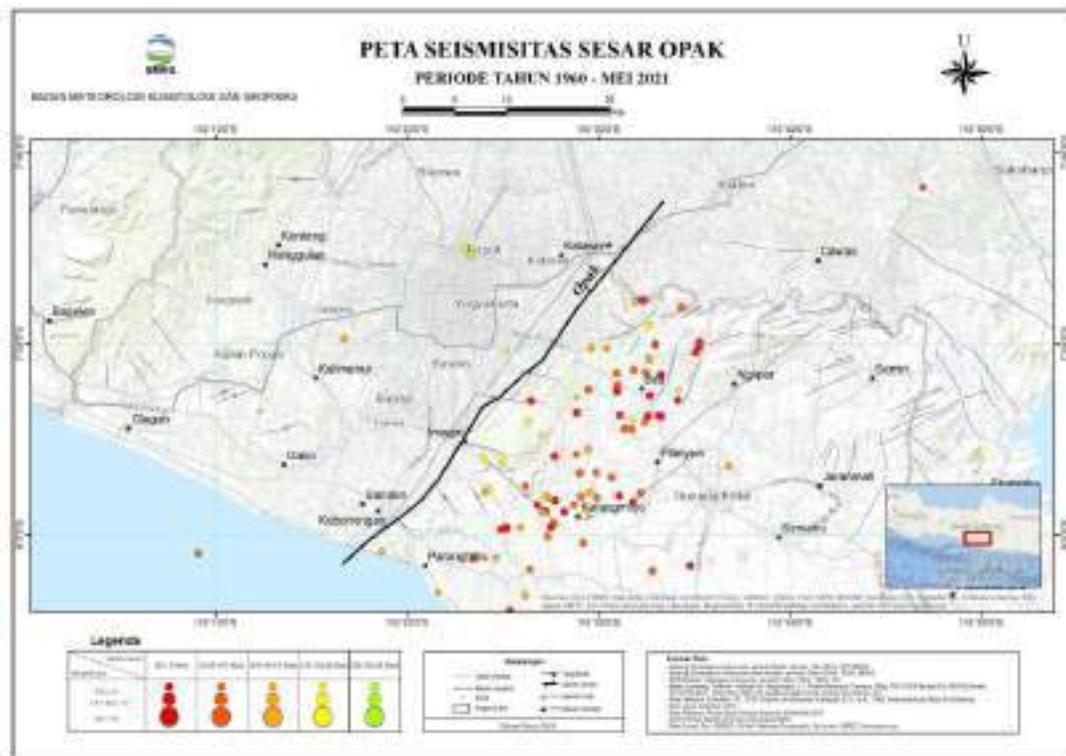
Kota Yogyakarta secara geografis terletak di pulau Jawa bagian selatan yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Wilayah ini merupakan pertemuan dua lempeng raksasa yaitu lempeng Indo Australia dan lempeng Eurasia. Pertemuan kedua lempeng tersebut tepat berada di selatan pulau Jawa atau bagian selatan Kota Yogyakarta. Daerah pergerakan lempeng Indo Australia yang menunjam dibawah lempeng Eurasia dikenal dengan istilah daerah subduksi. Aktivitas daerah subduksi yang sangat aktif mengakibatkan wilayah ini sering terjadi gempa bumi dengan kekuatan sedang sampai kuat karena energi yang tersimpan didalamnya sangat besar dan melibatkan massa yang sangat besar. Gempa bumi di Kota Yogyakarta juga diakibatkan oleh aktivitas sesar mayor aktif. Sesar mayor aktif yaitu sesar Opak yang berada di perbatasan antara Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul dan memanjang sampai Kabupaten Klaten. Sesar Opak sangat aktif karena aktivitas seismik yang tinggi di sepanjang sesar tersebut. Kota Yogyakarta memiliki karakteristik gempa bumi dangkal yaitu memiliki kedalaman < 60 km yang berlokasi di bagian selatan Kota Yogyakarta (BMKG, 2021). Berikut ini peta sebaran gempa bumi tahun 2009-2023 di Daerah Istimewa Yogyakarta.



Gambar 2. 1 Peta Sebaran Gempa Bumi Tahun 2009-2023 di Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber : BMKG, 2023

Sejak tahun 1840 wilayah Kota Yogyakarta terdapat 10 (sepuluh) kejadian gempa bumi yang mengakibatkan dampak korban jiwa dan kerusakan bangunan. Dampak kerusakan terjadi karena gempa bumi yang berlokasi di darat dan mengakibatkan pergerakan sesar aktif (Supartoyo dkk, 2016). Berdasarkan sejarah bencana gempa bumi, Sesar Opak mengakibatkan gempa bumi pada tahun 2006 dengan magnitudo 5.9 SR. Gempa Bumi utama tahun 2006 diikuti gempa bumi susulan yang berjumlah kurang lebih 750 gempa dengan magnitudo yang lebih kecil dari pada gempa bumi utama. Zona Sesar Opak membentuk gawir memanjang berarah barat daya-timur laut yang kemudian membelok ke arah timur. Berikut ini Gambar 2.2 Peta Seismisitas Sesar Opak.



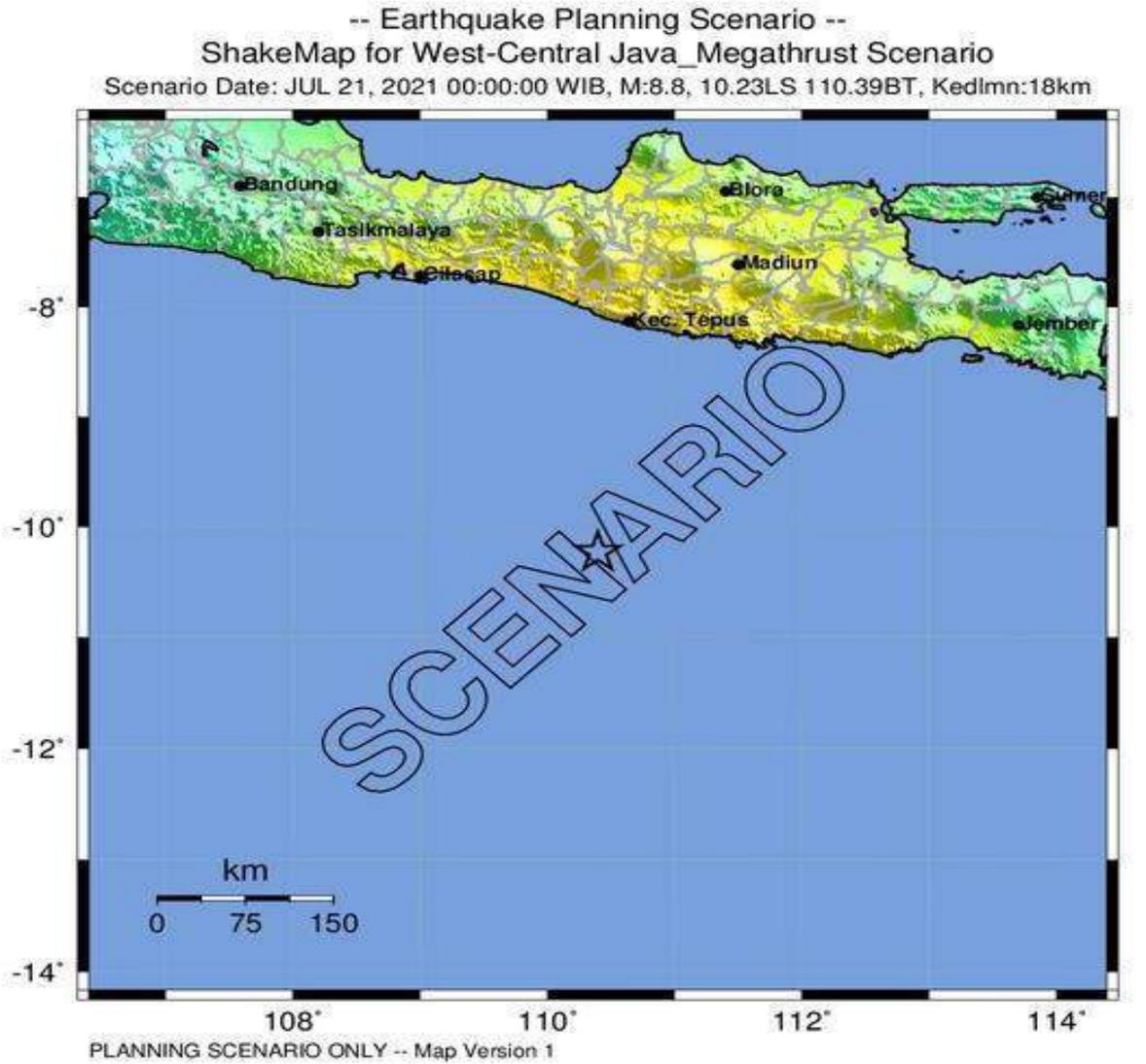
Gambar 2. 2 Peta Seismisitas Sesar Opak

Sumber : *BMKG, 2021*

2.2 Skenario Kejadian

Sesar opak mengakibatkan gempa bumi di Kota Yogyakarta. Skenario model tingkat guncangan *shakemap* gempa bumi sesar opak di Kota Yogyakarta menggunakan skenario terburuk yang dibuat oleh Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG). Skenario kejadian gempa bumi yang digunakan yaitu gempa bumi dengan magnitudo 6.6 SR dengan titik koordinat epicenter 110.41 BT, 7.88 LS, kedalaman 10 KM, dan sumber sesar opak. Berikut ini gambar 2.3 peta skenario

gempa bumi dan gambar 2.4 Peta Skenario model tingkat guncangan shakemap gempa bumi sesar opak (skenario terburuk) Kota Yogyakarta.

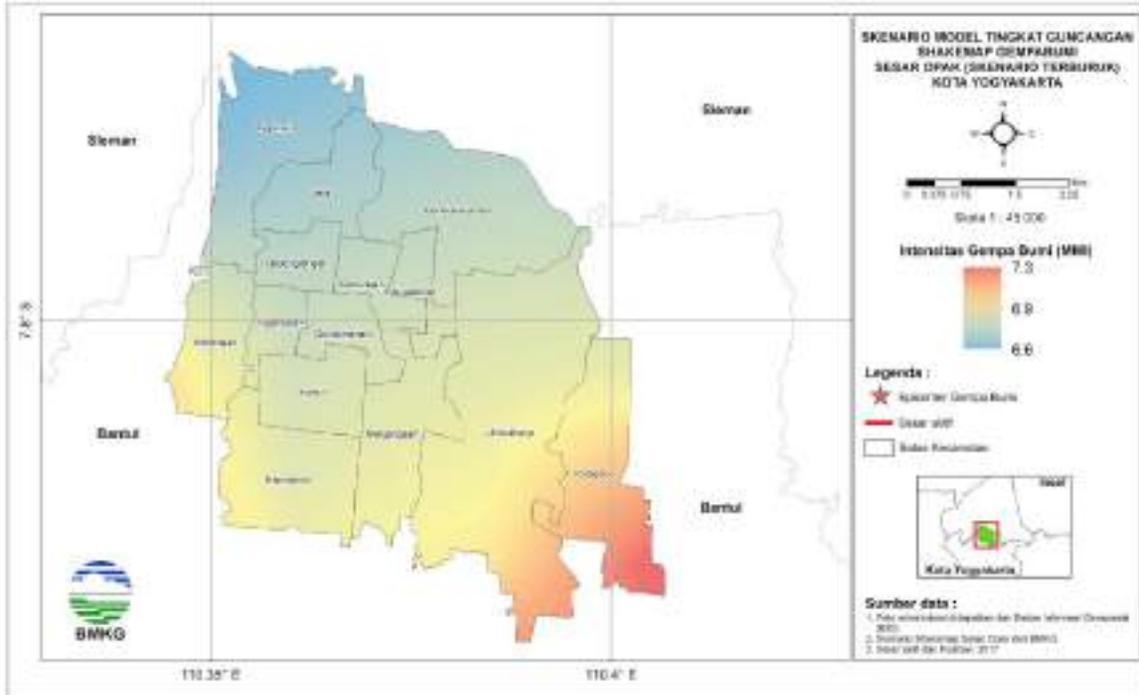


PERCEIVED SHAKING	Not felt	Weak	Light	Moderate	Strong	Very strong	Severe	Violent	Extreme
POTENTIAL DAMAGE	none	none	none	Very light	Light	Moderate	Mod./Heavy	Heavy	Very Heavy
PEAK ACC. (%g)	<0.05	0.3	2.8	6.2	12	22	40	75	>139
PEAK VEL. (cm/s)	<0.02	0.1	1.4	4.7	9.6	20	41	86	>178
INSTRUMENTAL INTENSITY	I	II-III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X+

Scale based upon Worden et al. (2011)

Gambar 2. 3 Peta Skenario Gempa Bumi

Sumber: *BMKG, 2021*



Gambar 2. 4 Peta Skenario Model Tingkat Guncangan Shakemap Gempa Bumi Sesar Opak (Skenario Terburuk) Kota Yogyakarta

Sumber : *BMKG, 2024*

Peta tersebut mengidentifikasi bahwa Kota Yogyakarta memiliki intensitas bahaya primer VI-VIII MMI (*Modified Mercalli Intensity*). Dua Kemantren diidentifikasi memiliki potensi kerusakan sedang sampai dengan berat yaitu Kemantren Kotagede dan Umbulharjo, sedangkan Kemantren Mergangsan, Mantrijeron, Kraton, Gondomanan, Danurejan, Pakualaman, Gondokusuman, Wirobrajan, Ngampilan, Gedongtengen, Jetis, dan Tegalrejo memiliki potensi kerusakan sedang. Ringkasan skenario kejadian gempa bumi Kota Yogyakarta dideskripsikan pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2. 1 Ringkasan Skenario Kejadian Gempa Bumi Kota Yogyakarta

1.	Waktu kejadian	a. Hari / Tanggal : Selasa, 23 September 20xx b. Waktu : 08.00 WIB c. Durasi. : 20- 60 Detik
2.	Kekuatan Gempa Bumi	6.6 SR
3.	Lokasi Gempa Bumi	a. Titik Koordinat Epicenter : 110.41 BT, 7.88 LS

		b. Kedalaman : 10 KM c. Jarak dari Epicenter : 0-25 KM d. Sumber Gempa Bumi : Sesar Opak
4.	Cakupan Wilayah Terdampak	14 Kemantren di Kota Yogyakarta terdampak gempa bumi.
5.	Bahaya primer	Gempa Bumi dangkal. Intensitas bahaya primer VI-VIII MMI dengan dampak sedang diantaranya banyak retakan terjadi pada dinding bangunan sederhana, Sebagian roboh, kaca pecah. Sebagian plester dinding lepas dan hampir jatuh. Struktur bangunan mengalami kerusakan ringan sampai sedang serta berpotensi mengalami kerusakan berat pada struktur bangunan yang sederhana. Pada beberapa lokasi, bagian non struktur bangunan mengalami kerusakan ringan, seperti retak rambut pada dinding, atap bergeser ke bawah, dan sebagian berjatuh, serta berpotensi mengalami kerusakan sedang pada struktur bangunan yang sederhana.
6.	Bahaya Sekunder	Gempa bumi susulan, likuifaksi, runtuh gedung yang tidak memenuhi standar bangunan tahan gempa bumi, kemacetan lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan, dll.
7.	Objek Vital Terdampak	Terganggunya layanan komunikasi, pasokan listrik, pasokan BBM, LPG, air bersih, dll.

2.3 Asumsi Dampak Gempa Bumi

Asumsi dampak gempa bumi merupakan perkiraan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan akibat bencana gempa bumi. Asumsi dampak bencana dapat dikembangkan berdasarkan pertimbangan aspek kerentanan dan kapasitas aset kehidupan aset. Asumsi dampak dapat berupa asumsi terburuk berdasarkan sejarah kejadian, atau asumsi yang paling mungkin terjadi berdasarkan kesepakatan. Asumsi dampak gempa bumi menggunakan pendekatan kejadian gempa bumi yang pernah terjadi di Kota Yogyakarta.

A. Aspek Kependudukan

Bencana gempa bumi mengakibatkan dampak pada aspek kependudukan pada 14 Kemantren. Aspek kependudukan meliputi penduduk terdampak gempa bumi pada 14 Kemantren berupa jiwa terancam, meninggal, luka berat, sedang ringan, dan mengungsi. Berikut ini tabel 2.2 penduduk terdampak bencana gempa bumi di Kota Yogyakarta.

Tabel 2. 2 Penduduk Terdampak Bencana Gempa Bumi di Kota Yogyakarta

No.	Kemantren	Kriteria						
		Total Penduduk	Jiwa Terancam	Meninggal	Luka Berat	Luka Sedang	Luka Ringan	Mengungsi
1	Tegalrejo	37.408	37.408	18	694	1.388	3.47	10.408
2	Gondokusuman	43.118	43.118	22	864	1.728	4.319	12.954
3	Jetis	27.16	27.16	14	559	1.117	2.615	8.376
4	Danurejan	21.17	21.17	11	428	855	2.139	6.415
5	Gedongtengen	19.184	19.184	10	386	770	1.926	5.778
6	Ngampilan	18.055	18.055	7	285	570	1.425	4.277
7	Wirobrajan	28.156	28.156	14	696	1.115	2.787	9.752
8	Mantrijeron	35.294	35.294	16	834	1.334	3.334	11.669
9	Kraton	21.421	21.421	10	430	861	2.151	6.454
10	Gondomanan	14.644	14.644	8	295	589	1.472	4.418
11	Pakualaman	10.594	10.594	5	183	366	915	2.745
12	Mergangsan	31.591	31.591	16	797	3.508	4.466	11.163
13	Umbulharjo	71.743	71.743	41	4.240	5.087	6.359	16.956
14	Kotagede	35.483	35.483	33	3.328	3.994	4.992	12.772
Total		415.021	415.021	225	14.019	23.282	42.370	124.137

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, Hasil Analisis, 2024

Gempa bumi mengakibatkan dampak kependudukan pada 415.021 jiwa pada 14 Kemantren di Kota Yogyakarta. Identifikasi jumlah total dampak kependudukan dengan total diantaranya 415.021 jiwa terancam, 225 meninggal, 14.019 jiwa luka berat, 23.282 jiwa luka sedang, 42.370 jiwa luka ringan, dan 124.137 mengungsi.

Identifikasi dampak kependudukan tertinggi terdapat pada dua Kemantren yaitu Kemantren Umbulharjo dan Kemantren Kotagede. Jumlah total dampak kependudukan pada kemantren Umbulharjo yaitu 71.734 jiwa terancam, 41 meninggal, 4.240 jiwa luka berat, 5.087 jiwa luka sedang, 6.359 jiwa luka ringan, dan 16.956 mengungsi. Sedangkan Jumlah total dampak kependudukan pada kemantren Kotagede yaitu 35.483 jiwa terancam, 33 meninggal, 3.328 jiwa luka berat, 3.994 jiwa luka sedang, 4.992 jiwa luka ringan, dan 12.772 mengungsi.

Aspek kependudukan juga meliputi jumlah wisatawan domestik dan mancanegara yang terdampak bencana gempa bumi. Berikut ini tabel wisatawan terdampak bencana gempa bumi Kota Yogyakarta.

Tabel 2. 3 Wisatawan Terdampak Bencana Gempa Bumi di Kota Yogyakarta

No	Kemantren	Wisatawan				Jumlah
		Domestik	M mancanegara	Domestik Terdampak	M mancanegara Terdampak	
1.	Tegalrejo	0	0	0	0	0
2.	Gondokusuman	0	0	0	0	0
3.	Jetis	0	0	0	0	0
4.	Danurejan	0	0	0	0	0
5.	Gedongtengen	0	0	0	0	0
6.	Ngampilan	0	0	0	0	0
7.	Wirobrajan	0	0	0	0	0
8.	Mantrijenron	0	0	0	0	0
9.	Kraton	2.672	443	187	31	218
10.	Gondomanan	4.455	68	312	5	317
11.	Pakualaman	0	0	0	0	0
12.	Mergangsan	0	0	0	0	0
13.	Umbulharjo	0	0	0	0	0
14.	Kotagede	2.424	78	364	0	364
Total		9.550	589	862	36	898

Sumber : *Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Hasil Analisis, 2024 (Asumsi berdasarkan wisatawan yang berada di objek wisata)*

Identifikasi dampak kependudukan terhadap wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara terdampak akibat bencana gempa bumi yaitu 10.139 jiwa. Dengan jumlah wisatawan domestik terdampak tertinggi Kemantren Kotagede yaitu 364 jiwa, sedangkan wisatawan mancanegara terdampak tertinggi Kemantren Kraton yaitu 31 jiwa. Total jumlah wisatawan domestik dan mancanegara terdampak tertinggi Kemantren Gondomanan yaitu 317 jiwa.

B. Aspek Fisik

BMKG mengidentifikasi dampak fisik akibat bencana gempa bumi di Kota Yogyakarta meliputi VI-VIII MMI. Dua Kemantren diidentifikasi memiliki potensi kerusakan fisik sedang sampai dengan berat yaitu Kemantren Kotagede dan Umbulharjo, sedangkan Kemantren Mergangsan, Mantrijeron, Kraton, Gondomanan, Danurejan, Pakualaman,

Gondokusuman, Wirobrajan, Ngampilan, Gedongtengen, Jetis, dan Tegalrejo memiliki potensi kerusakan fisik sedang. Berikut ini tabel dampak fisik akibat bencana gempa bumi.

Tabel 2. 4 Jumlah dan Tingkat Kerusakan Rumah Terdampak di Kota Yogyakarta

No	Kemantren	Total Rumah di Kota Yogyakarta	Rumah Terdampak			Jumlah Kerusakan
			Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	
1.	Tegalrejo	11.451	515	1.145	2.290	3.951
2.	Gondokusuman	11.702	527	1.170	2.340	4.037
3.	Jetis	4.858	219	486	972	1.676
4.	Danurejan	4.706	212	471	941	1.624
5.	Gedongtengen	3.721	167	372	744	1.284
6.	Ngampilan	3.358	151	336	672	1.159
7.	Wirobrajan	8.661	390	866	1.732	2.988
8.	Mantrijenron	13.045	587	1.305	2.609	4.501
9.	Kraton	7.323	330	732	1.465	2.526
10.	Gondomanan	3.846	173	385	769	1.327
11.	Pakualaman	2.562	115	256	512	884
12.	Mergangsang	11.451	515	1.145	2.290	3.951
13.	Umbulharjo	25.687	2.312	3.853	10.275	16.440
14.	Kotagede	12.873	1.159	1.931	5.149	8.239
Total		125.244	7.371	14.452	32.761	54.584

Sumber : *Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, Hasil Analisis, 2024*

Diskensariokan dalam rencana kontingensi gempa bumi ini, di wilayah Kota Yogyakarta total rumah terdampak bencana gempa bumi yaitu 54.584 rumah. Asumsi rumah rusak berat dengan total 7.371 rumah dengan rumah rusak berat tertinggi terdapat pada dua Kemantren yaitu Kemantren Umbulharjo sejumlah 2.312 dan Kemantren Kotagede sejumlah 1.159. asumsi rumah rusak sedang dengan total 14.452 rumah dengan terdampak tertinggi pada dua Kemantren yaitu Kemantren Umbulharjo 3.853 dan Kemantren Kotagede sejumlah 1.931. sedangkan rumah rusak ringan total kerusakan 32.761 dengan dampak tertinggi pada dua Kemantren yaitu Kemantren Umbulharjo 10.275 dan Kemantren Kotagede 5.149.

Tabel 2. 5 Jumlah dan Tingkat Kerusakan Jalan dan Jembatan Terdampak di Kota Yogyakarta

No	Kemantren	Jalan Nasional			Jalan Provinsi			Jalan Kota			Jembatan		
		RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR
1	Tegalrejo	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0	0	2
2	Gondokusuman	0	0	0	0	0	0	1	3	33	0	0	1
3	Jetis	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0	0	1
4	Danurejan	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	1
5	Gedongtengen	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0
6	Ngampilan	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
7	Wirobrajan	0	0	0	0	0	0	0	1	11	0	0	1
8	Mantrijenron	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kraton	0	0	0	0	0	0	1	1	17	0	0	0
10	Gondomanan	0	0	0	0	0	0	0	1	10	0	0	0
11	Pakualaman	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	0	1
12	Mergangsang	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0	1	1
13	Umbulharjo	0	1	0	0	1	0	2	4	48	1	1	10
14	Kotagede	0	1	0	0	1	0	1	2	23	1	1	2
Total		0	2	0	0	2	0	4	16	189	2	3	20

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel 2.5 dapat diidentifikasi jalan nasional dan jalan provinsi mengalami rusak sedang dengan total masing-masing nasional 2 KM dan jalan Provinsi 2 KM pada Kemantren Kotagede dan Umbulharjo. Total jalan kota rusak ringan di Kota Yogyakarta adalah 189 KM. Terdapat dua Kemantren dengan total kerusakan tertinggi yaitu Kemantren Umbulharjo sejumlah 48 KM dan Kemantren Gondokusuman sejumlah 33 KM. Selain itu, total jalan kota rusak sedang yaitu 16 KM, dengan dua Kemantren terdampak tertinggi yaitu Kemantren Umbulharjo yaitu 4 KM dan Kemantren Gondokusuman yaitu 3 KM. Total jalan kota rusak berat yaitu 6 KM dengan Kemantren terdampak tertinggi jalan rusak berat yaitu Kemantren Umbulharjo sejumlah 2 KM.

Total jembatan rusak berat sejumlah 2 unit, dengan dua Kemantren terdampak yaitu Kemantren Umbulharjo dan Kemantren Kotagede masing-masing 1 unit. Sejumlah 3 unit jembatan rusak sedang terdapat di Kemantren Kotagede, Kemantren Umbulharjo dan Kemantren

Mergangsan masing-masing 1 unit. Total jembatan rusak ringan yaitu 20 unit, dengan Kemantren Tertinggi yaitu Kemantren Umbulharjo sejumlah 10 unit.

Tabel 2. 6 Jumlah dan Tingkat Kerusakan Bangunan Sekolah Terdampak di Kota Yogyakarta

No	Kemantren	TK/PAUD			SD/MI			SMP/MTS			SMA/SMK/MA		
		RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR
1	Umbulharjo	2	5	52	2	2	15	2	0	5	1	1	11
2	Gondokusuman	0	1	13	0	0	5	1	1	3	1	0	4
3	Kotagede	2	2	27	1	2	10	1	0	2	0	0	2
4	Mantrijeron	1	1	13	1	1	4	0	0	1	1	0	2
5	Mergangsan	1	1	12	1	2	4	0	0	1	0	0	2
6	Jetis	0	1	10	0	0	5	0	1	2	0	0	2
7	Tegalrejo	0	1	11	0	0	4	0	0	1	0	0	2
8	Wirobrajan	0	1	11	0	0	3	0	0	1	0	0	1
9	Gondomanan	0	0	7	0	0	3	0	0	1	0	0	1
10	Gedongtengen	0	0	4	0	0	2	0	0	1	0	0	1
11	Kraton	0	0	5	0	0	2	0	0	1	0	0	0
12	Danurejan	0	0	5	0	0	2	0	0	1	0	0	0
13	Ngampilan	0	0	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0
14	Pakualaman	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Total		6	13	177	5	7	64	4	2	20	3	1	28

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Hasil Analisis, 2024

Tabel 2.6 menunjukkan jumlah dan Tingkat kerusakan bangunan sekolah terdampak di Kota Yogyakarta yang mengidentifikasi bahwa total kerusakan bangunan TK/PAUD sejumlah 196. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sejumlah 177 bangunan rusak ringan, 13 bangunan rusak sedang dan sejumlah 6 bangunan rusak berat. Total kerusakan bangunan SD/MI sejumlah 76. Sejumlah 64 bangunan rusak ringan, 7 bangunan rusak sedang dan 5 bangunan rusak berat. Total kerusakan bangunan untuk SMP/MTS yaitu 26. Diidentifikasi 20 bangunan rusak ringan, 2 bangunan rusak sedang dan 4 bangunan rusak berat. Dan total kerusakan bangunan SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta adalah 32 dengan 28 bangunan rusak ringan, 1 bangunan rusak sedang dan 3 bangunan rusak berat.

Tabel 2. 7 Jumlah dan Tingkat Kerusakan Bangunan Sekolah Terdampak di Kota Yogyakarta

No	Kemantren	SLB			PKBM			SKB			PT		
		RB	RS	RR									
1	Umbulharjo	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	1	8
2	Gondokusuman	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	2
3	Kotagede	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
4	Mantrijeron	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	Mergangsan	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
6	Jetis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	Tegalrejo	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
8	Wirobrajan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Gondomanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Gedongtengen	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
11	Kraton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Danurejan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Ngampilan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Pakualaman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	3	0	0	7	0	0	1	3	1	15

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Hasil Analisis, 2024

Total kerusakan bangunan sekolah terdampak di Kota Yogyakarta pada tabel 2.7 dapat diidentifikasi sebagai berikut. Total kerusakan bangunan SLB yaitu 3 bangunan dengan kategori rusak ringan. Sejumlah 7 bangunan PKBM mengalami rusak ringan, 1 bangunan SKB rusak ringan dan sejumlah 19 perguruan tinggi mengalami kerusakan, sejumlah 15 bangunan rusak ringan, 1 bangunan rusak sedang dan 3 bangunan rusak berat.

Tabel 2. 8 Jumlah dan Tingkat Kerusakan Fasilitas Perkantoran Terdampak di Kota Yogyakarta

No	Kemantren	Layanan Perkantoran					
		Kantor Pemerintahan			Kantor Swasta		
		RB	RS	RR	RB	RS	RR
1	Tegalrejo	0	0	3	0	0	5
2	Gondokusuman	0	0	5	0	0	5
3	Jetis	0	0	4	0	0	4
4	Danurejan	0	0	5	0	0	4
5	Gedongtengen	0	0	5	0	0	1
6	Ngampilan	0	1	6	0	0	3
7	Wirobrajan	0	0	6	0	0	5
8	Mantrijenron	0	0	3	0	1	4
9	Kraton	0	0	6	0	0	1

No	Kemantren	Layanan Perkantoran					
		Kantor Pemerintahan			Kantor Swasta		
		RB	RS	RR	RB	RS	RR
10	Gondomanan	0	0	5	0	1	2
11	Pakualaman	0	1	6	0	0	2
12	Mergangsang	1	0	4	0	0	2
13	Umbulharjo	2	1	11	1	1	8
14	Kotagede	1	1	10	1	1	10
Total		4	6	77	3	6	54

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Jumlah dan Tingkat kerusakan fasilitas perkantoran di Kota Yogyakarta terbagi menjadi dua yaitu kantor pemerintah dan kantor swasta. Total kerusakan kantor pemerintah sejumlah 87 bangunan. Hasil mengidentifikasi 77 bangunan rusak ringan, 6 bangunan rusak sedang dan 4 bangunan rusak berat. Sejumlah 62 bangunan kantor swasta mengalami kerusakan dengan identifikasi 54 bangunan rusak ringan, 6 bangunan rusak sedang dan 3 bangunan rusak berat.

Tabel 2. 9 Jumlah dan Tingkat Kerusakan Layanan Kesehatan Terdampak

No	Kemantren	RS Pemerintahan			RS Swasta			RS Bersalin			Puskesmas		
		RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR
1	Tegalrejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gondokusuman	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
3	Jetis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Danurejan	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	Gedongtengen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Ngampilan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
7	Wirobrajan	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
8	Mantrijenron	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9	Kraton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
10	Gondomanan	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
11	Pakualaman	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
12	Mergangsang	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0
13	Umbulharjo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
14	Kotagede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total		1	3	4	0	0	3	0	0	3	2	4	6

Sumber : Dinas Kesehatan, Hasil Analisis, 2024

Tabel 2.9 mengidentifikasi jumlah dan Tingkat kerusakan layanan Kesehatan terdampak di Kota Yogyakarta. Hasil mengidentifikasi sejumlah 8 bangunan RS Pemerintahan mengalami kerusakan. 4 bangunan rusak ringan, 3 bangunan rusak sedang dan 1 bangunan rusak berat. 3 bangunan RS Swasta rusak ringan, 3 RS Bersalin rusak ringan dan total kerusakan bangunan

puskesmas sejumlah 12 Puskesmas. Hasil menunjukkan 6 puskesmas rusak ringan, 4 puskesmas rusak sedang dan 2 puskesmas rusak berat.

Tabel 2. 10 Jumlah dan Tingkat Kerusakan Fasilitas Publik, Fasilitas Telekomunikasi, Fasilitas Energi Terdampak di Kota Yogyakarta

No	Kemantren	GOR			Lapangan			Stadion			SPBU		
		RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR
1	Tegalrejo	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2	Gondokusuman	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
3	Jetis	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Danurejan	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gedongtengen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Ngampilan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Wirobrajan	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Mantrijenron	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9	Kraton	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Gondomanan	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Pakualaman	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Mergangsang	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Umbulharjo	2	2	2	0	0	1	0	0	1	1	0	2
14	Kotagede	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		3	4	12	0	0	1	0	0	2	1	1	4

Sumber : BPS Kota Yogyakarta, Hasil Analisis, 2024

Tabel 2.10 menunjukkan bahwa jumlah dan Tingkat kerusakan fasilitas publik, fasilitas telekomunikasi dan fasilitas energi di Kota Yogyakarta. Hasil mengidentifikasi bahwa sejumlah 19 Gor mengalami kerusakan yaitu 12 rusak ringan, 4 rusak sedang dan 3 rusak berat. 1 lapangan terbuka rusak ringan di Kemantren Umbulharjo, 2 stadion rusak ringan terdapat di Kemantren Umbulharjo dan Gondokusuman, dan sejumlah 6 SPBU di Kota Yogyakarta mengalami kerusakan yaitu 4 rusak ringan, 1 rusak sedang dan 1 rusak berat.

Tabel 2. 11 Jumlah dan Tingkat Kerusakan Fasilitas Publik, Fasilitas Telekomunikasi, Fasilitas Energi Terdampak di Kota Yogyakarta

No	Kemantren	Menara BTS		
		RB	RS	RR
1	Tegalrejo	0	0	3
2	Gondokusuman	0	1	14
3	Jetis	0	0	5
4	Danurejan	0	0	4
5	Gedongtengen	0	0	4
6	Ngampilan	0	0	2

No	Kemantren	Menara BTS		
		RB	RS	RR
7	Wirobrajan	0	0	2
8	Mantrijenron	0	1	4
9	Kraton	0	0	1
10	Gondomanan	0	1	8
11	Pakualaman	0	0	2
12	Mergangsang	0	1	3
13	Umbulharjo	1	3	16
14	Kotagede	1	1	5
Total		2	8	73

Sumber : BPS Kota Yogyakarta, Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel 2.11 menunjukkan jumlah dan tingkat kerusakan fasilitas publik, fasilitas telekomunikasi dan fasilitas energi. Hasil menunjukkan bahwa sejumlah 83 menara BTS mengalami kerusakan, yaitu 73 rusak ringan tertinggi di Kemantren Umbulharjo yaitu 16 dan Kemantren Gondokusuman yaitu 14. 8 menara BTS rusak sedang terdapat di Kemantren Umbulharjo sejumlah 3 dan 2 rusak berat terdapat di dua Kemantren yaitu Kemantren Kotagede dan Kemantren Umbulharjo.

Tabel 2. 12 Jumlah dan Tingkat Kerusakan Fasilitas Air Bersih dan Fasilitas Perekonomian Terdampak di Kota Yogyakarta

No	Kemantren	Fasilitas Air Bersih						Fasilitas Perekonomian								
		Saluran Irigasi			PDAM/Sumur/Mata Air			Bank Umum Pemerintah			Bank Umum Swasta			Bank Perkreditan Rakyat (BPR)		
		RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR
1	Tegalrejo	0	0	0	0	0	7	0	0	1	0	0	1	0	0	0
2	Gondokusuman	0	0	1	0	0	10	0	0	7	0	0	5	0	0	1
3	Jetis	0	0	0	0	0	5	0	0	3	0	0	3	0	0	1
4	Danurejan	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1
5	Gedongtengen	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1
6	Ngampilan	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
7	Wirobrajan	0	0	0	0	0	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0
8	Mantrijenron	0	0	0	0	1	2	0	1	1	0	0	1	0	0	1
9	Kraton	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Gondomanan	0	0	0	0	0	2	0	0	4	0	0	2	0	0	1
11	Pakualaman	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Kemantren	Fasilitas Air Bersih						Fasilitas Perekonomian								
		Saluran Irigasi			PDAM/Sumur/Mata Air			Bank Umum Pemerintah			Bank Umum Swasta			Bank Perkreditan Rakyat (BPR)		
		RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR
12	Mergangsang	0	0	0	0	1	3	0	1	1	0	0	3	0	0	1
13	Umbulharjo	0	0	1	1	1	19	1	1	10	1	1	4	1	1	3
14	Kotagede	0	0	0	1	1	10	1	1	3	1	0	0	0	0	1
Total		0	0	2	2	4	77	2	4	34	2	1	21	1	1	11

Sumber : PDAM Kota Yogyakarta, BPS Kota Yogyakarta, Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel 2.12 dapat diidentifikasi jumlah dan Tingkat kerusakan fasilitas air bersih dan fasilitas perekonomian terdampak di Kota Yogyakarta. Hasil mengidentifikasi bahwa fasilitas air bersih terbagi menjadi dua yaitu saluran irigasi dan DAM/Sumur/Mata air. Data fasilitas air bersih menunjukkan 2 saluran irigasi rusak ringan di dua Kemantren yaitu Kemantren Umbulharjo dan Kemantren Gondokusuman dan total 83 DAM/Sumur/Mata air terdampak yaitu 77 rusak ringan dengan tiga Kemantren terdampak tertinggi yaitu Kemantren Umbulharjo 19, Kemantren Kotagede dan Kemantren Gondokusuman sejumlah 10.

Fasilitas Perekonomian terbagi menjadi tiga yaitu bank umum pemerintah, bank umum swasta dan bank perkreditan rakyat (BPR). Data menunjukkan bahwa total kerusakan bank umum pemerintah 40 bangunan, yaitu 34 bangunan rusak ringan, 4 bangunan rusak sedang dan 2 bangunan rusak berat. Bank umum swasta dengan total kerusakan 24 bangunan, yaitu 21 bangunan rusak ringan, 1 bangunan rusak sedang terdapat di Kemantren Umbulharjo dan 2 bangunan rusak berat. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan total terdampak 13 bangunan, yaitu 11 bangunan rusak ringan, 1 bangunan rusak sedang dan 1 bangunan rusak berat terdapat di Kemantren Umbulharjo.

Tabel 2. 13 Jumlah dan Tingkat Kerusakan Fasilitas Perekonomian dan Fasilitas Perhotelan Terdampak di Kota Yogyakarta

No	Kemantren	Fasilitas Perekonomian						Fasilitas Perhotelan					
		Pasar			Mall			Hotel Bintang			Hotel Non-Bintang		
		RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR
1	Tegalrejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gondokusuman	0	0	2	0	0	2	0	0	4	0	1	9
3	Jetis	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Danurejan	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	10
5	Gedongtengen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Ngampilan	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5
7	Wirobrajan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Mantrijenron	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	19
9	Kraton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
10	Gondomanan	0	0	1	0	1	2	0	0	1	0	0	4
11	Pakualaman	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4
12	Mergangsang	0	0	1	0	0	0	1	2	8	1	3	37
13	Umbulharjo	1	1	4	0	0	0	1	1	5	2	3	31
14	Kotagede	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	60
Total		1	2	10	0	1	4	2	3	25	4	11	181

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Tabel 2.13 menunjukkan bahwa jumlah dan Tingkat kerusakan fasilitas perekonomian dan fasilitas perhotelan di Kota Yogyakarta. Fasilitas perekonomian yang terbagi dalam pasar dan mall menunjukkan bahwa total jumlah kerusakan bangunan pasar akibat gempa bumi yaitu 13 bangunan, yaitu 10 rusak ringan, 2 bangunan rusak sedang dan 1 bangunan rusak berat terdapat di Kemantren Umbulharjo. Total kerusakan mall akibat bencana gempa bumi sejumlah 5 bangunan yaitu 4 bangunan rusak ringan dan 1 bangunan rusak sedang terdapat di kemantren Gondomanan.

Fasilitas Perhotelan terbagi menjadi dua yaitu hotel bintang dan hotel non-bintang. Data menunjukkan bahwa total jumlah kerusakan hotel bintang di Kota Yogyakarta yaitu 30 bangunan, 25 bangunan rusak ringan, 3 bangunan rusak sedang dan 2 bangunan rusak berat. Hotel non-

bintang dengan total kerusakan 196 bangunan, yaitu 181 bangunan rusak ringan, 11 bangunan rusak sedang dan 4 bangunan rusak berat.

Tabel 2. 14 Jumlah dan Tingkat Kerusakan Fasilitas Peribadatan Terdampak di Kota Yogyakarta

No	Kemantren	Fasilitas Peribadatan											
		Masjid			Mushola			Gereja			Pura		
		RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR
1	Tegalrejo	2	1	14	0	1	14	0	0	2	0	0	0
2	Gondokusuman	2	2	19	0	1	12	1	0	5	0	0	1
3	Jetis	1	1	10	0	1	9	1	0	5	0	0	0
4	Danurejan	1	1	7	0	1	10	0	0	0	0	0	0
5	Gedongtengen	1	1	7	0	1	7	0	1	1	0	0	0
6	Ngampilan	1	0	6	0	1	8	0	0	1	0	0	0
7	Wirobrajan	1	1	9	0	1	9	0	1	1	0	0	0
8	Mantrijenron	2	1	14	0	1	11	0	1	1	0	0	0
9	Kraton	1	0	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0
10	Gondomanan	1	1	7	0	1	7	0	0	2	0	0	0
11	Pakualaman	1	0	4	0	1	7	0	0	0	0	0	0
12	Mergangsang	2	1	12	0	1	12	0	0	2	0	0	0
13	Umbulharjo	7	6	70	2	4	46	0	0	2	0	0	1
14	Kotagede	3	3	32	1	2	25	0	0	1	0	0	0
Total		25	18	214	7	15	182	2	3	22	0	0	2

Sumber : BPS Kota Yogyakarta, Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel 2.14 menunjukkan jumlah dan tingkat kerusakan fasilitas peribadatan di Kota Yogyakarta. Hasil menunjukkan bahwa total 489 fasilitas peribadatan mengalami kerusakan. Bangunan masjid dengan total kerusakan 257 bangunan yaitu 214 bangunan rusak ringan, 18 bangunan rusak sedang dan 25 bangunan rusak berat. Mushola dengan total kerusakan bangunan akibat bencana sejumlah 204, yaitu 182 bangunan rusak ringan, 15 bangunan rusak sedang dan 7 bangunan rusak ringan.

Fasilitas peribadatan lainnya seperti gereja juga mengalami kerusakan dengan total 27 kerusakan, yaitu 22 bangunan rusak ringan, 3 bangunan rusak sedang dan 2 rusak berat. Pura dengan total kerusakan 2 bangunan rusak ringan terdapat di dua Kemantren yaitu Kemantren Umbulharjo dan Kemantren Gondokusuman.

C. Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi mengalami dampak akibat gempa bumi di Kota Yogyakarta. Aspek ekonomi berhubungan dengan perdagangan, jasa, pariwisata, retail, industri transportasi,

pertanian, perkebunan, perikanan, dan hilangnya mata pencaharian masyarakat. Kegiatan ekonomi terganggu dengan asumsi tidak dapat beroperasi/ lumpuh pada dua Kemantren yaitu Kotagede dan Umbulharjo. Berikut ini tabel dampak aspek ekonomi bencana gempa bumi Kota Yogyakarta.

Tabel 2. 15 Dampak Aspek Ekonomi Bencana Gempa Bumi Kota Yogyakarta

Sektor	Deskripsi
Ekonomi Produktif	a. Unit informal terdampak : 776 Unit, Unit informal terdampak 1.680 unit. b. Pekerja UKM Formal : 27.150 jiwa, Informal: 20.160 jiwa.
Perdagangan	Pasar terdampak gempa bumi di Kota Yogyakarta dengan kerusakan tinggi antara lain Pasar Legi Kotagede, Pasar Giwangan.
Pariwisata	a. Fasilitas pada 65 tempat wisata di 9 Kemantren rusak. b. Hotel terdampak sejumlah 340 unit dengan jumlah kamar 17.066 ruangan yang dapat menampung kurang lebih 5.000 pengunjung per hari tidak dapat beroperasi. Potensi kerugian mencapai 22 Miliar. c. Kunjungan wisatawan mengalami penurunan secara drastis.
Pertanian dan Perkebunan	Gempa bumi berdampak pada sektor pertanian dan perkebunan. Gempa bumi mengakibatkan kerusakan pada tanaman pertanian dan perkebunan, sehingga menjadi gagal panen. Gempa bumi juga menghambat distribusi hasil pertanian. Hal tersebut berakibat pada petani yang mengalami dampak penurunan penghasilan atau tidak mendapatkan penghasilan. Gempa bumi di Kota Yogyakarta berdampak pada 206 pertanian dan perkebunan.
Peternakan	Gempa bumi mengakibatkan dampak pada ternak hilang atau mati. Gempa bumi di Kota Yogyakarta berdampak pada 16 peternakan.

D. Aspek Lingkungan

Bencana gempa bumi mengakibatkan dampak pada lingkungan yaitu rusaknya kondisi air, tanah/lahan, dan udara. Berikut ini asumsi dampak pada aspek lingkungan.

Tabel 2. 16 Dampak Aspek Lingkungan Bencana Gempa Bumi Kota Yogyakarta

Jenis	Deskripsi
Air	a. Berkurangnya ketersediaan air bersih. b. Pencemaran air permukaan dan air tanah yang diakibatkan oleh kerusakan saluran air, septic tank, tangki penimbunan bahan kimia. c. Kerusakan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). d. Terganggunya kualitas dan kuantitas air bersih.
Udara	Penurunan kualitas udara, peningkatan debu, asap, udara tercemar khususnya pada kemantren yang memiliki potensi kerusakan sedang hingga berat yaitu Kemantren Kotagede dan Umbulharjo.
Tanah/Lahan	Kerusakan lahan yang mengakibatkan lahan tidak berfungsi dan memerlukan upaya pemulihan.

E. Aspek Layanan Publik

Bencana gempa bumi mengakibatkan akses masyarakat ke lokasi layanan publik terganggu dan pelayanan masyarakat tidak dapat dilaksanakan selama 14 hari sampai dengan 1 bulan. Beberapa perangkat kelurahan dan aparatur Kemantren mengalami gangguan psikososial, luka, sehingga pelayanan kegiatan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan 14 hari.

Bangunan layanan publik seperti kantor Kelurahan, Puskesmas, Sekolah mengalami kerusakan fisik. Jaringan telekomunikasi, air, listrik juga mengalami gangguan. Perbaikan layanan publik memerlukan waktu selama 14 hari dalam perbaikan layanan publik yang mengalami kerusakan berupa:

1. Pelayanan data catatan sipil dan kependudukan terganggu.
2. Fasilitas dan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, klinik, dan rumah sakit tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.
3. Fasilitas dan pelayanan pendidikan tidak dapat dilaksanakan karena kerusakan bangunan dan sarana prasarana.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Tujuan

Tujuan Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana gempa bumi Kota Yogyakarta merencanakan dan melaksanakan kegiatan atau operasi penanganan darurat bencana pada Kemantren Umbulharjo, Kemantren Gondokusuman, Kemantren Kotagede, Kemantren Mantrijeron, Kemantren Mergangsan, kemantren Jetis, Kemantren Tegalrejo, Kemantren Wirobrajan, Kemantren Gondomanan, Kemantren Gedongtengen, Kemantren Kraton, Kemantren Danurejan, Kemantren Ngampilan dan Kemantren Pakualaman.

Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana Gempa bumi Kota Yogyakarta melaksanakan penanganan kedaruratan bencana sejak penetapan status darurat bencana Tanggap Darurat selama 14 hari atau status darurat bencana Transisi Darurat ke Pemulihan 90 hari atau dapat lebih singkat atau diperpanjang sesuai dengan kondisi yang ada, dengan prinsip prioritas, koordinatif, berdaya guna, berhasil guna, transparansi, akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, non diskriminatif, nonproletisi, cepat, tepat, dan terpadu dalam penyelamatan, perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, pemulihan sarana dan prasarana vital, pengendalian situasi darurat, serta mengedepankan asas kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keselarasan, keserasian, ketertiban dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

3.2 Sasaran

Sasaran pelaksanaan tugas dari organisasi komando penanganan darurat pada bencana gempa bumi di Kota Yogyakarta meliputi:

1. Tersusunnya rencana operasi penanganan darurat bencana dalam waktu 72 jam.
2. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak dengan setidaknya 80% sumber daya dan anggarannya bersumber dari dana alokasi khusus APBD dan dana kedaruratan BPBD Kota Yogyakarta.
3. Terselenggaranya koordinasi yang melibatkan 100% koordinasi yang melibatkan semua stakeholder dan 14 kemantren terdampak dalam penanganan darurat bencana.
4. Tersedianya 90% sumber daya dari seluruh pihak terkait yang telah berkomitmen dalam operasi penanganan darurat bencana.

5. Tersedianya 100% data update penanggulangan bencana dalam satu data pada seluruh pihak yang bekerjasama dalam penanganan darurat bencana.
6. Terlaksananya 100% proses penyelamatan dan evakuasi pada warga terdampak secara menyeluruh di area terdampak.
7. Terselenggaranya 100% pelayanan kesehatan untuk warga terdampak atau penyintas kejadian bencana gempa bumi.
8. Terselenggaranya 100% pelayanan dalam proses pemulasaraan korban meninggal dunia.
9. Terselenggaranya 70% pemulihan fungsi sementara (rehabilitasi) sarana prasarana vital yang terdampak meliputi jaringan listrik, jaringan komunikasi.
10. Terlaksananya 14 hari tanggap darurat bencana dengan komitmen dan tanggung jawab penuh.
11. Terlaksananya 70% pengkajian kebutuhan pasca bencana sebagai kebutuhan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

BAB IV

PELAKSANAAN

4.1 Konsep Operasi

Konsep operasi penanganan darurat bencana gempa bumi Kota Yogyakarta meliputi 2 (dua) fase/status kedaruratan, yaitu Status Tanggap Darurat dan Status Transisi Darurat ke Pemulihan dengan kerangka kerja penanganan kedaruratan sebagai berikut.

4.1.1 Status Tanggap Darurat

Status tanggap darurat merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan segera saat bencana terjadi, meliputi kaji cepat, layanan pengungsian dan perlindungan untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan bencana. Kerangka kerja penanganan darurat yang dilaksanakan dalam fase ini adalah:

1. Pengkajian secara cepat terhadap kejadian dan dampak bencana.
2. Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana.
3. Pengaktifan organisasi penanganan darurat bencana
4. Pengaktifan Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB).
5. Penyusunan Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana
6. Operasi pencarian, penyelamatan, pertolongan, dan evakuasi masyarakat terdampak bencana.
7. Penyusunan dan pengelolaan data penanganan kedaruratan bencana, penyediaan data terpilah gender dan kelompok rentan.
8. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak bencana
9. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana, penyelenggaraan rumah sakit darurat, dan pelayanan pendidikan dalam situasi darurat.
10. Pengelolaan barak pengungsian meliputi pengkoordinasian dan pengelolaan tempat, sarana dan prasarana serta logistik untuk pengungsi
11. Perlindungan dan penyediaan layanan yang aksesibel untuk kelompok rentan, termasuk perlindungan anak dan pencegahan kekerasan berbasis gender.
12. Penyelenggaraan dapur umum dan distribusi kebutuhan dasar pangan bagi para penyintas.

13. Penyelenggaraan dan penyediaan layanan air bersih, sanitasi, dan penyehatan lingkungan (*water, sanitation and hygiene/WASH*) .
14. Penyediaan kebutuhan spesifik kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas.
15. Penyelenggaraan layanan psikososial dasar (*psychological first aid*).
16. Pemulihan fungsi sarana prasarana vital (air, listrik, transportasi, telekomunikasi, bahan bakar, jalan, jembatan) dengan segera.
17. Pelaporan pelaksanaan penanganan darurat termasuk pengelolaan anggaran.
18. Penentuan status kedaruratan: perpanjangan Status Tanggap Darurat atau pengakhiran Fase Tanggap Darurat menjadi Fase Transisi Darurat ke Pemulihan.

4.1.2 Status Transisi Darurat ke Pemulihan

Status transisi darurat ke pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan masyarakat masih tetap berlangsung. Kerangka kerja yang dilaksanakan dalam fase status darurat ke pemulihan adalah:

1. Pengkajian atas laporan penanganan atau operasi tanggap darurat bencana
2. Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan
3. Penyusunan Rencana Operasi Transisi Darurat ke Pemulihan.
4. Pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak bencana.
5. Koordinasi dan tata kelola tempat, sarana dan prasarana dan logistik untuk pengungsi.
6. Pelayanan dan perlindungan terhadap kelompok rentan.
7. Pengelolaan barak pengungsian.
8. Pengelolaan dapur umum dan distribusi kebutuhan dasar bagi para penyintas.
9. Penyediaan kebutuhan khusus untuk kelompok rentan.
10. Pemulihan psikososial dasar (*psychological first aid*).
11. Pencarian korban bencana lanjutan.
12. Perbaikan sarana prasarana umum dan vital air, listrik, transportasi, telekomunikasi, bahan bakar).
13. Pengurangan sumber daya penanganan darurat.
14. Pelaporan pelaksanaan penanganan darurat termasuk pengelolaan anggaran

15. Penentuan perpanjangan atau penghentian status transisi darurat berdasarkan pengamatan perkembangan operasi penanggulangan darurat bencana dan ancaman bencana.

4.2 Struktur Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana

4.2.1 Fungsi

Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk/mengaktifkan sistem komando penanganan darurat bencana (SKPDB) Kota Yogyakarta untuk mencapai tujuan dan sasaran penanganan kedaruratan bencana gempa bumi. SKPDB Kota Yogyakarta memiliki dan mengampu 6 (enam) fungsi yang terbagi dalam bidang-bidang spesifik untuk memastikan efektivitas dan keterpaduan pengelolaan/operasi penanganan darurat, yaitu:

1. Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi
2. Pengungsian dan Perlindungan
3. Logistik
4. Kesehatan
5. Pendidikan
6. Pemulihan

Masing-masing fungsi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi (Posko)

Pengelolaan seluruh aspek penanganan kedaruratan bencana dengan tindakan pokok antara lain; menetapkan tindakan strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi; melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah Kota Yogyakarta.

2. Pengungsian dan Perlindungan

Bidang Pengungsian dan Perlindungan memiliki peran penting dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat terdampak bencana. Fokus utama bidang ini adalah menyediakan fasilitas, layanan, dan perlindungan yang memadai bagi pengungsi, sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan peraturan perundang-undangan terkait. Bidang Pengungsian dan Perlindungan merupakan salah satu ujung tombak yang langsung berinteraksi dengan masyarakat

terdampak, sehingga perannya sangat krusial dalam memastikan keberhasilan respons darurat bencana gempa bumi Kota Yogyakarta yang sangat membutuhkan pengelolaan yang profesional dan terpadu di bidang ini.

3. Logistik

Pengelolaan sumber daya untuk penanganan darurat bencana, dengan tindakan pokok antara lain; memastikan logistik (bantuan sembako, peralatan, sarana transportasi dan komunikasi, fasilitas dan perbekalan kesehatan) yang dibutuhkan oleh petugas untuk kelancaran operasi tanggap bencana, sesuai kebutuhan; penyediaan fasilitas, pelayanan, material dan peralatan untuk tanggap darurat: menerima, menyimpan, mendistribusikan dan mengangkut bantuan dan peralatan logistik; mendukung dapur umum, air bersih dan sanitasi; melaksanakan koordinasi semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/organisasi yang berwenang.

4. Kesehatan

Bidang Kesehatan berperan sentral dalam memastikan layanan kesehatan yang efektif dan efisien bagi korban bencana dan masyarakat terdampak. Tugas utama bidang ini adalah menjaga kesehatan fisik dan mental, mencegah penyebaran penyakit, dan memberikan layanan medis darurat di area terdampak bencana gempa bumi Kota Yogyakarta.

5. Pendidikan

Bidang Pendidikan memiliki peran penting untuk memastikan kelangsungan proses belajar-mengajar serta memulihkan akses pendidikan bagi anak-anak terdampak bencana. Bidang ini bertujuan untuk meminimalkan gangguan pada pendidikan, memberikan dukungan psikososial kepada siswa, dan menciptakan lingkungan belajar yang aman di tengah situasi darurat. Sektor pendidikan di Kota Yogyakarta membutuhkan kesiapsiagaan yang tinggi. Bidang Pendidikan dalam SKPDB berfungsi tidak hanya untuk melanjutkan pendidikan di tengah krisis, tetapi juga untuk membangun ketahanan komunitas melalui pembelajaran yang berkelanjutan dan berbasis mitigasi bencana.

6. Pemulihan

Bidang Pemulihan berperan penting dalam mengembalikan kehidupan masyarakat terdampak bencana ke kondisi yang lebih stabil, baik secara fisik, sosial, ekonomi, maupun psikologis. Fokus utamanya adalah memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan secara sistematis, efektif, dan berkelanjutan. Bidang Pemulihan dalam SKPDB Kota Yogyakarta memainkan peranan kunci dalam membantu masyarakat bangkit kembali. Keberhasilan pemulihan tidak hanya

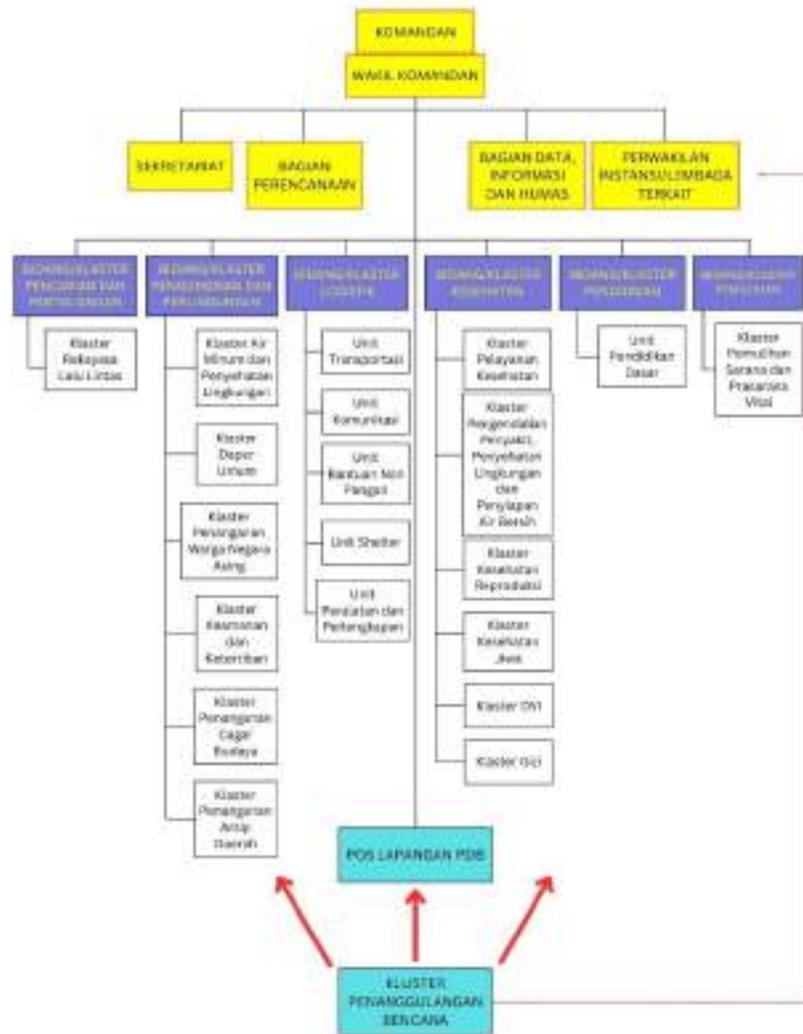
bergantung pada rekonstruksi fisik tetapi juga pada pemulihan sosial-ekonomi dan kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana di masa depan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan mitra pembangunan sangat penting untuk keberlanjutan program pemulihan ini.

4.2.2 Struktur Organisasi Pelaksana PDB

a. Struktur Organisasi Pelaksana Penanganan Tanggap Darurat

Organisasi Komando PDB Kota Yogyakarta bertanggung jawab dalam penanganan darurat bencana gempa bumi pada Status/Fase Tanggap Darurat di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

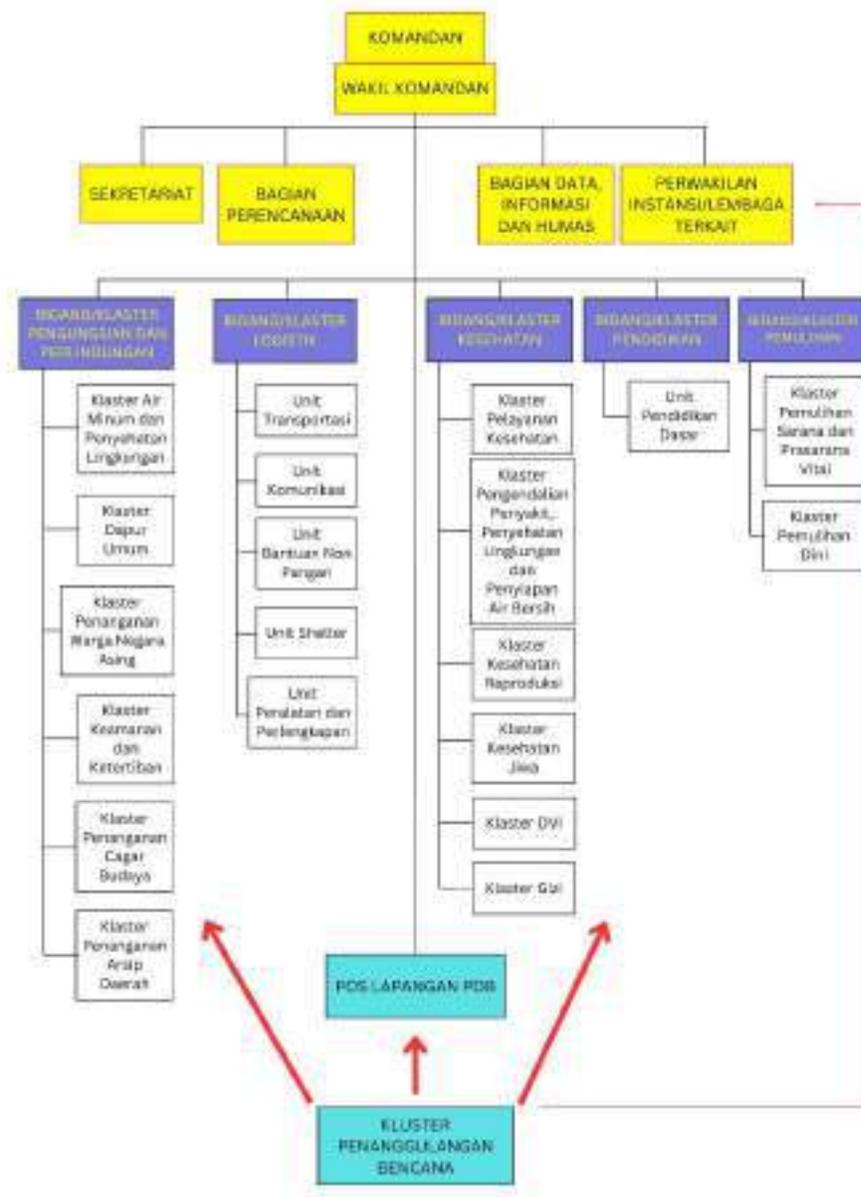
Gambar 4. 1 Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Kota Yogyakarta



b. Struktur Organisasi Pelaksana Penanganan Transisi Darurat ke Pemulihan

Organisasi Komando PDB Kota Yogyakarta bertanggung jawab dalam penanganan darurat bencana gempa bumi pada Status/Fase Transisi Darurat ke Pemulihan di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Pelaksana Penanganan Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi Kota Yogyakarta



4.3 Kegiatan Pokok

4.3.1 Kegiatan Pokok Pelaksana Penanganan Tanggap Darurat

1. Bidang Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi

a) Komandan Penanganan Darurat Bencana

Tugas pokok komandan penanganan darurat bencana adalah memimpin pelaksanaan penanganan kedaruratan bencana. Kegiatan pokok komandan penanggulangan darurat bencana yaitu:

- 1) Memimpin dan bertanggungjawab terhadap keseluruhan operasi penanganan darurat bencana gempa bumi.
- 2) Membuat rancangan yang strategis, efektif, dan efisien dalam pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian operasi tanggap darurat bencana gempa bumi.
- 3) Mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando (Posko) Pendamping Penanganan Kedaruratan Bencana Kota Yogyakarta, sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkatan bencana gempa bumi.
- 4) Memastikan aktivasi Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dan Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana di Kota Yogyakarta.
- 5) Menyusun rencana operasi darurat termasuk rencana operasi harian yang terpadu berdasarkan tujuan dan prioritas yang telah ditentukan atau disepakati.
- 6) Melaksanakan kebijakan dan strategi penanggulangan kedaruratan bencana gempa bumi.
- 7) Melaksanakan fungsi kendali koordinasi multi sektor yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana gempa bumi.
- 8) Melaksanakan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistic.
- 9) Melakukan evaluasi kegiatan PDB dan memastikan kegiatan operasi PDB berjalan sesuai dengan tujuan sasaran yang telah ditentukan atau disepakati.
- 10) Komandan PDB bertanggung jawab langsung kepada Walikota Yogyakarta.
- 11) Mengadakan rapat persiapan operasi/apel siaga di pagi
- 12) Mengumpulkan data baru di siang hari berdasarkan hasil operasi di pagi hari
- 13) Mengadakan rapat evaluasi operasi di petang-sore hari untuk dan menyusun rencana operasi darurat untuk keesokan harinya.
- 14) Bertanggung jawab atas prosedur administratif selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

- 15) Mengeluarkan Surat Keputusan Komandan PDB meliputi susunan SKPDB yang mencantumkan nama personal.

b) Wakil Komandan

Wakil Komandan memiliki tugas pokok yaitu membantu komandan PDB dalam proses penanganan darurat bencana. Kegiatan pokok wakil komandan yaitu:

- 1) Membantu komandan tanggap darurat bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan menganalisis komando tanggap darurat.
- 2) Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, humas, keselamatan, media center dan keamanan serta perwakilan instansi/lembaga.
- 3) Menjadi perwakilan Komandan PDB dalam situasi dimana Komandan PDB berhalangan atau sedang dalam tugas lain.
- 4) Wakil komandan PDB bertanggung jawab kepada komandan PDB.

c) Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas pokok dalam penyelenggaraan administrasi dalam penanganan darurat bencana. Kegiatan sekretariat yaitu:

- 1) Menyelenggarakan administrasi umum pos komando sampai dengan pelaporan.
- 2) Menyediakan dan melaksanakan pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personal Satuan Komando Kota Yogyakarta.
- 3) Sekretariat bertanggung jawab penuh kepada komandan.

d) Perencanaan

Penyusunan rencana operasi penanganan darurat bencana gempa bumi Kota Yogyakarta dan rencana aksi harian dengan tindakan pokok antara lain;

- 1) Memastikan adanya proses pelaksanaan operasi yang terukur, terpadu dan terarah, berdasarkan ruang lingkup prioritas dan tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebagai dasar pertimbangan komandan darurat dalam menyusun rencana operasi dan perintah operasi harian.
- 2) Mengumpulkan, mengevaluasi, menganalisis data dan informasi terkait manajemen kedaruratan, dan menyiapkan dokumen rencana (tindakan) operasional penanganan darurat bencana.

e) Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat

Tugas pokok data, informasi dan hubungan masyarakat adalah melakukan pengelolaan informasi dan komunikasi dalam perkembangan penanganan darurat bencana. Kegiatan pokok hubungan masyarakat yaitu:

- 1) Mengelola data dan informasi operasi PDB yang masuk serta memastikan akurasi data, evaluasi data (filter & konfirmasi data) dan informasi bencana gempa bumi sebelum dibagikan ke masyarakat.
- 2) Membentuk jaringan informasi dan komunikasi, serta melaksanakan penyebaran informasi bencana gempa bumi pada media massa dan masyarakat yang lebih luas (publik).
- 3) Mengelola media center sebagai pusat informasi utama operasi PDB.
- 4) Mengelola pendaftaran relawan dan wartawan/jurnalis, agar mendapatkan tanda pengenal (*name tag/sticker*) untuk proses identifikasi akses menuju wilayah terdampak bencana gempa bumi.
- 5) Hubungan masyarakat bertanggung jawab kepada komandan PDB.

f) Perwakilan Lembaga

Perwakilan Lembaga/ instansi memiliki tugas pokok dalam koordinasi sumber daya yang berasal dari instansi/Lembaga. Kegiatan perwakilan Lembaga/instansi yaitu:

- 1) Membantu koordinasi bersama Komandan PDB untuk keperluan pengerahan sumber daya yang berasal dari Instansi/Lembaga
- 2) Bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan instansi/lembaga terkait.

2. Bidang Pencarian dan Pertolongan

a) Klaster Rekayasa Lalu Lintas

Tugas pokok klaster rekayasa lalu lintas adalah perencanaan dan penanganan rekayasa lalu lintas ketika terjadi bencana. Kegiatan pokok klaster rekayasa lalu lintas yaitu:

- 1) Menyusun rencana operasi rekayasa lalu lintas pada saat terjadi bencana gempa bumi.

- 2) Mendata lalu lintas pada lokasi-lokasi yang terdampak bencana gempa bumi.
- 3) Menyiapkan rekayasa lalu lintas pada lokasi terdampak bencana gempa bumi.
- 4) Memastikan lalu lintas dapat berjalan dengan baik pada saat terjadi bencana gempa bumi.

3. Bidang Pengungsian dan Perlindungan

a) Klaster Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Tugas pokok klaster air, sanitasi dan kebersihan adalah melaksanakan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar air minum dan kualitas kesehatan lingkungan dalam situasi darurat bencana. Kegiatan klaster air minum dan penyehatan lingkungan yaitu:

- 1) Menyusun rencana operasi unit air, sanitasi, dan kebersihan.
- 2) Menyediakan kebutuhan air bersih dan memastikan kualitas air bersih sesuai standar kesehatan masyarakat.
- 3) Menyediakan sarana sanitasi dasar dan memastikan standar kebersihan lingkungan dan kesehatan terpenuhi.
- 4) Mengelola dan mendistribusikan bantuan dalam bentuk sumber air beserta peralatannya.
- 5) Memastikan bantuan air minum yang dapat diminum langsung sesuai dengan standar kesehatan dan standar minimal bantuan.
- 6) Memastikan dan melaksanakan pelayanan kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan saluran air (drainase), pengelolaan limbah cair dan limbah padat, pengendalian vektor serta pembuangan tinja.

b) Klaster Dapur Umum

Tugas pokok klaster dapur umum adalah memastikan ketercukupan kebutuhan dapur umum selama proses penanganan darurat bencana. Kegiatan klaster dapur umum yaitu:

- 1) Menyusun rencana operasi unit dapur umum
- 2) Menyiapkan tim dapur umum yang terlatih
- 3) Mendata kebutuhan pangan dan memastikan kebutuhan logistik dapur umum terpenuhi.
- 4) Menyiapkan bahan dan lokasi dapur umum.

- 5) Menyiapkan sumber daya atau relawan untuk dapur umum.
- 6) Melakukan proses penyiapan kebutuhan pangan di dapur umum.
- 7) Menyediakan kebutuhan pangan bagi petugas PDB dan pengungsi.
- 8) Melakukan distribusi hasil dapur umum sesuai dengan hasil kebutuhan pangan petugas PDB dan pengungsi.
- 9) Memastikan kualitas pangan khususnya bagi kelompok rentan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan.
- 10) Memastikan penggunaan bahan-bahan pangan sesuai standar kesehatan dan kontrol terhadap massa pakai bahan-bahan makanan kemasan.

c) Klaster Penanganan Warga Asing

Tugas pokok klaster penanganan warga asing memastikan bahwa warga negara asing (WNA) yang terdampak atau berada di wilayah bencana gempa bumi mendapatkan perlindungan, bantuan, dan layanan sesuai dengan hukum internasional dan kebijakan lokal. Kegiatan klaster penanganan warga asing yaitu:

- 1) Mengidentifikasi warga asing terdampak bencana gempa bumi, termasuk status mereka (wisatawan, pelajar, pekerja, atau pengungsi), untuk memprioritaskan kebutuhan bantuan.
- 2) Menjamin keselamatan, akses bantuan, dan perlindungan bagi warga asing selama dan setelah bencana gempa bumi.
- 3) Berkoordinasi dengan kedutaan besar, konsulat, atau organisasi internasional untuk mengelola kebutuhan dan informasi terkait warga asing.
- 4) Memberikan informasi yang akurat kepada warga asing tentang situasi bencana gempa bumi, lokasi aman, dan prosedur evakuasi.
- 5) Membantu proses pemulangan warga asing yang terdampak bencana gempa bumi ke negara asal mereka jika diperlukan.
- 6) Memastikan bahwa respons terhadap bencana di Kota Yogyakarta melibatkan semua pihak tanpa terkecuali, selaras dengan standar kemanusiaan global.

d) Klaster Keamanan dan Ketertiban

Tugas pokok klaster keamanan dan ketertiban adalah memastikan dan mengamankan wilayah penanganan darurat bencana gempa bumi. Kegiatan klaster keamanan dan ketertiban yaitu:

- 1) Menyusun rencana operasi keamanan dan ketertiban.
- 2) Memastikan keselamatan dan keamanan seluruh personel SKPDB dalam melaksanakan tugas penanganan darurat bencana gempa bumi.
- 3) Melaksanakan penjagaan keamanan penanganan kedaruratan bencana gempa bumi.
- 4) Melakukan penegakan hukum terhadap segala tindak kejahatan dalam situasi darurat bencana gempa bumi.
- 5) Melaksanakan pemantauan keberadaan petugas/militer/relawan asing.

e) Klaster Penanganan Cagar Budaya

Tugas pokok klaster penanganan cagar budaya adalah pendataan, penyelamatan dan penanganan benda cagar budaya yang rusak akibat bencana. Kegiatan pokok klaster penanganan cagar budaya yaitu:

- 1) Menyusun rencana operasi penanganan cagar budaya.
- 2) Mendata/menginventarisir benda cagar budaya yang ada di lokasi terdampak bencana.
- 3) Menyiapkan tenaga ahli dan tim perbaikan dan perawatan benda cagar budaya sesuai bidang keahliannya.
- 4) Meneliti dan Mengevaluasi kondisi benda cagar budaya yang terdampak bencana gempa bumi.
- 5) Menyiapkan lokasi evakuasi atau penyelamatan benda cagar budaya yang terdampak bekerjasama dengan pihak terkait.
- 6) Memastikan benda cagar budaya aman dari pencurian dan potensi kerusakan lainnya.

f) Klaster Penanganan Arsip Daerah

Tugas pokok klaster penanganan arsip daerah adalah pendataan, penyelamatan dan penanganan arsip daerah yang rusak akibat bencana. Kegiatan pokok klaster penanganan arsip daerah yaitu:

- 1) Menyusun rencana operasi penanganan arsip daerah.
- 2) Mendata/menginventarisir arsip daerah yang ada di lokasi terdampak bencana.
- 3) Menyiapkan tenaga ahli dan tim perbaikan dan perawatan arsip daerah sesuai bidang keahliannya.

- 4) Meneliti dan Mengevaluasi kondisi arsip daerah yang terdampak bencana gempa bumi.
- 5) Menyiapkan lokasi evakuasi atau penyelamatan arsip daerah yang terdampak bekerjasama dengan pihak terkait.
- 6) Memastikan arsip daerah aman dari pencurian dan potensi kerusakan lainnya.

4. Bidang Logistik

a) Unit Transportasi

Tugas pokok unit transportasi adalah memastikan ketersediaan sumber daya transportasi yang dibutuhkan dalam penanganan darurat bencana. Kegiatan unit transportasi antara lain adalah:

- 1) Inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan transportasi dalam penanganan darurat bencana gempa bumi.
- 2) Mengatur penggunaan alat transportasi bersama dengan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikannya.
- 3) Menyediakan dan mendistribusikan sarana transportasi untuk keperluan operasi PDB sesuai kebutuhan.
- 4) Mendukung kegiatan operasional PDB seperti pendistribusian logistik, distribusi sarana prasarana dan mobilisasi petugas serta korban bencana gempa bumi.
- 5) Memastikan bahan bakar kendaraan terisi dan siap digunakan saat darurat.
- 6) Memastikan rute, jalur aman dan lancar untuk kendaraan evakuasi.
- 7) Melakukan dokumentasi dalam setiap kegiatan transportasi selama proses penanganan darurat bencana gempa bumi.

b) Unit Komunikasi

Tugas pokok unit Komunikasi adalah memastikan ketersediaan sumber daya komunikasi (peralatan dan manusia) yang dibutuhkan dalam penanganan kedaruratan bencana. Kegiatan unit Komunikasi yaitu:

- 1) Inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan peralatan komunikasi (telepon, satelit, radio HT dll).
- 2) Memastikan keberfungsian sistem dan peralatan komunikasi.

- 3) Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan penyediaan dan pengaturan mekanisme komunikasi selama operasi penanganan darurat bencana gempa bumi.
- 4) Mendistribusikan peralatan komunikasi ke setiap bidang atau unit dan mendokumentasikannya.
- 5) Menyediakan pemenuhan peralatan komunikasi yang digunakan personel selama masa tanggap darurat.
- 6) Mengelola dan menerapkan jenis alat komunikasi yang digunakan saat operasi tanggap darurat.
- 7) Memastikan alur komunikasi antar bidang agar dapat dilaksanakan dengan baik.

c) Unit Bantuan Non Pangan

Tugas pokok unit bantuan non pangan adalah memastikan pengelolaan bantuan non pangan selama proses penanganan darurat bencana. Kegiatan unit bantuan non pangan yaitu:

- 1) Melakukan inventarisasi bantuan non pangan.
- 2) Memastikan kelayakan bantuan non pangan yang diterima sesuai standar bantuan kemanusiaan dan nilai-budaya lokal.
- 3) Mengumpulkan/menghimpun bantuan non pangan dan melakukan pencatatan bantuan yang diterima.
- 4) Memeriksa kondisi kelayakan bantuan non pangan di yang diterima dan memastikan kualitas pangan sesuai dengan standar kesehatan.
- 5) Melakukan dokumentasi setiap pendistribusian bantuan non pangan.
- 6) Menyediakan dan kebutuhan non pangan untuk pengungsi dan personel PDB sesuai dengan data kebutuhan dan data pilah.
- 7) Memastikan ketercukupan kebutuhan non pangan bagi pengungsi dan personal PDB.
- 8) Melakukan distribusi bantuan non pangan pada setiap bidang/unit.
- 9) Pengelolaan atas bantuan-bantuan yang diterima, pencatatan distribusi serta pelaporannya.

d) Unit Shelter

Tugas pokok unit shelter yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi pengungsi.

- 2) Melaksanakan penyelenggaraan manajemen shelter.
- 3) Memperlancar bantuan pangan, tempat hunian sementara, sandang, sanitasi, dan psikososial.

e) Unit Peralatan dan Perlengkapan

Tugas pokok unit Peralatan dan Perlengkapan yaitu:

- 1) Menyediakan peralatan dan perlengkapan untuk keperluan PDB sesuai kebutuhan.
- 2) Inventarisasi Peralatan dan Perlengkapan yang digunakan dan bertanggungjawab untuk mengembalikan sarana dan prasarana yang dipinjamkan untuk keperluan operasi PDB.
- 3) Mendistribusikan Peralatan dan Perlengkapan keperluan PDB pada setiap bidang/unit dan mendokumentasikannya.

5. Bidang Kesehatan

a) Klaster Pelayanan Kesehatan

Klaster pelayanan kesehatan dalam penanggulangan bencana di Kota Yogyakarta bertanggung jawab untuk memastikan tersedianya layanan kesehatan yang memadai bagi korban bencana, baik di lokasi terdampak maupun di tempat pengungsian. Klaster ini bertugas menyelenggarakan pelayanan Kesehatan perorangan terutama pelayanan pertolongan darurat pra fasilitas pelayanan kesehatan dan rujukan.

b) Klaster Pengendalian Penyakit, Penyehatan Lingkungan dan Penyediaan Air Bersih

Klaster Pengendalian Penyakit, Penyehatan Lingkungan, dan Penyediaan Air Bersih memiliki peran krusial dalam memastikan kesehatan masyarakat terjaga selama penanggulangan bencana di Kota Yogyakarta, khususnya dalam mencegah penyebaran penyakit menular dan memastikan ketersediaan fasilitas sanitasi serta air bersih. Klaster ini bertugas melakukan pengendalian penyakit dan upaya kesehatan lingkungan.

c) Klaster Kesehatan Reproduksi

Klaster Kesehatan Reproduksi dalam penanggulangan bencana di Kota Yogyakarta bertugas untuk memastikan layanan kesehatan reproduksi tetap tersedia bagi kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, bayi baru lahir, remaja, dan

perempuan, serta untuk mencegah komplikasi reproduksi yang dapat timbul selama bencana. Klaster ini bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan reproduksi.

d) Klaster Kesehatan Jiwa

Klaster Kesehatan Jiwa dalam penanggulangan bencana di Kota Yogyakarta berperan penting dalam memberikan dukungan psikososial dan layanan kesehatan jiwa kepada korban terdampak bencana. Tujuan utamanya adalah mencegah dan menangani gangguan kesehatan jiwa akibat trauma, stres, dan tekanan psikologis yang sering terjadi dalam situasi darurat.

e) Klaster DVI

Klaster Disaster Victim Identification (DVI) dalam penanggulangan bencana di Kota Yogyakarta bertugas untuk mengidentifikasi korban bencana, baik yang terluka parah maupun meninggal dunia, agar dapat diketahui identitasnya dan diteruskan kepada keluarga korban. DVI berperan penting dalam memastikan proses identifikasi dilakukan dengan cepat, akurat, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

f) Klaster Gizi

Klaster Gizi dalam penanggulangan bencana di Kota Yogyakarta bertugas memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat terdampak bencana, khususnya kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, lansia, dan penyandang disabilitas. Tujuannya adalah mencegah malnutrisi, memperbaiki status gizi, dan mendukung pemulihan kesehatan melalui intervensi gizi yang tepat.

6. Bidang Pendidikan

a) Unit Pendidikan Dasar

Tugas pokok unit Pendidikan dasar adalah memastikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dalam situasi darurat bencana. Kegiatan unit Pendidikan dasar yaitu:

- 1) Menyusun rencana operasi unit Pendidikan dasar.
- 2) Mengeluarkan kebijakan bidang Pendidikan dasar.
- 3) Menyiapkan pendidik dan tenaga kependidikan.
- 4) Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung Pendidikan dasar situasi darurat.

- 5) Melaksanakan layanan dukungan psikososial dan pendidikan dasar situasi darurat.
- 6) Menyiapkan peta persebaran dan lokasi pelaksanaan pendidikan dasar situasi darurat.

7. Bidang Pemulihan

a) Klaster Pemulihan Saranan dan Prasarana Vital

Tugas posko klaster pemulihan sarana dan prasarana vital adalah memastikan kelangsungan fungsi infrastruktur dasar dan layanan publik yang mendukung kehidupan Masyarakat. Unit ini memastikan bahwa masyarakat dapat kembali mendapatkan akses ke kebutuhan dasar dan layanan penting yang menunjang pemulihan ekonomi serta kesejahteraan setelah bencana. Kegiatan pokok unit pemulihan sarana dan prasarana vital yaitu:

- 1) Menyusun daftar prioritas sarana dan prasarana yang membutuhkan perbaikan segera berdasarkan dampak dan urgensi penggunaannya oleh masyarakat.
- 2) Menyusun rencana pemulihan yang berfokus pada perbaikan cepat (*quick recovery*) dan jangka panjang untuk sarana dan prasarana vital.
- 3) Berkoordinasi dengan lembaga pemerintah, sektor swasta, dan lembaga donor untuk memastikan sumber daya (baik dana maupun tenaga kerja) tersedia dan dialokasikan secara efektif.
- 4) Melakukan perbaikan darurat atau sementara pada sarana dan prasarana vital yang rusak, sehingga layanan dasar dapat berfungsi kembali secepat mungkin.
- 5) Mengupayakan pemulihan sementara pada infrastruktur yang berdampak langsung pada penyelamatan nyawa, seperti pasokan air bersih, listrik, serta akses ke layanan kesehatan.
- 6) Menginisiasi rekonstruksi dan rehabilitasi infrastruktur yang lebih rusak berat dengan standar yang lebih baik, guna meningkatkan ketahanan terhadap bencana di masa mendatang.
- 7) Mengembangkan strategi untuk membangun kembali sarana dan prasarana dengan prinsip *build back better* (membangun kembali lebih baik) agar lebih tangguh terhadap risiko bencana.

- 8) Mengembalikan aksesibilitas transportasi yang terputus akibat bencana, seperti memperbaiki jalan, jembatan, dan sistem transportasi umum, sehingga arus barang dan orang bisa berjalan kembali.
- 9) Memastikan jalur distribusi bantuan logistik dan kebutuhan pokok ke daerah-daerah terdampak tetap terbuka.
- 10) Memulihkan jaringan listrik dan energi yang terputus agar masyarakat dan fasilitas vital dapat kembali beroperasi secara normal.
- 11) Memastikan jaringan telekomunikasi dipulihkan secepat mungkin, karena komunikasi yang efektif sangat penting selama masa transisi dan pemulihan.
- 12) Memastikan pasokan air bersih kembali berfungsi, terutama untuk daerah yang bergantung pada sistem pipa air atau sumber air terpusat.
- 13) Mengelola fasilitas sanitasi darurat dan memperbaiki infrastruktur sanitasi permanen yang rusak untuk mencegah masalah kesehatan.
- 14) Melakukan pemantauan terus-menerus terhadap progres pemulihan sarana dan prasarana, serta melaporkan perkembangan kepada pemerintah, organisasi terkait, dan masyarakat.
- 15) Menyusun laporan evaluasi untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan solusi yang diambil selama proses pemulihan.
- 16) Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pemulihan infrastruktur serta cara beradaptasi dengan kondisi sementara hingga layanan normal kembali.

4.3.2 Kegiatan Pokok Pelaksana Penanganan Transisi Darurat Ke Pemulihan

1. Bidang Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi

a) Komandan Penanganan Darurat Bencana

Tugas pokok komandan penanganan darurat bencana adalah memimpin pelaksanaan penanganan kedaruratan bencana. Kegiatan pokok komandan penanggulangan darurat bencana yaitu:

- 1) Memimpin dan bertanggungjawab terhadap keseluruhan operasi penanganan darurat bencana gempa bumi.

- 2) Membuat rancangan yang strategis, efektif, dan efisien dalam pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian operasi tanggap darurat bencana gempa bumi.
- 3) Mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando (Posko) Pendamping Penanganan Kedaruratan Bencana Kota Yogyakarta, sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkatan bencana gempa bumi.
- 4) Memastikan aktivasi Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dan Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana di Kota Yogyakarta.
- 5) Menyusun rencana operasi darurat termasuk rencana operasi harian yang terpadu berdasarkan tujuan dan prioritas yang telah ditentukan atau disepakati.
- 6) Melaksanakan kebijakan dan strategi penanggulangan kedaruratan bencana gempa bumi.
- 7) Melaksanakan fungsi kendali koordinasi multi sektor yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana gempa bumi.
- 8) Melaksanakan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistic.
- 9) Melakukan evaluasi kegiatan PDB dan memastikan kegiatan operasi PDB berjalan sesuai dengan tujuan sasaran yang telah ditentukan atau disepakati.
- 10) Komandan PDB bertanggung jawab langsung kepada Walikota Yogyakarta.
- 11) Mengadakan rapat persiapan operasi/apel siaga di pagi
- 12) Mengumpulkan data baru di siang hari berdasarkan hasil operasi di pagi hari
- 13) Mengadakan rapat evaluasi operasi di petang-sore hari untuk dan menyusun rencana operasi darurat untuk keesokan harinya.
- 14) Bertanggung jawab atas prosedur administratif selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- 15) Mengeluarkan Surat Keputusan Komandan PDB meliputi susunan SKPDB yang mencantumkan nama personal.

b) Wakil Komandan

Wakil Komandan memiliki tugas pokok yaitu membantu komandan PDB dalam proses penanganan darurat bencana. Kegiatan pokok wakil komandan yaitu:

- 1) Membantu komandan tanggap darurat bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan menganalisis komando tanggap darurat.
- 2) Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, humas, keselamatan, media center dan keamanan serta perwakilan instansi/lembaga.

- 3) Menjadi perwakilan Komandan PDB dalam situasi dimana Komandan PDB berhalangan atau sedang dalam tugas lain.
- 4) Wakil komandan PDB bertanggung jawab kepada komandan PDB.

c) Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas pokok dalam penyelenggaraan administrasi dalam penanganan darurat bencana. Kegiatan sekretariat yaitu:

- 1) Menyelenggarakan administrasi umum pos komando sampai dengan pelaporan.
- 2) Menyediakan dan melaksanakan pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personal Satuan Komando Kota Yogyakarta.
- 3) Sekretariat bertanggung jawab penuh kepada komandan.

d) Perencanaan

Penyusunan rencana operasi penanganan darurat bencana gempa bumi Kota Yogyakarta dan rencana aksi harian dengan tindakan pokok antara lain;

- 1) Memastikan adanya proses pelaksanaan operasi yang terukur, terpadu dan terarah, berdasarkan ruang lingkup prioritas dan tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebagai dasar pertimbangan komandan darurat dalam menyusun rencana operasi dan perintah operasi harian.
- 2) Mengumpulkan, mengevaluasi, menganalisis data dan informasi terkait manajemen kedaruratan, dan menyiapkan dokumen rencana (tindakan) operasional penanganan darurat bencana.

e) Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat

Tugas pokok data, informasi dan hubungan masyarakat adalah melakukan pengelolaan informasi dan komunikasi dalam perkembangan penanganan darurat bencana. Kegiatan pokok data, informasi dan hubungan masyarakat yaitu:

- 1) Mengelola data dan informasi operasi PDB yang masuk serta memastikan akurasi data, evaluasi data (filter & konfirmasi data) dan informasi bencana gempa bumi sebelum dibagikan ke masyarakat.
- 2) Membentuk jaringan informasi dan komunikasi, serta melaksanakan penyebaran informasi bencana gempa bumi pada media massa dan masyarakat yang lebih luas (publik).
- 3) Mengelola media center sebagai pusat informasi utama operasi PDB.

- 4) Mengelola pendaftaran relawan dan wartawan/jurnalis, agar mendapatkan tanda pengenal (*name tag/sticker*) untuk proses identifikasi akses menuju wilayah terdampak bencana gempa bumi.
- 5) Hubungan masyarakat bertanggung jawab kepada komandan PDB.

f) Perwakilan Lembaga

Perwakilan Lembaga/ instansi memiliki tugas pokok dalam koordinasi sumber daya yang berasal dari instansi/Lembaga. Kegiatan perwakilan Lembaga/instansi yaitu:

- 1) Membantu koordinasi bersama Komandan PDB untuk keperluan pengerahan sumber daya yang berasal dari Instansi/Lembaga
- 2) Bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan instansi/lembaga terkait.

2. Bidang Pengungsian dan Perlindungan

a) Klaster Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Tugas pokok klaster air, sanitasi dan kebersihan adalah melaksanakan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar air minum dan kualitas kesehatan lingkungan dalam situasi darurat bencana. Kegiatan klaster air minum dan penyehatan lingkungan yaitu:

- 1) Menyusun rencana operasi unit air, sanitasi, dan kebersihan.
- 2) Menyediakan kebutuhan air bersih dan memastikan kualitas air bersih sesuai standar kesehatan masyarakat.
- 3) Menyediakan sarana sanitasi dasar dan memastikan standar kebersihan lingkungan dan kesehatan terpenuhi.
- 4) Mengelola dan mendistribusikan bantuan dalam bentuk sumber air beserta peralatannya.
- 5) Memastikan bantuan air minum yang dapat diminum langsung sesuai dengan standar kesehatan dan standar minimal bantuan.
- 6) Memastikan dan melaksanakan pelayanan kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan saluran air (drainase), pengelolaan limbah cair dan limbah padat, pengendalian vektor serta pembuangan tinja.

b) Klaster Dapur Umum

Tugas pokok klaster dapur umum adalah memastikan kecukupan kebutuhan dapur umum selama proses penanganan darurat bencana. Kegiatan klaster dapur umum yaitu:

- 1) Menyusun rencana operasi unit dapur umum
- 2) Menyiapkan tim dapur umum yang terlatih
- 3) Mendata kebutuhan pangan dan memastikan kebutuhan logistik dapur umum terpenuhi.
- 4) Menyiapkan bahan dan lokasi dapur umum.
- 5) Menyiapkan sumber daya atau relawan untuk dapur umum.
- 6) Melakukan proses penyiapan kebutuhan pangan di dapur umum.
- 7) Menyediakan kebutuhan pangan bagi petugas PDB dan pengungsi.
- 8) Melakukan distribusi hasil dapur umum sesuai dengan hasil kebutuhan pangan petugas PDB dan pengungsi.
- 9) Memastikan kualitas pangan khususnya bagi kelompok rentan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan.
- 10) Memastikan penggunaan bahan-bahan pangan sesuai standar kesehatan dan kontrol terhadap masa pakai bahan-bahan makanan kemasan.

c) Klaster Penanganan Warga Asing

Tugas pokok klaster penanganan warga asing memastikan bahwa warga negara asing (WNA) yang terdampak atau berada di wilayah bencana gempa bumi mendapatkan perlindungan, bantuan, dan layanan sesuai dengan hukum internasional dan kebijakan lokal. Kegiatan klaster penanganan warga asing yaitu:

- 1) Mengidentifikasi warga asing terdampak bencana gempa bumi, termasuk status mereka (wisatawan, pelajar, pekerja, atau pengungsi), untuk memprioritaskan kebutuhan bantuan.
- 2) Menjamin keselamatan, akses bantuan, dan perlindungan bagi warga asing selama dan setelah bencana gempa bumi.
- 3) Berkoordinasi dengan kedutaan besar, konsulat, atau organisasi internasional untuk mengelola kebutuhan dan informasi terkait warga asing.

- 4) Memberikan informasi yang akurat kepada warga asing tentang situasi bencana gempa bumi, lokasi aman, dan prosedur evakuasi.
- 5) Membantu proses pemulangan warga asing yang terdampak bencana gempa bumi ke negara asal mereka jika diperlukan.
- 6) Memastikan bahwa respons terhadap bencana di Kota Yogyakarta melibatkan semua pihak tanpa terkecuali, selaras dengan standar kemanusiaan global.

d) Klaster Keamanan dan Ketertiban

Tugas pokok klaster keamanan dan ketertiban adalah memastikan dan mengamankan wilayah penanganan darurat bencana gempa bumi. Kegiatan klaster keamanan dan ketertiban yaitu:

- 1) Menyusun rencana operasi keamanan dan ketertiban.
- 2) Memastikan keselamatan dan keamanan seluruh personel SKPDB dalam melaksanakan tugas penanganan darurat bencana gempa bumi.
- 3) Melaksanakan penjagaan keamanan penanganan kedaruratan bencana gempa bumi.
- 4) Melakukan penegakan hukum terhadap segala tindak kejahatan dalam situasi darurat bencana gempa bumi.
- 5) Melaksanakan pemantauan keberadaan petugas/militer/relawan asing.

e) Klaster Penanganan Cagar Budaya

Tugas pokok klaster penanganan cagar budaya adalah pendataan, penyelamatan dan penanganan benda cagar budaya yang rusak akibat bencana. Kegiatan pokok klaster penanganan cagar budaya yaitu:

- 1) Menyusun rencana operasi penanganan cagar budaya.
- 2) Mendata/menginventarisir benda cagar budaya yang ada di lokasi terdampak bencana.
- 3) Menyiapkan tenaga ahli dan tim perbaikan dan perawatan benda cagar budaya sesuai bidang keahliannya.
- 4) Meneliti dan Mengevaluasi kondisi benda cagar budaya yang terdampak bencana gempa bumi.
- 5) Menyiapkan lokasi evakuasi atau penyelamatan benda cagar budaya yang terdampak bekerjasama dengan pihak terkait.

- 6) Memastikan benda cagar budaya aman dari pencurian dan potensi kerusakan lainnya.

f) Klaster Penanganan Arsip Daerah

Tugas pokok klaster penanganan arsip daerah adalah pendataan, penyelamatan dan penanganan arsip daerah yang rusak akibat bencana. Kegiatan pokok klaster penanganan arsip daerah yaitu:

- 1) Menyusun rencana operasi penanganan arsip daerah.
- 2) Mendata/menginventarisir arsip daerah yang ada di lokasi terdampak bencana.
- 3) Menyiapkan tenaga ahli dan tim perbaikan dan perawatan arsip daerah sesuai bidang keahliannya.
- 4) Meneliti dan Mengevaluasi kondisi arsip daerah yang terdampak bencana gempa bumi.
- 5) Menyiapkan lokasi evakuasi atau penyelamatan arsip daerah yang terdampak bekerjasama dengan pihak terkait.
- 6) Memastikan arsip daerah aman dari pencurian dan potensi kerusakan lainnya.

3. Bidang Logistik

a) Unit Transportasi

Tugas pokok unit transportasi adalah memastikan ketersediaan sumber daya transportasi yang dibutuhkan dalam penanganan darurat bencana. Kegiatan unit transportasi antara lain adalah:

- 1) Inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan transportasi dalam penanganan darurat bencana gempa bumi.
- 2) Mengatur penggunaan alat transportasi bersama dengan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikannya.
- 3) Menyediakan dan mendistribusikan sarana transportasi untuk keperluan operasi PDB sesuai kebutuhan.
- 4) Mendukung kegiatan operasional PDB seperti pendistribusian logistik, distribusi sarana prasarana dan mobilisasi petugas serta korban bencana gempa bumi.
- 5) Memastikan bahan bakar kendaraan terisi dan siap digunakan saat darurat.
- 6) Memastikan rute, jalur aman dan lancar untuk kendaraan evakuasi.

- 7) Melakukan dokumentasi dalam setiap kegiatan transportasi selama proses penanganan darurat bencana gempa bumi.

b) Unit Komunikasi

Tugas pokok unit Komunikasi adalah memastikan ketersediaan sumber daya komunikasi (peralatan dan manusia) yang dibutuhkan dalam penanganan kedaruratan bencana. Kegiatan unit Komunikasi yaitu:

- 1) Inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan peralatan komunikasi (telepon, satelit, radio HT dll).
- 2) Memastikan keberfungsian sistem dan peralatan komunikasi.
- 3) Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan penyediaan dan pengaturan mekanisme komunikasi selama operasi penanganan darurat bencana gempa bumi.
- 4) Mendistribusikan peralatan komunikasi ke setiap bidang atau unit dan mendokumentasikannya.
- 5) Menyediakan pemenuhan peralatan komunikasi yang digunakan personel selama masa tanggap darurat.
- 6) Mengelola dan menerapkan jenis alat komunikasi yang digunakan saat operasi tanggap darurat.
- 7) Memastikan alur komunikasi antar bidang agar dapat dilaksanakan dengan baik.

c) Unit Bantuan Non Pangan

Tugas pokok unit bantuan non pangan adalah memastikan pengelolaan bantuan non pangan selama proses penanganan darurat bencana. Kegiatan unit bantuan non pangan yaitu:

- 1) Melakukan inventarisasi bantuan non pangan.
- 2) Memastikan kelayakan bantuan non pangan yang diterima sesuai standar bantuan kemanusiaan dan nilai-budaya lokal.
- 3) Mengumpulkan/menghimpun bantuan non pangan dan melakukan pencatatan bantuan yang diterima.
- 4) Memeriksa kondisi kelayakan bantuan non pangan di yang diterima dan memastikan kualitas pangan sesuai dengan standar kesehatan.
- 5) Melakukan dokumentasi setiap pendistribusian bantuan non pangan.

- 6) Menyediakan dan kebutuhan non pangan untuk pengungsi dan personel PDB sesuai dengan data kebutuhan dan data pilah.
- 7) Memastikan ketercukupan kebutuhan non pangan bagi pengungsi dan personal PDB.
- 8) Melakukan distribusi bantuan non pangan pada setiap bidang/unit.
- 9) Pengelolaan atas bantuan-bantuan yang diterima, pencatatan distribusi serta pelaporannya.

d) Unit Shelter

Tugas pokok unit shelter yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi pengungsi.
- 2) Melaksanakan penyelenggaraan manajemen shelter.
- 3) Memperlancar bantuan pangan, tempat hunian sementara, sandang, sanitasi, dan psikososial.

e) Unit Peralatan dan Perlengkapan

Tugas pokok unit Peralatan dan Perlengkapan yaitu:

- 1) Menyediakan peralatan dan perlengkapan untuk keperluan PDB sesuai kebutuhan.
- 2) Inventarisasi Peralatan dan Perlengkapan yang digunakan dan bertanggungjawab untuk mengembalikan sarana dan prasarana yang dipinjamkan untuk keperluan operasi PDB.
- 3) Mendistribusikan Peralatan dan Perlengkapan keperluan PDB pada setiap bidang/unit dan mendokumentasikannya.

4. Bidang Kesehatan

a) Klaster Pelayanan Kesehatan

Klaster pelayanan kesehatan dalam penanggulangan bencana di Kota Yogyakarta bertanggung jawab untuk memastikan tersedianya layanan kesehatan yang memadai bagi korban bencana, baik di lokasi terdampak maupun di tempat pengungsian. Klaster ini bertugas menyelenggarakan pelayanan Kesehatan perorangan terutama pelayanan pertolongan darurat pra fasilitas pelayanan kesehatan dan rujukan.

b) Klaster Pengendalian Penyakit, Penyehatan Lingkungan dan Penyiapan Air Bersih

Klaster Pengendalian Penyakit, Penyehatan Lingkungan, dan Penyiapan Air Bersih memiliki peran krusial dalam memastikan kesehatan masyarakat terjaga selama penanggulangan bencana di Kota Yogyakarta, khususnya dalam mencegah penyebaran penyakit menular dan memastikan ketersediaan fasilitas sanitasi serta air bersih. Klaster ini bertugas melakukan pengendalian penyakit dan upaya kesehatan lingkungan.

c) Klaster Kesehatan Reproduksi

Klaster Kesehatan Reproduksi dalam penanggulangan bencana di Kota Yogyakarta bertugas untuk memastikan layanan kesehatan reproduksi tetap tersedia bagi kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, bayi baru lahir, remaja, dan perempuan, serta untuk mencegah komplikasi reproduksi yang dapat timbul selama bencana. Klaster ini bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan reproduksi.

d) Klaster Kesehatan Jiwa

Klaster Kesehatan Jiwa dalam penanggulangan bencana di Kota Yogyakarta berperan penting dalam memberikan dukungan psikososial dan layanan kesehatan jiwa kepada korban terdampak bencana. Tujuan utamanya adalah mencegah dan menangani gangguan kesehatan jiwa akibat trauma, stres, dan tekanan psikologis yang sering terjadi dalam situasi darurat.

e) Klaster DVI

Klaster Disaster Victim Identification (DVI) dalam penanggulangan bencana di Kota Yogyakarta bertugas untuk mengidentifikasi korban bencana, baik yang terluka parah maupun meninggal dunia, agar dapat diketahui identitasnya dan diteruskan kepada keluarga korban. DVI berperan penting dalam memastikan proses identifikasi dilakukan dengan cepat, akurat, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

f) Klaster Gizi

Klaster Gizi dalam penanggulangan bencana di Kota Yogyakarta bertugas memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat terdampak bencana, khususnya kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, lansia, dan penyandang disabilitas. Tujuannya adalah mencegah malnutrisi, memperbaiki status gizi, dan mendukung pemulihan kesehatan melalui intervensi gizi yang tepat.

5. Bidang Pendidikan

a) Unit Pendidikan Dasar

Tugas pokok unit Pendidikan dasar adalah memastikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dalam situasi darurat bencana. Kegiatan unit Pendidikan dasar yaitu:

- 1) Menyusun rencana operasi unit Pendidikan dasar.
- 2) Mengeluarkan kebijakan bidang Pendidikan dasar.
- 3) Menyiapkan pendidik dan tenaga kependidikan.
- 4) Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung Pendidikan dasar situasi darurat.
- 5) Melaksanakan layanan dukungan psikososial dan pendidikan dasar situasi darurat.
- 6) Menyiapkan peta persebaran dan lokasi pelaksanaan pendidikan dasar situasi darurat.

6. Bidang Pemulihan

a) Klaster Pemulihan Sarana dan Prasarana Vital

Tugas pokok unit pemulihan sarana dan prasarana vital adalah memastikan kelangsungan fungsi infrastruktur dasar dan layanan publik yang mendukung kehidupan Masyarakat. Unit ini memastikan bahwa masyarakat dapat kembali mendapatkan akses ke kebutuhan dasar dan layanan penting yang menunjang pemulihan ekonomi serta kesejahteraan setelah bencana. Kegiatan pokok unit pemulihan sarana dan prasarana vital yaitu:

- 1) Menyusun daftar prioritas sarana dan prasarana yang membutuhkan perbaikan segera berdasarkan dampak dan urgensi penggunaannya oleh masyarakat.
- 2) Menyusun rencana pemulihan yang berfokus pada perbaikan cepat (*quick recovery*) dan jangka panjang untuk sarana dan prasarana vital.
- 3) Berkoordinasi dengan lembaga pemerintah, sektor swasta, dan lembaga donor untuk memastikan sumber daya (baik dana maupun tenaga kerja) tersedia dan dialokasikan secara efektif.
- 4) Melakukan perbaikan darurat atau sementara pada sarana dan prasarana vital yang rusak, sehingga layanan dasar dapat berfungsi kembali secepat mungkin.

- 5) Mengupayakan pemulihan sementara pada infrastruktur yang berdampak langsung pada penyelamatan nyawa, seperti pasokan air bersih, listrik, serta akses ke layanan kesehatan.
- 6) Menginisiasi rekonstruksi dan rehabilitasi infrastruktur yang lebih rusak berat dengan standar yang lebih baik, guna meningkatkan ketahanan terhadap bencana di masa mendatang.
- 7) Mengembangkan strategi untuk membangun kembali sarana dan prasarana dengan prinsip *build back better* (membangun kembali lebih baik) agar lebih tangguh terhadap risiko bencana.
- 8) Mengembalikan aksesibilitas transportasi yang terputus akibat bencana, seperti memperbaiki jalan, jembatan, dan sistem transportasi umum, sehingga arus barang dan orang bisa berjalan kembali.
- 9) Memastikan jalur distribusi bantuan logistik dan kebutuhan pokok ke daerah-daerah terdampak tetap terbuka.
- 10) Memulihkan jaringan listrik dan energi yang terputus agar masyarakat dan fasilitas vital dapat kembali beroperasi secara normal.
- 11) Memastikan jaringan telekomunikasi dipulihkan secepat mungkin, karena komunikasi yang efektif sangat penting selama masa transisi dan pemulihan.
- 12) Memastikan pasokan air bersih kembali berfungsi, terutama untuk daerah yang bergantung pada sistem pipa air atau sumber air terpusat.
- 13) Mengelola fasilitas sanitasi darurat dan memperbaiki infrastruktur sanitasi permanen yang rusak untuk mencegah masalah kesehatan.
- 14) Melakukan pemantauan terus-menerus terhadap progres pemulihan sarana dan prasarana, serta melaporkan perkembangan kepada pemerintah, organisasi terkait, dan masyarakat.
- 15) Menyusun laporan evaluasi untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan solusi yang diambil selama proses pemulihan.
- 16) Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pemulihan infrastruktur serta cara beradaptasi dengan kondisi sementara hingga layanan normal kembali.

b) Klaster Pemulihan Dini

Tugas pokok unit pemulihan dini adalah mendukung pemulihan dan mencegah terjadinya krisis lanjutan. Kegiatan unit pemulihan dini yaitu:

- 1) Melakukan asesmen kerusakan, kerugian, dan kebutuhan masyarakat serta lingkungan.
- 2) Menyusun laporan situasi untuk mendukung perencanaan program pemulihan.
- 3) Merancang strategi dan rencana aksi pemulihan berdasarkan hasil asesmen.
- 4) Mengutamakan aspek inklusi sosial, keberlanjutan, dan pengurangan risiko bencana.
- 5) Mengkoordinasikan upaya pemulihan dengan pemerintah daerah, lembaga internasional, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah.
- 6) Memastikan sinergi antara berbagai program bantuan dan pemulihan.
- 7) Memberikan bantuan langsung kepada masyarakat untuk kebutuhan dasar seperti tempat tinggal sementara, kesehatan, dan pendidikan.
- 8) Membantu memulihkan mata pencaharian, seperti menyediakan alat dan modal usaha kecil.
- 9) Memperbaiki fasilitas umum yang rusak, seperti jalan, jembatan, sistem air bersih, dan fasilitas kesehatan.
- 10) Menjamin aksesibilitas dan keselamatan dari fasilitas yang dipulihkan.
- 11) Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat tentang mitigasi risiko bencana dan cara memulihkan diri.
- 12) Membangun kesadaran tentang pentingnya keberlanjutan dan pengurangan risiko di masa depan.
- 13) Memberikan layanan dukungan psikososial kepada korban bencana.
- 14) Membangun kembali komunitas melalui pendekatan partisipatif.
- 15) Memantau pelaksanaan program pemulihan untuk memastikan keberhasilan.
- 16) Melakukan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas di masa depan.
- 17) Memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan normal dengan memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan fisik secara holistik dan berkelanjutan.

BAB V

ADMINISTRASI DAN SUMBER DAYA

5.1 Administrasi

Mekanisme administrasi sumber daya pendamping dan pendukung darurat bencana gempa bumi di Kota Yogyakarta sebagai berikut :

1. Pada saat sudah ada penetapan status siaga darurat bencana Gempa Bumi, seluruh sumber daya lokal Pemerintah Kota Yogyakarta maupun wilayah Kemantren dioptimalkan baik dari sektor pemerintah, sektor usaha, lembaga sosial dan Lembaga keagamaan serta juga masyarakat (seperti APBD, membuka rekening donasi dari ASN, swasta, lembaga sosial dan masyarakat umum).
2. Penentuan status tanggap darurat bencana gempa bumi Kota Yogyakarta mengikuti kriteria sebagai berikut :
 - a. Informasi ancaman bencana yang terjadi
Adanya ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun/mereda eskalasinya berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang terkait perkembangan ancaman bencana dimaksud.
 - b. Informasi ancaman kehidupan dan penghidupan
Adanya rekomendasi dari instansi teknis yang menyatakan bahwa perkembangan ancaman bencana yang terjadi masih mengganggu kehidupan dan enghidupan sekelompok orang/Masyarakat serta masih memerlukan Tindakan penanganan segera dan memadai.
3. Jika sumber daya keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta tidak mencukupi dalam penanganan bencana, maka Pemerintah Kota Yogyakarta dapat meminta bantuan pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat memberikan instruksi pada pemerintah kabupaten/kota terdekat yang memiliki kapasitas untuk membantu penanganan darurat bencana di Pemerintah Kota Yogyakarta atau Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengajukan permohonan penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB dan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Pemerintah Kota Yogyakarta untuk penanganan darurat bencana di Pemerintah Kota Yogyakarta.

5. Pemerintah Kota Yogyakarta Bersama dengan wilayah Kemantren terpapar bencana gempa bumi, menanggung biaya operasional selama operasi penanggulangan kedaruratan bencana gempa bumi.
6. Pengiriman sumber daya oleh instansi lembaga atau organisasi harus dilakukan oleh personel instansi lembaga atau organisasi melalui mekanisme yang ditentukan.
7. Memastikan sumber daya yang dikirimkan oleh instansi lembaga atau organisasi sesuai dengan kebutuhan PDB. Jika sumber daya yang dikirimkan tidak memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan maka SKPDB Kota Yogyakarta memiliki kewenangan untuk mengembalikan sumber daya ke instansi lembaga atau organisasi, atau memberikan pendampingan untuk kebutuhan yang lain.
8. Pelaksanaan Operasi Penanganan Darurat Bencana gempa bumi menggunakan dana Belanja Tak Terduga (BTT) Kota Yogyakarta.
9. Apabila sumber daya keuangan tidak mencukupi, Pemerintah Kota Yogyakarta dapat mengajukan dukungan pendanaan dari BTT Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Siap Pakai (DSP) nasional.
10. Pelaksanaan Operasi Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Kota Yogyakarta juga dapat menggunakan dana bantuan/hibah dari berbagai lembaga seperti: pihak swasta (*private sector*), BUMN, BUMD, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Kemanusiaan, Perguruan Tinggi, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
11. Tata kelola transaksi dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada, dilengkapi dengan berita acara serah terima dan laporan pertanggungjawaban.
12. Jenis sumber keuangan penanganan darurat bencana gempa bumi di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 1 Sumber Keuangan Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi

No	Jenis	Sumber Keuangan Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi
1	APBN Kota	Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Yogyakarta
2	APBD Provinsi	Belanja Tidak Terduga Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Jenis	Sumber Keuangan Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi
3	APBN	Dana Siap Pakai BNPB
4	Lembaga Usaha	Donasi tidak mengikat
5	Masyarakat Sipil	Donasi tidak mengikat
6	Publik	Donasi tidak mengikat

13. Mekanisme Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

- 1) Penetapan SK Tanggap Darurat
- 2) Penetapan SK struktur komando penanggulangan darurat
- 3) Penetapan SK pengguna anggaran dan bendahara penerima
- 4) BPBD Kota Yogyakarta mengajukan surat permohonan dan rencana kebutuhan belanja kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku bendahara umum daerah
- 5) BPKAD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada BPBD Kota Yogyakarta, pencairan dana kebutuhan belanja paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak menerimanya rencana kebutuhan belanja.

14. Mekanisme pencairan Dana Siap Pakai (DSP) berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai sebagai berikut:

- a. Laporan ancaman atau kejadian bencana gempa bumi.
- b. Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana gempa bumi oleh Walikota.
- c. Mengajukan surat permohonan Bantuan Penanganan Darurat Bencana gempa bumi yang ditandatangani oleh Walikota ditujukan pada Kepala BNPB. Dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - 1) Keputusan Walikota tentang penetapan Status Keadaan Darurat Bencana.
 - 2) Rencana operasi.
 - 3) Rincian kebutuhan anggaran.

- 4) Pengkajian kebutuhan usulan kegiatan dari instansi/Lembaga teknis berwenang.
- 5) Laporan ancaman/ kejadian bencana.
- 6) Keputusan pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana oleh Kepala daerah.

5.2 Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Pengeralahan sumber daya manusia di Kota Yogyakarta dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pemetaan sumber daya manusia sesuai dengan kapasitas penanganan darurat bencana gempa bumi.
2. Melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan instansi Pemerintah Kota Yogyakarta terkait dengan pengeralahan sumber daya manusia dan relawan.
3. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerja-sama para pihak untuk mobilisasi sumber daya manusia dan peralatan.
4. Permintaan bantuan sumber daya manusia dan relawan ke Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pemanfaatan sumber daya lokal dalam penanganan darurat bencana gempa bumi.
6. Pembuatan mekanisme relawan (pendaftaran, mobilisasi, pelaporan).
7. Memastikan ketersediaan personel dan relawan dalam penanganan darurat bencana gempa bumi.
8. Pengelolaan personel dan relawan dengan efektif dan efisien.
9. Pelaksanaan tes dan peningkatan kapasitas bagi relawan.

b. Sumber Daya Peralatan dan Logistik

Pengeralahan sumber daya di Kota Yogyakarta dilaksanakan dengan pola sebagai berikut :

1. Pemetaan dan penyiapan *buffer stock* (persediaan/cadangan) kebutuhan dasar yang disiapkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mendukung operasi penanganan di tiap wilayah kemantren jika diperlukan.
2. Pemetaan dan penyiapan sumber daya peralatan dan logistik (persediaan/cadangan) yang disiapkan oleh BPBD Kota Yogyakarta untuk mendukung operasi penanganan di tiap wilayah kemantren jika diperlukan.
3. Melakukan komunikasi dan koordinasi ke instansi Pemerintah Kota Yogyakarta yang terkait.

4. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerjasama para pihak untuk mobilisasi dan pengadaan peralatan dan logistik yang mudah diakses bagi semua.
5. Permintaan bantuan ke provinsi terdekat (kebutuhan dasar, peralatan, logistik dan SDM).
6. Mendistribusikan bantuan peralatan dan logistik tepat sasaran dan tepat waktu.
7. Penyediaan barak pengungsian, tempat evakuasi, dapur umum, ruang publik disertai dengan kebutuhan energi yang mudah diakses bagi semua.
8. Memastikan penerimaan bantuan peralatan dan logistik serta relawan dalam satu pintu.
9. Menjaga alur penerimaan bantuan peralatan dan logistik serta relawan dengan membangun mekanisme pelaporan ke Posko.
10. Sistem pelaporan dan pencatatan di lapangan agar memisahkan antara relawan dan bantuan barang kemanusiaan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas laporan.
11. Memberikan laporan kegiatan kepada Komandan PDB Pemerintah Kota Yogyakarta.
12. Dalam hal bencana area kota, BPBD Kota Yogyakarta yang terkena wajib mengerahkan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sesuai kebutuhan ke lokasi bencana.
13. Jika kebutuhan sumber daya manusia, peralatan dan logistic dari wilayah Kemantren tidak memadai maka pemerintah Kota Yogyakarta akan memberikan dukungan wilayah Kemantren yang terdampak bencana.
14. Apabila Kota Yogyakarta tidak memiliki sumber daya manusia, peralatan dan logistik sesuai dengan kebutuhan di lokasi bencana. Maka pemerintah Kota Yogyakarta dapat meminta bantuan kepada Kota/Kabupaten terdekat, atau pada Pemerintah Provinsi DIY.
15. Biaya yang timbul akibat pengerahan bantuan ini ditanggung oleh pemerintah Kota Yogyakarta.
16. Pelaksanaan pengerahan sumber daya dari asal sampai dengan lokasi bencana dilaksanakan dibawah kendali Kepala BPBD Kota Yogyakarta.
17. Apabila terdapat keterbatasan sumber daya manusia, peralatan dan logistik yang dikerahkan oleh Kepala BPBD Kota Yogyakarta, maka BNPB dapat membantu melalui pola pendampingan.
18. Pola pendampingan oleh BNPB dapat berupa dukungan biaya pengepakan, biaya pengiriman, jasa tenaga pengangkutan dan dukungan peralatan tanggap darurat bencana.

BAB VI

PENGENDALIAN

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Walikota menetapkan Status Darurat bencana gempa bumi selama 14 hari berdasarkan rekomendasi BPBD Kota Yogyakarta. Lama masa tanggap darurat akan dilakukan evaluasi berdasarkan eskalasi kejadian bencana gempa bumi atau rekomendasi dari BPBD Kota Yogyakarta apabila diperlukan, masa tanggap darurat bencana gempa bumi dapat diperpanjang. Sejalan dengan ditetapkannya status tanggap darurat bencana, Walikota menetapkan seorang komandan tanggap darurat. Komandan Darurat akan diberikan Surat Keputusan dan kewenangan untuk melaksanakan penanganan darurat sesuai peraturan perundangan.

6.1 Instruksi Koordinasi

Instruksi koordinasi berisi arahan, perintah, mandat kepada komando penanganan darurat bencana yang diberikan oleh Otoritas dan Komandan Penanggulangan Darurat Bencana (PDB) agar Komandan dapat memberikan komando kepada seluruh sistem organisasi penanggulangan kedaruratan bencana di Kota Yogyakarta.

1. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi terkait dengan bahaya atau kejadian disertai dengan dampak bencana melalui pengkajian cepat. Kaji cepat dilakukan untuk menilai akibat langsung dari bencana. Pengkajian dilakukan dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Sumber data primer dilakukan dengan menugaskan dan mengerahkan Tim Reaksi Cepat dengan segera ke lokasi terdampak bencana untuk melakukan asesmen. Sumber data sekunder diperoleh dari pelaporan, media massa, instansi/lembaga terkait, masyarakat, internet, dan informasi lainnya yang relevan dan bertanggung jawab. Data primer dan sekunder yang dikumpulkan meliputi data:
 - Apa : Jenis bencana apa yang terjadi di wilayah.
 - Kapan : Hari, tanggal, bulan, tahun, jam, waktu kejadian.
 - Dimana : Tempat/lokasi bencana.
 - Penyebab : Penyebab terjadinya bencana.

- Berapa : Jumlah korban, kerusakan yang meliputi sarana dan prasarana, serta objek vital.
- Bagaimana : Upaya yang telah dilakukan.

Hasil analisis data kaji cepat kejadian bencana akan langsung dilaporkan kepada Walikota Yogyakarta untuk digunakan sebagai bahan penilaian untuk menentukan status bencana.

2. Penetapan Status Kedaruratan Bencana. Walikota Yogyakarta menetapkan Status Kedaruratan Bencana Kota Yogyakarta dengan memperhatikan beberapa ketentuan: (1) Laporan BPBD Kota Yogyakarta berdasarkan hasil pengkajian cepat dan (2) pertimbangan para pihak dalam forum rapat dengan instansi/lembaga/organisasi. Penetapan status kedaruratan dilakukan melalui Penerbitan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta tentang Status Darurat Bencana Kota Yogyakarta.
3. Pengaktifan Sistem Komando Penanganan Kedaruratan Bencana (SKPDB) Kota Yogyakarta.
4. Pembentukan struktur organisasi dan penunjukan personel dalam SKPDB yang memiliki mandat dan tugas penanganan kedaruratan selama masa kedaruratan yang ditetapkan.
5. Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana dan pengerahan sumber daya Pemerintah Kota Yogyakarta.
6. Pelaksanaan aksi penanganan darurat bencana.

6.2 Komando

Pimpinan penanganan darurat bencana adalah Kepala Daerah. Kepala Daerah dapat menunjuk Komandan dan Wakil Komandan untuk dapat melaksanakan operasi penanganan darurat bencana. Komando dan kendali selama penanganan darurat bencana berada pada Komandan Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang diberikan tugas untuk menjamin kesatuan komando yang terarah, terpadu, terukur dan meningkatkan kerjasama antar pihak terkait operasi penanganan darurat bencana, dan memerintahkan para pejabat yang terlibat mewakili lembaga/organisasi yang terkait dalam fasilitas akses tanggap darurat bencana gempa bumi.

1. Pos Komando

Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai POSKO PDB Kota Yogyakarta bertugas melaksanakan fungsi

sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan darurat bencana. Pos Komando berkedudukan di Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Kota Yogyakarta yaitu di Jalan Gambiran No. 26, Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Pos Lapangan

Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana yang selanjutnya disebut Pos Lapangan PDB adalah institusi yang berfungsi secara langsung sebagai pelaksana operasi penanganan darurat bencana baik di lokasi bencana, sekitar lokasi bencana maupun lokasi pengungsian (Peraturan Kepala BNPB Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana). Berdasarkan identifikasi jarak antar Kelurahan di Kota Yogyakarta yang dekat dengan Pos Komando, maka pos lapangan tidak diperlukan.

3. Pos Pendukung

Pos pendukung dibentuk untuk mendukung kelancaran akses masuk, keluar, dan pendistribusian bantuan penanganan darurat bencana, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Berikut Lokasi pos pendukung PDB Kota Yogyakarta.

Tabel 6. 1 Pos Pendukung PDB Kota Yogyakarta

Pos Pendukung	Lokasi	Fungsi
Pos Pendukung I	Kantor/Posko BPBD Kota Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Pos pengelolaan logistik utama • Pos penerimaan bantuan-bantuan luar daerah
Pos Pendukung II	<ul style="list-style-type: none"> • Terminal Giwangan • Stasiun Tugu Yogyakarta • Stasiun Lempuyangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pos penerimaan bantuan local
Pos Pendukung III	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Pos logistik dan dapur umum.
Pos Pendukung IV	<ul style="list-style-type: none"> • Kantor Kelurahan • Kemantren Wilayah Terdampak 	<ul style="list-style-type: none"> • Pos penerimaan bantuan

Pos Pendukung	Lokasi	Fungsi
Pos Pendukung V	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta • Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta 	<ul style="list-style-type: none"> • Pos Layanan Dukungan Psikososial
Pos Pendukung VI	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta • Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 	<ul style="list-style-type: none"> • Pos pengelolaan sarana dan prasarana alat berat
Pos Logistik Kesehatan	Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Pos penerimaan dan pengelolaan bantuan obat-obatan dan peralatan Kesehatan
Pos Kesehatan Hewan	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Pos bantuan kesehatan hewan

4. Pos Pendamping

a. Pos Pendamping Provinsi

Pos pendamping Provinsi akan mendampingi SKPDB Kota Yogyakarta dalam memastikan dukungan penanganan darurat bencana gempa bumi dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Pos pendamping provinsi bertugas memberikan bantuan dukungan sumber daya yang tidak dimiliki oleh Kota Yogyakarta. Pos Pendamping Provinsi berkedudukan di **Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, Jl. Kenari No 14 A Miliran, Kota Yogyakarta.**

b. Pos Pendamping Nasional

Pos pendamping Nasional bertugas mendampingi pos pendamping Provinsi dan Kota Yogyakarta dalam memastikan dukungan penanganan darurat bencana gempa bumi agar dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pos pendamping Nasional berfungsi memberikan dukungan sumber daya manusia, logistic, dan peralatan yang dibutuhkan oleh Kota Yogyakarta. Pos Pendamping Nasional berkedudukan di **Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, Jl. Kenari No 14 A Miliran, Kota Yogyakarta.**

6.3 Kendali

Kendali utama dalam operasi penanganan darurat bencana berada pada Komandan Penanganan Darurat Bencana PDB yang menjalankan kendali atas pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan operasi penanganan darurat bencana di Kota Yogyakarta.

6.4 Koordinasi

Kewajiban untuk berkoordinasi harus dilaksanakan oleh seluruh komponen dalam penanganan kedaruratan bencana gempa bumi di wilayah Kota Yogyakarta berada di bawah komando Komandan PDB Kota Yogyakarta. Para pihak yang berasal dalam maupun di luar Struktur Komando Penanggulangan Darurat Bencana (SKPDB) Kota Yogyakarta, secara maksimal membangun pola koordinasi dan rentang kendali multi-pihak yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana gempa bumi.

Koordinasi dilakukan dengan melibatkan perwakilan seluruh SKPDB dan bersifat wajib. Pelaksanaan koordinasi dipimpin oleh Komandan PDB dan dilaksanakan 1 (satu) kali setiap hari selama masa darurat pada waktu yang disepakati dan bersifat wajib atau sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan selama penanganan darurat bencana gempa bumi. Koordinasi dilakukan di Pos Komando. Koordinasi akan membahas laporan perkembangan oleh setiap bidang operasi serta alternatif-alternatif dan solusi dalam penanganan darurat bencana gempa bumi.

6.5 Komunikasi

Sarana dan prasarana komunikasi merupakan fasilitas penting dalam operasi penanggulangan darurat bencana untuk mengelola jalur informasi dan mendukung koordinasi serta pengendalian secara internal dan eksternal. Komandan melaksanakan komunikasi dengan semua bagian organisasi dan pihak terkait lainnya. Komandan Penanggulangan Darurat Bencana (PDB) bertanggung jawab atas kelancaran alur komunikasi untuk mendukung operasi darurat yang efisien

dan menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan bantuan Bagian Data Informasi melalui berbagai media dan alat komunikasi. Jalur komunikasi ini digunakan untuk menyebarkan informasi, instruksi, dan perintah dalam kerangka mekanisme darurat bencana gempa bumi yang terintegrasi di wilayah Kota Yogyakarta.

1. Radio Komunikasi

Frekuensi Radio VHF yang dialokasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BPBD Kota Yogyakarta adalah:

- *Output* : 149.700 MHz
- *Input* : 139.950 MHz
- *Duplex* : - 9.750 Mhz
- *Tone* : 88.5 Hz

2. Call Centre Pusdalops BPBD Kota Yogyakarta

- a. Alamat : Jalan Gambiran No. 26, Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Call Centre : +62 811-2828-911/0274-4298225
- c. Email : bpbd@jogjakota.go.id
- d. Instagram : <http://instagram.com/bpbdkotajogja>
- e. Website : <http://bpbd.jogjakota.go.id>

6.6 Informasi

Informasi penanganan darurat bencana dapat diperoleh dari berbagai sumber yang terpercaya yang berasal dari laporan petugas lapangan dan bersumber dari jejaring sosial yang diterima secara real time. Informasi penanganan darurat bencana yang valid dan terverifikasi dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan oleh komandan PDB dan SKPDB yang terlibat dalam penanganan darurat bencana di Kota Yogyakarta. Informasi meliputi data, sistem, aplikasi, analisis data, hasil data, dan verifikasi.

BAB VII

PEMUTAKHIRAN DAN PENGUJIAN

7.1 Pemutakhiran

Untuk memastikan bahwa dokumen rencana kontingensi dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuannya, penting untuk melibatkan semua pihak, semua pihak, baik Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Media, Lembaga Keagamaan, organisasi penyandang disabilitas maupun Organisasi Non Pemerintah, untuk dapat berperan, mengampu tugas dan fungsinya dalam SKPDB gempa bumi di Kota Yogyakarta. Keterlibatan para pihak sebagai bagian dari komitmen kolektif dalam sistem komando penanganan darurat bencana. Pemutakhiran dapat dilakukan melalui beberapa cara di antaranya adalah sebagai berikut;

1. Pemutakhiran data dan informasi guna penyesuaian isi dokumen rencana kontingensi dilakukan minimal 6 bulan sekali setelah melakukan pemantauan dan evaluasi sumber daya.
2. Apabila hingga batas waktu yang direncanakan tidak terjadi bencana, maka rencana kontingensi ini akan diperpanjang masa berlakunya hingga 2 tahun.
3. Pemantauan situasi dan perubahan kondisi dilakukan secara berkala untuk pemutakhiran data dan informasi, guna penyesuaian rencana kontingensi.
4. Dokumen rencana kontingensi bukanlah dokumen yang mati, tetapi bersifat dinamis dan operasional. Oleh karena itu, dokumen ini harus disimulasikan dengan dasar skenario dari dokumen rencana kontingensi bencana Banjir Bandang yang ada. Simulasi merupakan rekayasa kejadian untuk menggerakkan setiap unsur dalam suatu rencana kontingensi dan memastikan unsur tersebut memahami tugas dan fungsinya.

7.2 Pengujian

Setelah disusun rencana kontingensi perlu diuji dengan berbagai cara di bawah ini. Uji ini bertujuan memastikan bahwa rencana kontingensi sesuai untuk dilaksanakan dan para pemangku kepentingan memahami apa saja peran mereka dan mengetahui kapan serta bagaimana menjalankan peran tersebut.

1. Rencana kontingensi disusun bersama oleh Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah yang terkait dengan penanganan bencana di Kota Yogyakarta dan perlu dilakukan uji rencana kontingensi dalam bentuk simulasi kesiapsiagaan seperti Pendidikan/Pelatihan,

gladi ruang (*Tabletop Exercise/TTX*), gladi posko (*Command Post Exercise*) melalui pendekatan partisipasi yang bermakna.

2. Para Pihak yang terlibat dalam rencana kontingensi ini agar menindaklanjuti dengan pembuatan prosedur tetap /prosedur operasi standar (SOP) sesuai dengan tugas yang dijelaskan dalam rencana kontingensi ini.
3. Pemerintah Kota Yogyakarta bersama-sama dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat menyusun rencana penanganan darurat bencana gempa bumi menyesuaikan dengan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat setempat serta menghubungkan rencana PDB banjir bandang tersebut dengan rencana kontingensi di tingkat provinsi.
4. Peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dilakukan dengan cara:
 - a. Membangun komitmen seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mitigasi bencana dan pada saat terjadi bencana.
 - b. Informasi berkelanjutan di instansi masing-masing sehingga kebijakan pengurangan risiko bencana dan kebijakan tanggap darurat bisa terus dikawal dan berkelanjutan.
 - c. Sistem peringatan dini perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas personel dan sarana prasarana Pusdalops PB Kota Yogyakarta, BMKG dan instansi terkait lainnya.
5. Aktivasi dari rencana kontingensi ini menjadi Rencana Operasional pada saat terjadi bencana banjir bandang akan dilakukan oleh Walikota Kota Yogyakarta, selaku pemegang komando pengendali operasi.
6. Koordinasi untuk penyusunan, pemantauan dan pemutakhiran rencana kontingensi ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, dibawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. 2024. *Kota Yogyakarta dalam Angka 2024*. BPS Kota Yogyakarta.
- BNPB. 2016. *Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana*. Jakarta: BNPB.
- BNPB. 2019. *Buku Saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana*. Jakarta: BNPB.
- BNPB. 2021. *Pedoman Renkon 5.0: Pedoman Penyusunan Rencana Kontingensi Menghadapi Ancaman Bencana (edisi kelima)*. Jakarta: BNPB.
- BPBD Kota Yogyakarta. 2015. *Dokumen Rencana Kontingensi Gempa Bumi Kota Yogyakarta*. Kota Yogyakarta: BPBD Kota Yogyakarta.
- BPBD Kota Yogyakarta. 2024. *Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kota Yogyakarta Tahun 2024*. Kota Yogyakarta: BPBD Kota Yogyakarta.
- BPBD Kota Yogyakarta. 2022. *Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Yogyakarta 2022-2026*. Kota Yogyakarta: BPBD Kota Yogyakarta .
- BPBD Kota Yogyakarta. 2023. *Dokumen Kajian Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)*. Kota Yogyakarta: BPBD Kota Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan turunannya.

Lampiran 1 Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi: Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat

Berdasarkan Formulir 8. Perka No 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana. Disesuaikan.

RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA

Lembar No. ____ dari ____ lembaran

Nama Lokasi (koordinat peta) : _____

Tanggal waktu pembuatan Rencana Operasi : _____

RENCANA OPERASI:

Nomor: _____

PENUNJUKAN:

1. Peta : Nasional/Wilayah/Daerah
2. Skala : _____ (skala peta)
3. Tahun : _____ (tahun pengeluaran peta)
4. Daerah Waktu : _____ WIB / WITA / WIT
5. Landasan Hukum : _____ (landasan hukum pembuatan

Rencana Operasi)

6. Dokumen : **Rencana Kontingensi** _____

DAERAH WAKTU : WIB / WITA / WIT

SANDI OPERASI : SUSUNAN TUGAS :

1. Situasi

a. Macam/jenis bencana yang telah terjadi terdiri dari: (*tulis informasi dari Informasi Bencana*)

1) Macam/jenis bencana, tanggal waktu kejadian, lokasi/ daerah bencana, korban manusia, kerusakan bangunan, sarana, prasarana umum, ekonomi dan dampak sosial.

2) Informasi lanjutan tentang perkembangan situasi bencana dan informasi dukungan bantuan kemanusiaan.

6.6 Kebijakan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah.

2. Tugas Pokok

3. Pelaksanaan

a. Konsep Operasi dan Sasaran Operasi

b. Struktur Organisasi dan Penjabaran Komando Tanggap Darurat Bencana.

c. Instruksi dan Koordinasi.

d. Administrasi dan Logistik

e. Pengendalian

f. Penutup

Tanggal _____ (penetapan)

Ditetapkan oleh: Komandan Darurat Bencana

Lampiran:

- A. Surat Penetapan Status Darurat Gubernur
- B. Struktur Organisasi dan Susunan Pejabat Operasi
- C. Penjabaran tugas pejabat operasi
- D. Jaring Komunikasi
- E. Rencana Dukungan Anggaran

Lampiran 2 Proyeksi Dampak
A. Asumsi Dampak Penduduk

No.	Kemantren/Kelurahan	Kriteria									Wisatawan Domestik Terdampak	Wisatawan Mancanegara Terdampak
		Total Penduduk	Jiwa Terancam	Meninggal	Luka Berat	Luka Sedang	Luka Ringan	Mengungsi	Wisatawan Domestik	Wisatawan Mancanegara		
1	Kemantren Tegalarjo	37,408	37,408	18	694	1,388	3,470	10,408	0	0	0	0
1.1	Tegalarjo	9,299	9,299	5	181	362	905	2,714	0	0	0	0
1.2	Bener	5,006	5,006	3	104	209	522	1,566	0	0	0	0
1.3	Kricak	9,835	9,835	5	197	393	984	2,951	0	0	0	0
1.4	Karangwaru	13,471	13,471	5	212	424	1,059	3,177	0	0	0	0
2	Kemantren Gondokusuman	43,118	43,118	22	864	1,728	4,319	12,954	0	0	0	0
2.1	Baciro	12,349	12,349	6	248	495	1,238	3,713	0	0	0	0
2.2	Demangan	8,641	8,641	4	173	347	866	2,599	0	0	0	0
2.3	Klitren	9,591	9,591	5	195	389	973	2,918	0	0	0	0
2.4	Kotabaru	3,158	3,158	2	61	123	307	920	0	0	0	0
2.5	Terban	9,379	9,379	5	187	374	935	2,804	0	0	0	0
3	Kemantren Jetis	27,160	27,160	14	559	1,117	2,615	8,376	0	0	0	0
3.1	Bumijo	10,257	10,257	5	205	410	1,025	3,074	0	0	0	0
3.2	Gowongan	7,971	7,971	4	159	318	795	2,384	0	0	0	0
3.3	Cokrodiningratan	8,932	8,932	5	195	389	795	2,918	0	0	0	0
4	Kemantren Danurejan	21,170	21,170	11	428	855	2,139	6,415	0	0	0	0
4.1	Suryatmajan	4,561	4,561	2	93	185	463	1,389	0	0	0	0
4.2	Tegalpanggung	9,210	9,210	5	185	369	924	2,771	0	0	0	0
4.3	Bausasran	7,399	7,399	4	150	301	752	2,255	0	0	0	0
5	Kemantren Gedongtengen	19,184	19,184	10	386	770	1,926	5,778	0	0	0	0
5.1	Pringgokusuman	11,852	11,852	6	239	477	1,193	3,578	0	0	0	0
5.2	Sosromenduran	7,332	7,332	4	147	293	733	2,200	0	0	0	0

No.	Kemantren/Kelurahan	Kriteria									Wisatawan Domestik Terdampak	Wisatawan Mancanegara Terdampak
		Total Penduduk	Jiwa Terancam	Meninggal	Luka Berat	Luka Sedang	Luka Ringan	Mengungsi	Wisatawan Domestik	Wisatawan Mancanegara		
6	Kemantren Ngampilan	18,055	18,055	7	285	570	1,425	4,277	0	0	0	0
6.1	Notoprajan	8,106	8,106	3	138	277	692	2,077	0	0	0	0
6.2	Ngampilan	9,949	9,949	4	147	293	733	2,200	0	0	0	0
7	Kemantren Wirobrajan	28,156	28,156	14	696	1,115	2,787	9,752	0	0	0	0
7.1	Patangpuluhan	7,685	7,685	4	192	307	768	2,686	0	0	0	0
7.2	Wirobrajan	9,344	9,344	5	232	372	930	3,254	0	0	0	0
7.3	Pakuncen	11,127	11,127	5	272	436	1,089	3,812	0	0	0	0
8	Kemantren Mantrijeron	35,294	35,294	16	834	1,334	3,334	11,669	0	0	0	0
8.1	Gedongkiwo	13,943	13,943	7	341	545	1,362	4,767	0	0	0	0
8.2	Suryodiningratan	11,344	11,344	5	271	434	1,085	3,797	0	0	0	0
8.3	Mantrijeron	10,007	10,007	4	222	355	887	3,105	0	0	0	0
9	Kemantren Kraton	21,421	21,421	10	430	861	2,151	6,454	2.672	443	187	31
9.1	Patehan	5,848	5,848	3	117	235	587	1,762	0	0	0	0
9.2	Panembahan	8,990	8,990	4	180	360	900	2,699	0	0	0	0
9.3	Kadipaten	6,583	6,583	3	133	266	664	1,993	0	0	0	0
10	Kemantren Gondomanan	14,644	14,644	8	295	589	1,472	4,418	4.455	68	312	5
10.1	Prawirodirjan	9,059	9,059	5	183	366	914	2,743	0	0	0	0
10.2	Ngupasan	5,585	5,585	3	112	223	558	1,675	0	0	0	0
11	Kemantren Pakualaman	10,594	10,594	5	183	366	915	2,745	0	0	0	0
11.1	Purwokinanti	6,072	6,072	3	105	209	523	1,569	0	0	0	0
11.2	Gunungketur	4,522	4,522	2	78	157	392	1,176	0	0	0	0
12	Kemantren Mergangsan	31,591	31,591	16	797	3,508	4,466	11,163	0	0	0	0
12.1	Brontokusuman	10,869	10,869	5	271	1,193	1,519	3,797	0	0	0	0

No.	Kemantren/Kelurahan	Kriteria									Wisatawan Domestik Terdampak	Wisatawan Mancanegara Terdampak
		Total Penduduk	Jiwa Terancam	Meninggal	Luka Berat	Luka Sedang	Luka Ringan	Mengungsi	Wisatawan Domestik	Wisatawan Mancanegara		
12.2	Keparakan	9,573	9,573	5	244	1,075	1,369	3,421	0	0	0	0
12.3	Wirogunan	11,149	11,149	6	282	1,240	1,578	3,945	0	0	0	0
13	Kemantren Umbulharjo	71,743	71,743	41	4,240	5,087	6,359	16,956	0	0	0	0
13.1	Giwangan	8,186	8,186	4	409	490	613	1,634	0	0	0	0
13.2	Sorosutan	16,125	16,125	8	785	942	1,178	3,142	0	0	0	0
13.3	Pandeyan	12,378	12,378	6	625	750	937	2,498	0	0	0	0
13.4	Warungboto	9,400	9,400	4	446	536	669	1,785	0	0	0	0
13.5	Tahunan	11,292	11,292	9	921	1,105	1,381	3,683	0	0	0	0
13.6	Muja-muju	11,292	11,292	5	539	647	809	2,156	0	0	0	0
13.7	Semaki	5,164	5,164	5	515	617	772	2,058	0	0	0	0
14	Kemantren Kotagede	35,483	35,483	33	3,328	3,994	4,992	12,772	2.424	78	364	0
14.1	Prenggan	11,755	11,755	11	1,083	1,300	1,625	4,334	0	0	0	0
14.2	Purbayan	10,549	10,549	10	1,040	1,248	1,559	4,158	0	0	0	0
14.3	Rejowinangun	13,179	13,179	12	1,205	1,446	1,808	4,280	0	0	0	0
Total		415,021	415,021	225	14,019	23,282	42,370	124,137	9.550	589	862	36

B. Asumsi Dampak Kerusakan Rumah

No	Kemantren	Total Rumah di Kota Yogyakarta	Rumah Terdampak			Jumlah Kerusakan
			Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	
1.	Tegalrejo	11.451	515	1.145	2.290	3.951
2.	Gondokusuman	11.702	527	1.170	2.340	4.037
3.	Jetis	4.858	219	486	972	1.676
4.	Danurejan	4.706	212	471	941	1.624
5.	Gedongtengen	3.721	167	372	744	1.284
6.	Ngampilan	3.358	151	336	672	1.159
7.	Wirobrajan	8.661	390	866	1.732	2.988
8.	Mantrijenron	13.045	587	1.305	2.609	4.501
9.	Kraton	7.323	330	732	1.465	2.526
10.	Gondomanan	3.846	173	385	769	1.327
11.	Pakualaman	2.562	115	256	512	884
12.	Mergangsang	11.451	515	1.145	2.290	3.951
13.	Umbulharjo	25.687	2.312	3.853	10.275	16.440
14.	Kotagede	12.873	1.159	1.931	5.149	8.239
Total		125.244	7.371	14.452	32.761	54.584

C. Asumsi Dampak Kerusakan Jalan dan Jembatan

No	Kemantren	Jalan Nasional			Jalan Provinsi			Jalan Kota			Jembatan		
		RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR
1	Tegalrejo	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0	0	2
2	Gondokusuman	0	0	0	0	0	0	1	3	33	0	0	1
3	Jetis	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0	0	1
4	Danurejan	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	1
5	Gedongtengen	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0
6	Ngampilan	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
7	Wirobrajan	0	0	0	0	0	0	0	1	11	0	0	1
8	Mantrijenron	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kraton	0	0	0	0	0	0	1	1	17	0	0	0
10	Gandomanan	0	0	0	0	0	0	0	1	10	0	0	0
11	Pakualaman	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	0	1
12	Mergangsang	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0	1	1
13	Umbulharjo	0	1	0	0	1	0	2	4	48	1	1	10
14	Kotagede	0	1	0	0	1	0	1	2	23	1	1	2
Total		0	2	0	0	2	0	6	16	189	2	3	20

D. Asumsi Dampak Kerusakan Bangunan Sekolah

No	Kemantren	TK/PAUD			SD/MI			SMP/MTS			SMA/SMK/MA		
		RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR
1	Umbulharjo	2	5	52	2	2	15	2	0	5	1	1	11
2	Gondokusuman	0	1	13	0	0	5	1	1	3	1	0	4
3	Kotagede	2	2	27	1	2	10	1	0	2	0	0	2
4	Mantrijeron	1	1	13	1	1	4	0	0	1	1	0	2
5	Mergangsan	1	1	12	1	2	4	0	0	1	0	0	2
6	Jetis	0	1	10	0	0	5	0	1	2	0	0	2
7	Tegalrejo	0	1	11	0	0	4	0	0	1	0	0	2
8	Wirobrajan	0	1	11	0	0	3	0	0	1	0	0	1
9	Gondomanan	0	0	7	0	0	3	0	0	1	0	0	1
10	Gedongtengen	0	0	4	0	0	2	0	0	1	0	0	1
11	Kraton	0	0	5	0	0	2	0	0	1	0	0	0
12	Danurejan	0	0	5	0	0	2	0	0	1	0	0	0
13	Ngampilan	0	0	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0
14	Pakualaman	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Total		6	13	177	5	7	64	4	2	20	3	1	28

No	Kemantren	SLB			PKBM			SKB			PT		
		RB	RS	RR									
1	Umbulharjo	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	1	8
2	Gondokusuman	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	2
3	Kotagede	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
4	Mantrijeron	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	Mergangsan	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
6	Jetis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	Tegalrejo	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
8	Wirobrajan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Gondomanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Gedongtengen	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
11	Kraton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Danurejan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Ngampilan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Pakualaman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	3	0	0	7	0	0	1	3	1	15

E. Asumsi Dampak Fasilitas Perkantoran

No	Kemantren	Layanan Perkantoran					
		Kantor Pemerintahan			Kantor Swasta		
		RB	RS	RR	RB	RS	RR
1	Tegalrejo	0	0	3	0	0	5
2	Gondokusuman	0	0	5	0	0	5
3	Jetis	0	0	4	0	0	4
4	Danurejan	0	0	5	0	0	4
5	Gedongtengen	0	0	5	0	0	1
6	Ngampilan	0	1	6	0	0	3
7	Wirobrajan	0	0	6	0	0	5
8	Mantrijenron	0	0	3	0	1	4
9	Kraton	0	0	6	0	0	1
10	Gondomanan	0	0	5	0	1	2
11	Pakualaman	0	1	6	0	0	2
12	Mergangsang	1	0	4	0	0	2
13	Umbulharjo	2	1	11	1	1	8
14	Kotagede	1	1	10	1	1	10
Total		4	6	77	3	6	54

F. Asumsi Dampak Layanan Kesehatan

No	Kemantren	RS Pemerintah			RS Swasta			RS Bersalin			Puskesmas		
		RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR
1	Tegalrejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gondokusuman	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
3	Jetis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Danurejan	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	Gedongtengen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Ngampilan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
7	Wirobrajan	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
8	Mantrijenron	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9	Kraton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
10	Gondomanan	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
11	Pakualaman	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
12	Mergangsang	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0
13	Umbulharjo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
14	Kotagede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total		1	3	4	0	0	3	0	0	3	2	4	6

G. Asumsi Dampak Fasilitas Publik, Fasilitas Telekomunikasi dan Fasilitas Energi

No	Kemantren	GOR			Lapangan			Stadion			SPBU		
		RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR
1	Tegalrejo	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2	Gondokusuman	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
3	Jetis	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Danurejan	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gedongtengen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Ngampilan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Wirobrajan	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Mantrijenron	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9	Kraton	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Gondomanan	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Pakualaman	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Mergangsang	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Umbulharjo	2	2	2	0	0	1	0	0	1	1	0	2
14	Kotagede	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		3	4	12	0	0	1	0	0	2	1	1	4

No	Kemantren	Menara BTS		
		RB	RS	RR
1	Tegalrejo	0	0	3
2	Gondokusuman	0	1	14
3	Jetis	0	0	5
4	Danurejan	0	0	4
5	Gedongtengen	0	0	4
6	Ngampilan	0	0	2
7	Wirobrajan	0	0	2
8	Mantrijenron	0	1	4
9	Kraton	0	0	1
10	Gondomanan	0	1	8
11	Pakualaman	0	0	2
12	Mergangsang	0	1	3
13	Umbulharjo	1	3	16
14	Kotagede	1	1	5
Total		2	8	73

H. Asumsi Dampak Fasilitas Air Bersih dan Fasilitas Perekonomian

No	Kemantren	Fasilitas Air Bersih						Fasilitas Perekonomian								
		Saluran Irigasi			DAM/Sumur/Mata Air			Bank Umum Pemerintah			Bank Umum Swasta			Bank Perkreditan Rakyat (BPR)		
		RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR
1	Tegalrejo	0	0	0	0	0	7	0	0	1	0	0	1	0	0	0
2	Gondokusuman	0	0	1	0	0	10	0	0	7	0	0	5	0	0	1
3	Jetis	0	0	0	0	0	5	0	0	3	0	0	3	0	0	1
4	Danurejan	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1
5	Gedongtengen	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1
6	Ngampilan	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
7	Wirobrajan	0	0	0	0	0	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0
8	Mantrijenron	0	0	0	0	1	2	0	1	1	0	0	1	0	0	1
9	Kraton	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Gandomanan	0	0	0	0	0	2	0	0	4	0	0	2	0	0	1
11	Pakualaman	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Mergangsang	0	0	0	0	1	3	0	1	1	0	0	3	0	0	1
13	Umbulharjo	0	0	1	1	1	19	1	1	10	1	1	4	1	1	3
14	Kotagede	0	0	0	1	1	10	1	1	3	1	0	0	0	0	1
Total		0	0	2	2	4	77	2	4	34	2	1	21	1	1	11

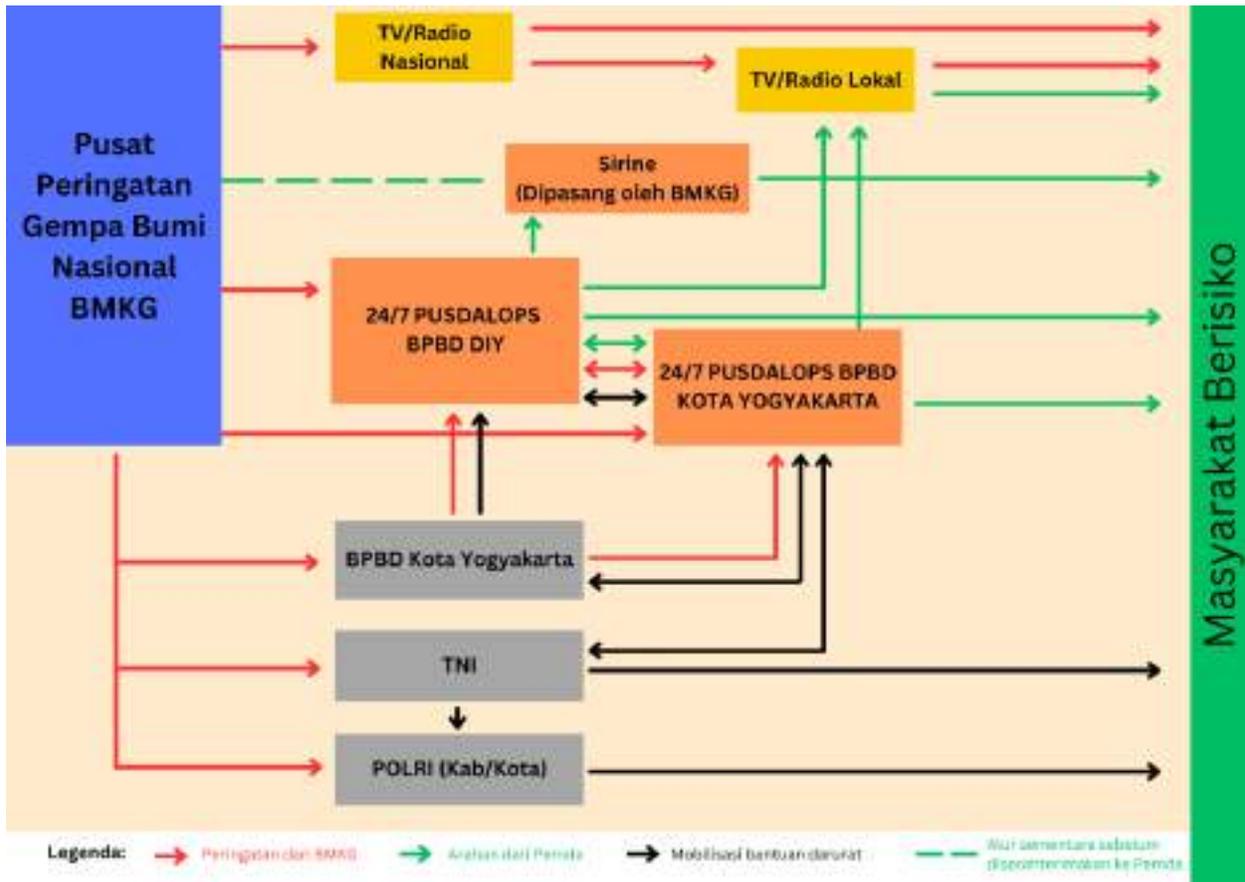
I. Asumsi Dampak Fasilitas Perekonomian dan Fasilitas Perhotelan

No	Kemantren	Fasilitas Perekonomian						Fasilitas Perhotelan					
		Pasar			Mall			Hotel Bintang			Hotel Non-Bintang		
		RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR
1	Tegalrejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gondokusuman	0	0	2	0	0	2	0	0	4	0	1	9
3	Jetis	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Danurejan	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	10
5	Gedongtengen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Ngampilan	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5
7	Wirobrajan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Mantrijenron	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	19
9	Kraton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
10	Gondomanan	0	0	1	0	1	2	0	0	1	0	0	4
11	Pakualaman	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4
12	Mergangsang	0	0	1	0	0	0	1	2	8	1	3	37
13	Umbulharjo	1	1	4	0	0	0	1	1	5	2	3	31
14	Kotagede	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	60
Total		1	2	10	0	1	4	2	3	25	4	11	181

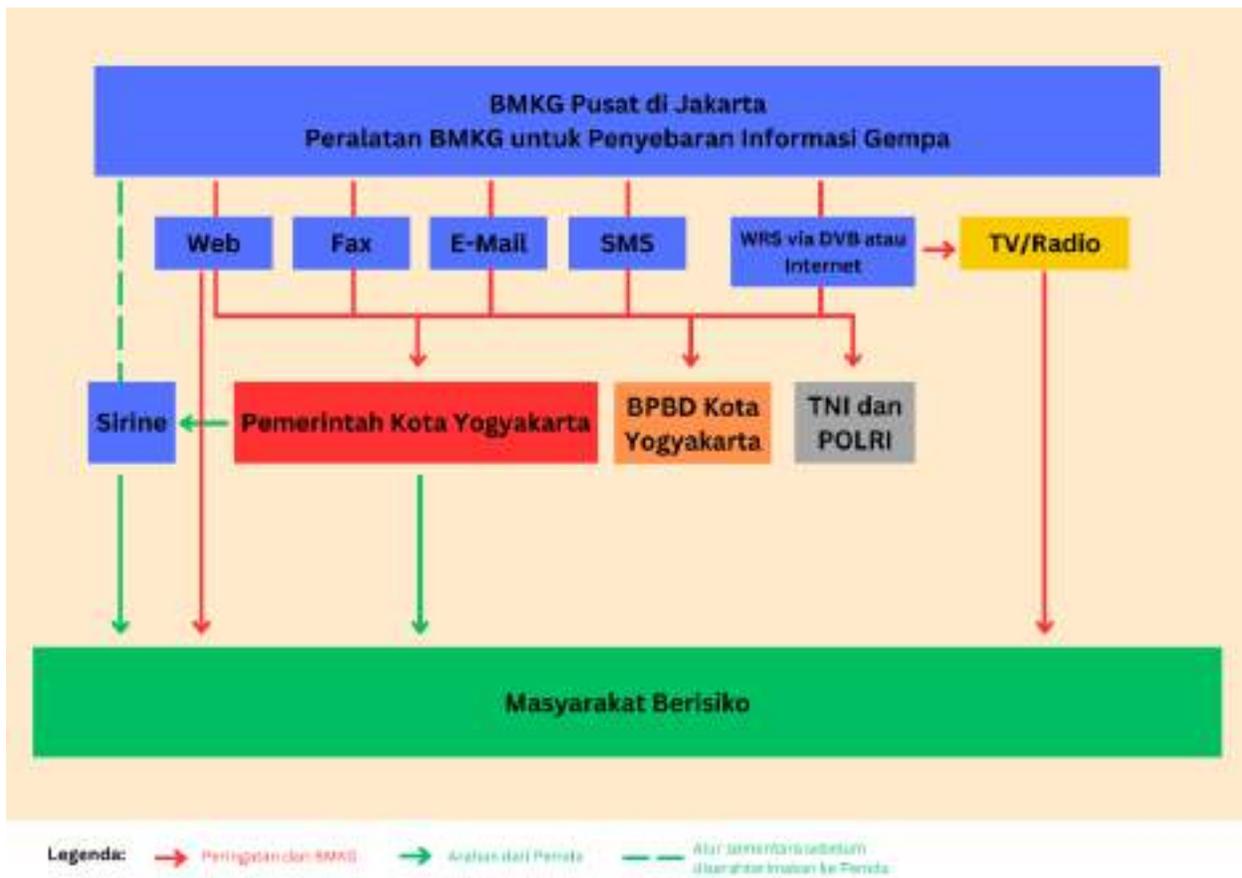
J. Asumsi Dampak Fasilitas Peribadatan

No	Kemantren	Fasilitas Peribadatan											
		Masjid			Mushalla			Gereja			Pura		
		RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR	RB	RS	RR
1	Tegalrejo	2	1	14	0	1	14	0	0	2	0	0	0
2	Gondokusuman	2	2	19	0	1	12	1	0	5	0	0	1
3	Jetis	1	1	10	0	1	9	1	0	5	0	0	0
4	Danurejan	1	1	7	0	1	10	0	0	0	0	0	0
5	Gedongtengen	1	1	7	0	1	7	0	1	1	0	0	0
6	Ngampilan	1	0	6	0	1	8	0	0	1	0	0	0
7	Wirobrajan	1	1	9	0	1	9	0	1	1	0	0	0
8	Mantrijenron	2	1	14	0	1	11	0	1	1	0	0	0
9	Kraton	1	0	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0
10	Gondomanan	1	1	7	0	1	7	0	0	2	0	0	0
11	Pakualaman	1	0	4	0	1	7	0	0	0	0	0	0
12	Mergangsang	2	1	12	0	1	12	0	0	2	0	0	0
13	Umbulharjo	7	6	70	2	4	46	0	0	2	0	0	1
14	Kotagede	3	3	32	1	2	25	0	0	1	0	0	0
Total		25	18	214	7	15	182	2	3	22	0	0	2

Lampiran 3 Alur Sistem Komunikasi Peringatan Dini Gempa Bumi



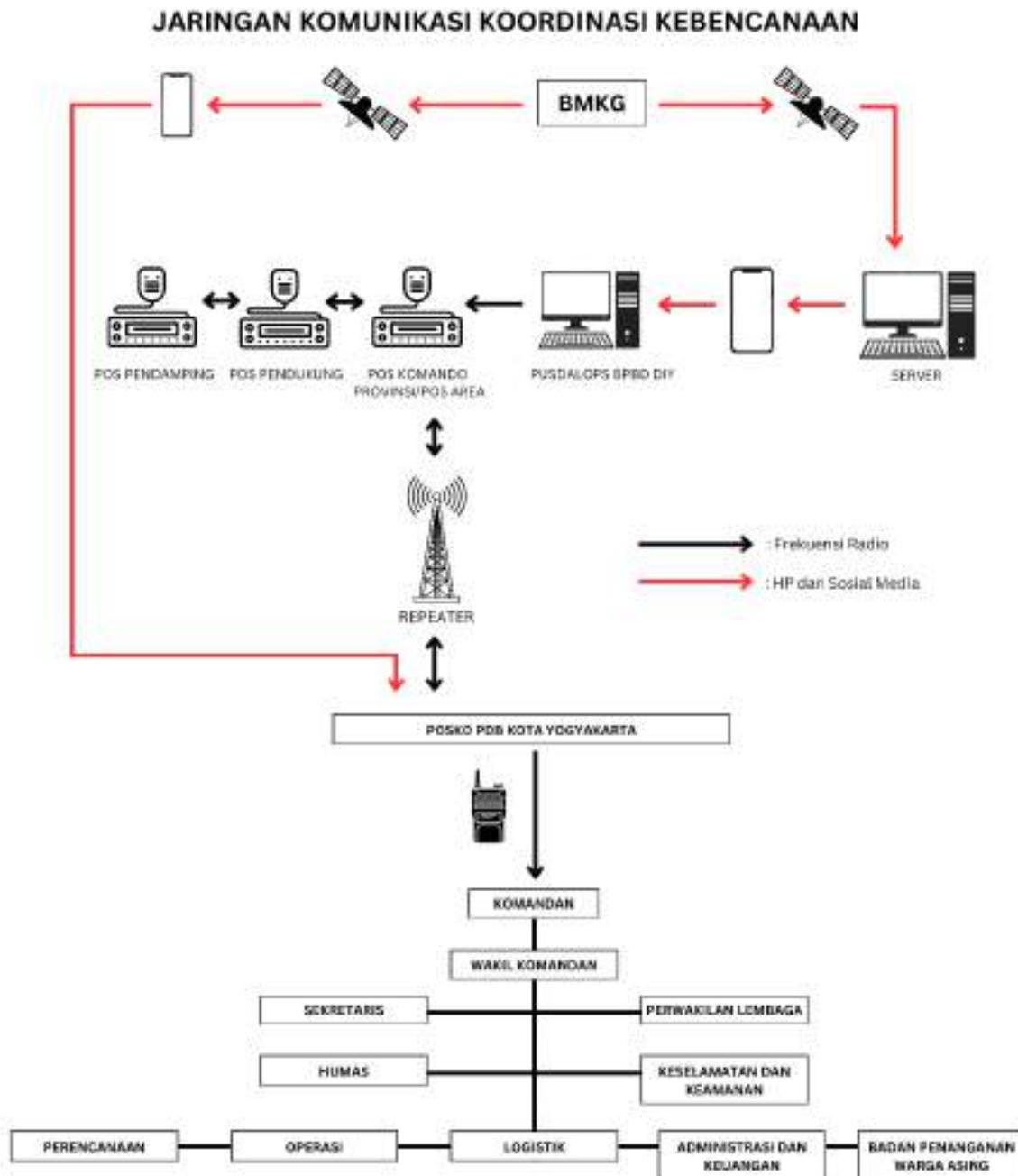
Lampiran 4 Alur Penyebaran Berita Gempa Bumi dan Peringatan Tanda Bahaya



Lampiran 5 Alur Pelayanan Peringatan Tanda Bahaya Gempa Bumi Kepada Masyarakat



Lampiran 6 Jaring Komunikasi Komando dan Bidang



Lampiran 7 Ketersediaan Sumber Daya

A. Ketersediaan Sumber daya manusia

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi	Kontak	Keterangan
1	Instruktur Kesehatan, Keselamatan, Kerja (K3)	1 Orang	Kantor Lembaga Resiliensi Bencana (LRB) / Muhammadiyah Disaster Manajemen Center (MDMC) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Yogyakarta, Jl. Sultan Agung No.14, Wirogunan, Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55151	Hatta Effendi 081331466899	Auditor Sistem Manajemen K3 Revolution Mind Indonesia

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi	Kontak	Keterangan
2	Instruktur Penanggulangan Bencana	1 Orang			Dosen PWK ITNY mengajar Mata Kuliah Manajemen Kebencanaan dan Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Bencana
3	Fasilitator Penanggulangan Bencana	7 Orang			Sertifikat TOF Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dan Sertifikat TOT Tenaga Pelopor Perdamaian (Bencana Sosial)
4	Koordinator pengumpul data dan informasi	1 Orang			Sertifikat Fasilitator Penanggulangan Bencana BNSP

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi	Kontak	Keterangan
5	Pencarian dan Penyelamatan / Search and Rescue (SAR) dan Evakuasi	5 Orang			Sertifikat Water Rescue – BASARNAS, Sertifikat SAR Gunung dan Sertifikat Climbing
6	Penanggulangan Penderita Gawat Darurat (PPGD)	2 Orang			Sertifikat Instruktur P3K Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Level 4
7	Media Jurnalistik	2 Orang			Sertifikat Wartawan Muda
8	Komunikasi Kebencanaan	1 Orang			Anggota Radio Amatir
9	Manajemen Tempat Pengungsian	2 Orang			Sertifikat Manajemen Posko dan Psikososial
10	Relawan Resiliensi Bencana	30 Orang			Relawan Resiliensi Bencana MDMC PDM Kota Yogyakarta

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi	Kontak	Keterangan
11	K3	4 orang	Kantor Perumda PDAM Tirtamarta	GALIH SATRIO BRAHMANTYO, S.E. (+62 857-2951-5938)	
12	Penyusunan Hospital Disaster Plan dan peta risiko	1 Orang	RSUD Kota Yogyakarta	LILLA ERYANI, SE, MPH (081225756502)	
13	Manajemen fasilitas dan Keselamatan	1 Orang	RSUD Kota Yogyakarta		
14	Ahli K3 Faskes	2 orang	RSUD Kota Yogyakarta		
15	EMT (Emergency Medical Team)	1 team	RSUD Kota Yogyakarta		1 Dokter, 2 perawat,1 driver, 1 apoteker
16	Analisis Bencana	5	Universitas Teknologi Yogyakarta		Pencegahan dan Kesiapsiagaan

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi	Kontak	Keterangan
17	Perencana Penanggulangan Bencana			Adi Setiabudi Bawono (0274) 623310	Rehabilitasi dan Rekonstruksi
18	Arsiparis	1	Dinas Pariwisata	083801469077	Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
19	Pengembangan Sumber daya Pariwisata	4	Dinas Pariwisata	08122730361	Melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi program di Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata.
20	Pemasaran Pariwisata	3	Dinas Pariwisata	085642032648	Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi	Kontak	Keterangan
					dan fasilitasi program di Bidang Pemasaran Pariwisata.
21	Daya Tarik Pariwisata	6	Dinas Pariwisata	081328655770	Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan daya tarik pariwisata.
22	Industri Pariwisata	4	Dinas Pariwisata	087838344005	Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi program di Bidang Pengembangan Industri Pariwisata.
23	Sekretariat Pariwisata	11	Dinas Pariwisata	081804128437	Menyelenggarakan Kesekretariatan dinas

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi	Kontak	Keterangan
24	Linmas	88	Kantor Satpol PP Kota Yogyakarta	Kabid Linmas	•
25	PPGD/Tim Ambulan	20	Markas PMI Kota Yogyakarta	Kepala Bagian Pelayanan Yuliko Pambudi (0818463375)	Relawan terlatih
26	Asesmen	5	Markas PMI Kota Yogyakarta	Kepala Bagian Pelayanan Yuliko Pambudi (0818463375)	Relawan terlatih
27	Pencarian dan Penyelamatan (SAR) dan Evakuasi	30	Markas PMI Kota Yogyakarta	Kepala Bagian Pelayanan Yuliko Pambudi (0818463375)	Relawan Terlatih
29	Kampung Tanggap Bencana	350	Pada 3 kelurahan		Data perlu diperbarui
30	Anggota Linmas	90	Pada 3 kelurahan		Data perlu diperbarui

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi	Kontak	Keterangan
31	Kelurahan Tanggap Bencana	75	Pada 3 kelurahan		Data perlu diperbarui
32	Redkar	45	Pada 3 kelurahan		Data perlu diperbarui
33	KTB	300 Orang	Kampung Rejowinangun, Kampung Gedongkuning, Kampung Pilahan, Kampung Prenggan, Kampung Tinalan, Kampung Tegal Gendu, Kampung Purbayan, Kampung Gedongan, Kampung Basen, Kampung Alun-alun		Personel KTB yang sudah dilatih dengan simulasi tanggap bencana
34	KALTANA	30	Kelurahan Rejowinangun		Personel Kaltana yang sudah dilatih dengan simulasi tanggap bencana

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi	Kontak	Keterangan
35	REDKAR	45	Kemantren Kotagede		Personel Tagana yang sudah dilatih dengan simulasi tanggap bencana
36	BMR	30	Kelurahan Rejowinangun, Kelurahan Prenggan, Kelurahan Purbayan		Personel KTB yang sudah dilatih dengan simulasi tanggap bencana
37	Kampung Tanggap Bencana	100 Orang	Kampung Ngadiwinatan, Kelurahan Ngampilan,, Kemantren Ngampilan		Personel KTB yang sudah dilatih dengan simulasi tanggap bencana
38	Kelurahan Tanggap Bencana	20	Kelurahan Ngampilan, Kemantren Ngampilan		Personel Kaltana yang sudah dilatih dengan simulasi tanggap bencana
39	Taruna Siaga Bencana	58	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi		Personel Tagana yang sudah dilatih dengan

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi	Kontak	Keterangan
			Kota Yogyakarta yang menunjuk di Kemantren Ngampilan		simulasi tanggap bencana
40	Kampung Tanggap Bencana	37 orang	Kampung Jagalan Ledoksari Kelurahan Purwokinanti Kemantren Pakualaman		Personel KTB yang sudah dilatih dengan simulasi tanggap bencana
41	Kampung Tanggap Bencana	52 orang	Kampung Jagalan Beji Kelurahan Purwokinanti Kemantren Pakualaman		Personel KTB yang sudah dilatih dengan simulasi tanggap bencana
42	Kampung Tanggap Bencana	45 orang	Kampung Purwokinanti Kelurahan Purwokinanti Kemantren Pakualaman		Personel KTB yang sudah dilatih dengan simulasi tanggap bencana
43	Kampung Tanggap Bencana	45 orang	Kampung Kepatihan Kelurahan Purwokinanti Kemantren Pakualaman		Personel KTB yang sudah dilatih dengan

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi	Kontak	Keterangan
					simulasi tanggap bencana
44	Kampung Tanggap Bencana	25 orang	Kampung Gunungketur Kelurahan Gunungketur Kemantren Pakualaman		Personel KTB yang sudah dilatih dengan simulasi tanggap bencana
45	Kampung Tanggap Bencana	14 orang	Kampung Margoyasan Kelurahan Gunungketur Kemantren Pakualaman		Personel KTB yang sudah dilatih dengan simulasi tanggap bencana
46	Kampung Tanggap Bencana	33 orang	Kampung Kauman Kelurahan Gunungketur Kemantren Pakualaman		Personel KTB yang sudah dilatih dengan simulasi tanggap bencana
47	Tim Reaksi Cepat	7	Kantor BPBD Kota Yogyakarta		Personel TRC sudah dilatih dan memiliki sertifikat

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi	Kontak	Keterangan
48	Analisis Bencana	4	Kantor BPBD Kota Yogyakarta		Pencegahan dan Kesiapsiagaan
49	Penata Penanggulangan Bencana	2			Kedaruratan dan Logistik
50	Perencana Penanggulangan Bencana	2			Rehabilitasi dan Rekonstruksi
51	Pencarian dan Penyelamatan (SAR) dan Evakuasi	10			Relawan yang telah menerima pelatihan dan/atau berpengalaman dalam bidang ini.
52	Penelaah Teknis Kebijakan	1	Dinas Damkarmat	Kepala Seksi Ops. Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan	Penelaah Teknis Kebijakan Penyelamatan dan Penanganan B3
53	Investigator Kebakaran	2			Sertifikasi

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi	Kontak	Keterangan
54	Inspektur Kebakaran	5		Beracun (085747432450)	Sertifikasi
55	Fire Rescue	2			Sertifikasi
56	Firefighter 1	79			Sertifikasi
57	Redkar	19			Personel Relawan yang sudah dilatih dan Melaksanakan Piket yang bertugas sebagai Narahubung di Wilayah
58	Pemangkasan pohon	10	DLH	RAIHAN RADYA PRADANA 085727194951	
59	Health Emergency officer	4	Dinas Kesehatan 4		
60	Disaster Management Team	6	Dinas Kesehatan 2, PSC 1, Puskesmas 2, RSUD 1		

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi	Kontak	Keterangan
61	TGC KLB Penyakit	22	Dinas Kesehatan 4, Puskesmas 18		
61	Surveilans Penyakit	18	Puskesmas 18		
62	K3	1	Kantor PLN Kota Yogyakarta		
63	Engineer	2	Kantor PLN Kota Yogyakarta		
64	Teknisi	70	Kantor PLN Kota Yogyakarta		
65	Sekretariat	15	Dinas kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Jl Kemasan No.39		Menyelenggarakan kesekretariatan Dinas
66	Warisan Budaya	9	Dinas kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Jl Kemasan No.39		Melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi	Kontak	Keterangan
					pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya
67	Sejarah Permuseuman Bahasa dan Sastra	9	Dinas kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Jl Kemas No.39		Melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan sejarah, permuseuman, bahasa, dan sastra.
68	Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni	11	Dinas kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Jl Kemas No.39		Melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitas, penyelenggaraan

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi	Kontak	Keterangan
					pemeliharaan dan pengembangan adat dan tradisi, pembinaan lembaga budaya, serta pemeliharaan dan pengembangan kesenian.
69	Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	8	UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Jl. Tukangan No.51		Melaksanakan ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas di bidang pengelolaan kawasan cagar budaya.
70	Pengelolaan Taman Budaya	11	UPT Pengelolaan Taman Budaya Jl Panembahan Senopati 1-3		Melaksanakan ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas di bidang pengelolaan Taman Budaya yang meliputi Taman Pintar dan Taman Budaya Embung Giwangan.

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi	Kontak	Keterangan
71	BEKO Pol PP	6	Kantor Kemantren Gondomanan	Bp Indra	Kesiapsiagaan
72	Linmas Kemantren	17	Kantor Kemantren Gondomanan	Bp Harry	Kedaruratan dan Logistik
73	Relawan	2	Kantor Kemantren Gondomanan	Bp Antok	Dapur Umum, memasang dan membongkar tenda
74	Kampung Tanggap Bencana		Kampung Prawirodirjan, Kampung Yudonegaran, Kampung Sayidan, Kampung Ratmakan, Kampung Ngupasan , Kampung Ketandan dan Kampung Kauman		Personel KTB yang sudah dilatih dengan simulasi tanggap bencana
75	Kampung Tanggap Bencana	280	Kampung Jlagran, Kelurahan Pringgokusuman,		Personel KTB yang sudah dilatih dengan simulasi tanggap bencana

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi	Kontak	Keterangan
			Kemantren Gedongtengen		
76	Kelurahan Tanggap Bencana	20	Kelurahan Pringgokusuman, Kemantren Ngampilan		Personel Kaltana yang sudah dilatih dengan simulasi tanggap bencana
77	Taruna Tanggap Bencana	10	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang menunjuk di Kemantren Ngampilan		Personel Tagana yang sudah dilatih dengan simulasi tanggap bencana
78	Linmas	Patehan (30), Kadipate n (30), Panemba han (40)	Kelurahan Patehan, Kelurahan Panembahan, Kelurahan Kadipaten		Personel linmas yang sudah mengikuti pembinaan rutin.

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi	Kontak	Keterangan
79	Kampung Tangguh Bencana	12 Kampung	Kelurahan Patehan, Panembahan, Kadipaten		Terbentuk sesuai SK dan sudah dilatih dengan simulasi tanggap bencana
80	Kelurahan Tangguh Bencana	3 Kelurahan	Kelurahan Patehan, Panembahan, Kadipaten		Terbentuk sesuai SK dan sudah dilatih dengan simulasi tanggap bencana
81	Relawan Pemadam Kebakaran	5 orang	Kelurahan Patehan, Panembahan, Kadipaten		Terbentuk sesuai SK Kota dan sudah dilatih dengan simulasi pemadam kebakaran
82	Pos Sekber	117 orang	Kemantren Kratron		Terdiri dari beberapa komponen/unsur relawan di Kemantren Kraton
83	Kampung Tangguh Bencana	35 Orang	Kampung Tegalrejo, Kelurahan Tegalrejo, Kemantren Tegalrejo		Personel KTB yang sudah dilatih dengan simulasi tanggap bencana

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi	Kontak	Keterangan
84	Kampung Tangguh Bencana	20	Kampung Sudagaran, Kelurahan Tegalrejo, Kemantren Tegalrejo		Personel Kaltana yang sudah dilatih dengan simulasi tanggap bencana
85	Kampung Tangguh Bencana	30	Kampung Demakan, Kelurahan Tegalrejo, Kemantren Tegalrejo		Personel Tagana yang sudah dilatih dengan simulasi tanggap bencana
86	Kampung Tangguh Bencana	20 Orang	Kampung Tompeyan, Kelurahan Tegalrejo, Kemantren Tegalrejo		Personel KTB yang sudah dilatih dengan simulasi tanggap bencana
87	Kampung Tangguh Bencana	20	Kampung Sidomulyo, Kelurahan Bener, Kemantren Tegalrejo		Personel Kaltana yang sudah dilatih dengan simulasi tanggap bencana
88	Kampung Tangguh Bencana	10	Kampung Bener, Kelurahan Bener, Kemantren Tegalrejo		Personel Tagana yang sudah dilatih dengan simulasi tanggap bencana

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi	Kontak	Keterangan
89	Kampung Tangguh Bencana	30	Kampung Bangunrejo, Kelurahan Kricak, Kemantren Tegalrejo		Personel KTB yang sudah dilatih dengan simulasi tanggap bencana
90	Kampung Tangguh Bencana	35	Kampung Kricak Kidul, Kelurahan Kricak, Kemantren Tegalrejo		Personel KTB yang sudah dilatih dengan simulasi tanggap bencana
91	Kampung Tangguh Bencana	30	Kampung Jatimulyo, Kelurahan Kricak, Kemantren Tegalrejo		Personel KTB yang sudah dilatih dengan simulasi tanggap bencana
92	Kampung Tangguh Bencana	10	Kampung Karangwaru Lor, Kelurahan Karangwaru, Kemantren Tegalrejo		Personel KTB yang sudah dilatih dengan simulasi tanggap bencana
93	Kampung Tangguh Bencana	25	Kampung Blunyahrejo, Kelurahan Karangwaru, Kemantren Tegalrejo		Personel KTB yang sudah dilatih dengan simulasi tanggap bencana

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi	Kontak	Keterangan
94	Kampung Tangguh Bencana	20	Kampung Bangirejo, Kelurahan Karangwaru, Kemantren Tegalrejo		Personel KTB yang sudah dilatih dengan simulasi tanggap bencana
95	Kampung Tangguh Bencana	30	Kampung Karangwaru Kidul, Kelurahan Karangwaru, Kemantren Tegalrejo		Personel KTB yang sudah dilatih dengan simulasi tanggap bencana
96	Kampung Tangguh Bencana	30	Kampung Petinggen, Kelurahan Karangwaru, Kemantren Tegalrejo		Personel KTB yang sudah dilatih dengan simulasi tanggap bencana
97	Kelurahan Tanggap Bencana	5	Kelurahan Kricak, Kemantren Tegalrejo		Personel KTB yang sudah dilatih dengan simulasi tanggap bencana
98	Kelurahan Tanggap Bencana	3	Kelurahan Karangwaru Kemantren Tegalrejo		Personel KTB yang sudah dilatih dengan simulasi tanggap bencana

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi	Kontak	Keterangan
99	Penggunaan APAR	70	Kelurahan Se-Kemantren Umbulharjo		Penggunaan alat pemadam api ringan
100	Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	70	Kelurahan Se-Kemantren Umbulharjo		Penyelamatan seseorang dalam kondisi darurat
101	Memasang Tenda	19 Kampung	Kelurahan Se-Kemantren Umbulharjo		Dapur Umum, memasang dan membongkar tenda
102	Penggunaan Senso	19 Kampung	Kelurahan Se-Kemantren Umbulharjo		Penggunaan alat senso jika terdapat kejadian pohon tumbang
103	Tim Kubur Capat	9	Sorosutan	Muhammad Zulazmi, S.STP 08112501780	Mengubur orang meninggal dan membantu pertolongan cepat ke RS
104	Kampung Tanggap Bencana	108 Orang	Kampung Pingit, Kampung Bumijo,		Personel KTB yang sudah dilatih dengan

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi	Kontak	Keterangan
			Kampung Badran, Kampung Cokrodingratan, Kampung Jetisharjo, KTB Cokrokusuman, Kampung Penumping, Kampung Gowongan, dan Kampung Jogoyudan		simulasi tanggap bencana
105	Kelurahan Tanggap Bencana	30	Kelurahan Bumijo, Kemantren Gowongan, Kelurahan Cokrodingratan		Personel Kaltana yang sudah dilatih dengan simulasi tanggap bencana
106	Taruna Tanggap Bencana	10	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang menunjuk di Kemantren Jetis		Personel Tagana yang sudah dilatih dengan simulasi tanggap bencana

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi	Kontak	Keterangan
107	Kampung Tangguh Bencana	Masing-masing KTB memiliki 30 anggota, baik anggota aktif dan tidak aktif	<p>Kelurahan keparakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kampung Dipowinatan 2. Kampung Pujokusuman 3. Kampung Keparakan lor 4. Kampung Keparakan kidul <p>Kelurahan Wirogunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kampung Bintaran 2. Kampung Surokarsan 3. Kampung Wirogunan 4. Kampung Joyonegaran 5. Kampung Nyutran 6. Kampung Mergangsan lor 7. kampung Mergangsan kidul 		Anggota KTB sudah dibekali ilmu tentang kebencanaan, baik pra, saat dan pasca bencana dengan mempraktekkan kegiatan melalui simulasi bencana sesuai ancaman terbesar di wilayah KTB tersebut

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi	Kontak	Keterangan
			Kelurahan Brontokusuman 1. Kampung Timuran 2. Kampung Brontokusuman 3. Kampung Prawirotaman 4. Kampung Karangajen 5. Kampung Karanganyar 6. Kampung Lowanu		
108	Kelurahan Tangguh Bencana	Masing-masing KTB memiliki 20 anggota, baik anggota aktif dan tidak aktif diambil dari anggota KTB di	1. KALTANA KEPARAKAN KALTANA BRONTOKUSUMAN		Anggota KALTANA sudah dibekali ilmu tentang kebencanaan, baik pra, saat dan pasca bencana dengan mempraktekkan kegiatan melalui simulasi bencana sesuai ancaman terbesar di wilayah KALTANA tersebut

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi	Kontak	Keterangan
		kelurahan tersebut			
109	Forum Kampung Tangguh Bencana	Memiliki 20 anggota, baik anggota aktif dan tidak aktif diambil dari perwakilan anggota KTB di Kemantran.	FPRB MERGANGSAN		Sebagai wadah silaturahmi antar KTB dan Kaltana, saling tukar informasi dan mengajukan pelatihan di tingkat kemandren
110	Taruna Siaga Bencana	5 personel	Bergilir piket di induk posko TAGANA Kota Yogyakarta		Dibekali pelatihan dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi	Kontak	Keterangan
111	Kelurahan Siaga (KESI)	25 personel terdiri dari tokoh masyarak at, PKK dan elemen masyarak at lainnya di tingkat Keluraha n	Kantor Kelurahan masing-masing		Pelatihan melalui kegiatan PKK di tingkat Kelurahan.
112	Mergangsan Radio Community				Relawan yang berbasis pada komunikasi penggunaan HT

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi	Kontak	Keterangan
113	REDKAR	15 Personel masing- masing Keluraha n			Relawan Kebakaran
114	Funrising (Bidang 1)	2	Kantor Baznas Kota Yogyakarta		Mencari Bantuan dengan Penggalangan Donasi
115	Pentasyarufan (Bidang 2)	4	Kantor Baznas Kota Yogyakarta		Tim Pemberi bantuan
116	Laporan dan Perencanaan (Bidang 3)	2	Kantor Baznas Kota Yogyakarta		Pencatatan dana pemasukan dan pengeluaran
117	SDM (bidang 4)	3	Kantor Baznas Kota Yogyakarta		Tim Humas
118	Tim Reaksi Cepat	15 Orang	Kantor BPBD Kota Yogyakarta		

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi	Kontak	Keterangan
119	Tim Mobil Jenazah	7 Orang	Kantor BPBD Kota Yogyakarta		
120	Analisis Kebijakan Ahli Muda	2 orang	Kantor BPBD Kota Yogyakarta		
121	Penelaah Teknis Kebijakan	3 Orang	Kantor BPBD Kota Yogyakarta		
122	Penata Layanan Operasional	3 Orang	Kantor BPBD Kota Yogyakarta		
123	Analisis Kebencanaan	1 Orang	Kantor BPBD Kota Yogyakarta		
124	Health Emergency Officer	4 Orang	Dinas Kesehatan		
125	Disaster Management Team	6 Orang	Dinas Kesehatan 2 Orang, PSC 1 Orang, Puskesmas 2 orang, RSUD 1 orang		
126	TGC KLB Penyakit	22 Orang	Dinas Kesehatan 4 orang dan Puskesmas 18 orang		

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi	Kontak	Keterangan
127	Surveilans Penyakit	18 Orang	Puskesmas 18 orang		
128	Pemangkasan Pohon	10 Orang	Dinas Lingkungan Hidup		
129	K3	1 Orang	Kantor PLN ULP Yogyakarta Kota		
130	Engineer	2 Orang	Kantor PLN ULP Yogyakarta Kota		
131	Teknisi	70 Orang	Kantor PLN ULP Yogyakarta Kota		
132	Linmas	Patehan (30), Kadipate n (30), Panemba han (40)	Kelurahan Patehan, Kelurahan Panembahan, Kelurahan Kadipaten		Personel linmas yang sudah mengikuti pembinaan rutin
133	Kampung Tangguh Bencana	12 Kampun g	Kelurahan Patehan, Panembahan, Kadipaten		Terbentuk sesuai SK dan sudah dilatih dengan simulasi tanggap bencana

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi	Kontak	Keterangan
134	Kelurahan Tangguh Bencana	3 Kelurahan	Kelurahan Patehan, Panembahan, Kadipaten		Terbentuk sesuai SK dan sudah dilatih dengan simulasi tanggap bencana
135	Relawan Pemadam Kebakaran	5 Orang	Kelurahan Patehan, Panembahan, Kadipaten		Terbentuk sesuai SK Kota dan sudah dilatih dengan simulasi pemadam kebakaran
136	Pos Sekber	117 Orang	Kemantren Kraton		Terdiri dari beberapa komponen/unsur relawan di Kemantren Kraton

B. Ketersediaan Sumber Daya Peralatan

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
1	APAR	Tersedia di setiap sudut gedung	Baik	Mal Pelayanan Publik dan Kantor DPMPTSP Lt 2 dan 3	Made Ayu Dinda Cintya Bella, S.H (085747734719)	Bisa digunakan untuk memadamkan api ringan
2	Senso	2	Baik	Kantor Lembaga Resiliensi Bencana (LRB) / Muhammadiyah Disaster Manajemen Center (MDMC) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Yogyakarta, Jl. Sultan Agung No.14, Wirogunan, Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah	Hatta Effendi 081331466899	
3	Figur X	2	Baik			
4	Carabiner sekru baru	4	Baik			
5	Carabiner oval	4	Baik			
6	Sarung tangan	4	Baik			
7	Body pack	1	Baik			
8	Tabung pemadam	1	Baik			
9	Rompi Relawan	5	Baik			

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
10	Tandu	1	Baik	Istimewa Yogyakarta 55151		
11	bidai dan mitela	1	Baik			
12	ambulance jenazah	1	Baik			
13	ambulance sakit	1	Baik			
14	Golok Tebas	4	Baik			
15	Set Cooking Set, Kompur portable, Kompas, Dry Bag	4	Baik			
16	P3K, Raincoat	4	Baik			
17	Set Webbing, headlamp,	4	Baik			

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
	baterai AAA rechargeable					
18	Set tali paracord, gas portable, sleeping bag	4	Baik			
19	Sepatu hiking	4	Baik			
20	Matras alumunium foil	4	Baik			
21	Carrier Hikemore 60 Liter	4	Baik			
22	Daypack	4	Baik			
23	Handy talky	4	Baik			
24	Pisau lipat	4	Baik			

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
25	APAR	8	BAIK	Dinas Komunikasi Informatika Dan persandian	Suciati Sah, S.T., M.M (081578704372)	Bisa digunakan untuk memadamkan api ringan
26	FM 200	1	BAIK	Dinas Komunikasi Informatika Dan persandian		digunakan untuk memadamkan api di ruangan pusat data
27	Mobil APV	1	Baik	Kantor Bappeda	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN	Bisa dimobilisasi dengan bantuan BBM
28	Mobil LGX	1	Baik	Kantor Bappeda	KEPEGAWAIAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Bisa dimobilisasi dengan bantuan BBM
29	Mobil Avanza	1	Baik	Kantor Bappeda	DAERAH (0274)515865	Bisa dimobilisasi dengan bantuan BBM

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
30	Mobil Innova	1	Baik	Kantor Bappeda		Bisa dimobilisasi dengan bantuan BBM
31	APAR	4	Baik,	Kantor Bappeda		Bisa digunakan untuk memadamkan api ringan
32	Truck Tangki	2	Baik	Kantor Perumda PDAM Tirtamarta	GALIH SATRIO BRAHMANTYO, S.E. (+62 857-2951-5938)	Bisa dimobilisasi dengan bantuan BBM
33	Ambulance Gawat Darurat	1	Baik	RSUD Kota Yogyakarta	LILLA ERYANI, SE, MPH (081225756502)	Bisa digunakan untuk evakuasi bencana
34	Mobil Dinas Jabatan	1	Baik	Dinas Pariwisata	081328568877	Kepala Dinas

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
35	Mobil Operasional	3	Baik	Dinas Pariwisata	087793561940	Bisa dimobilisasi dengan bantuan BBM
36	Sepeda motor operasional	7	Baik	Dinas Pariwisata	087793561940	Bisa dimobilisasi dengan bantuan BBM
37	Hand sprayer	2	baik	Dinas Pariwisata	087793561940	Siap pakai
38	Tabung gas 12 kg	1	baik	Dinas Pariwisata	087793561940	Siap pakai
39	Genset 5000 watt	1	Rusak ringan	Dinas Pariwisata	087793561940	Bisa dimobilisasi dengan bantuan BBM
40	Sound Portable	2	baik	Dinas Pariwisata	087793561940	Siap pakai
41	Thermogun	2	baik	Dinas Pariwisata	087793561940	Siap pakai
42	kamera	1	baik	Dinas Pariwisata	087793561940	Siap pakai
43	APAR	8		Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta		

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
44	Mobil Hilux	2	Baik	Kantor Satpol PP	Kabid Linmas	Bisa dimobilisasi dengan bantuan BBM
45	Mobil Grandmax	1	Baik	Kantor Satpol PP	Kabid Linmas	Bisa dimobilisasi dengan bantuan BBM
46	Ambulance	5	Baik	Markas PMI Kota Yogyakarta		Bisa digunakan untuk evakuasi bencana dan mobilisasi dengan bantuan BBM
47	Motor	1	Baik	Markas PMI Kota Yogyakarta		Bisa digunakan untuk Asesmen dan mobilisasi dengan bantuan BBM
48	HT	5	Baik	Markas PMI Kota Yogyakarta		Bisa digunakan untuk komunikasi
49	Mobil Pick up	1	Baik	Markas PMI Kota Yogyakarta		Bisa digunakan untuk mobilisasi

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
						dengan bantuan BBM
50	Mobil Pick Up	1 unit	Baik	Kemantren		
51	Roda 3 Viar	2 unit	Baik	Kemantren /Kel.BS		
52	APAR	11 unit	Baik	Kemantren 4 tab Kelurahan Sy 1 tab Kelurahan TP. 5 tab Kelurahan BS.1 tab		
54	Pompa KOJING	1 unit	Baik	Kelurahan Bausasran		
55	Roda 3 Viar	2 unit	Baik	Kantor Kemantren Kotagede		Bisa digunakan untuk evakuasi bencana dan mobilisasi dengan bantuan BBM
56	Mobil BEKO	1 unit	Baik	Kantor Kemantren Kotagede		Bisa digunakan untuk evakuasi bencana dan

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
						mobilisasi dengan bantuan BBM
57	Apar	1 unit	Baik	Kantor Kemantren Kotagede		Bisa digunakan apabila dibutuhkan
58	HT	2 unit	Baik	Kantor Kemantren Kotagede		Bisa digunakan apabila dibutuhkan
59	Mobil Pick Up	1 unit	Baik	Kantor Kemantren		
60	Roda 3 Viar	2 unit	Baik	Kantor Kemantren		
61	APAR		Baik	Kantor Kemantren		
62	Motor Viar	1	Cukup	Kemantren Pakualaman		Bisa digunakan untuk evakuasi bencana dan mobilisasi dengan bantuan BBM
63	Mobil ex BEKO	1	Cukup	Kemantren Pakualaman		Bisa digunakan untuk mobilisasi

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
						dengan bantuan BBM
64	APAR	26	Cukup	Kemantren Pakualaman		Bisa digunakan untuk memadamkan api ringan
65	APD	24 unit	Baik	Kantor BPBD Kota Yogyakarta		Bisa digunakan
66	HT	10 unit	Baik	Kantor BPBD Kota Yogyakarta		Bisa digunakan
67	Senter Rescue	5 unit	Baik	Kantor BPBD Kota Yogyakarta		Bisa digunakan
68	Perahu	5 unit	Baik	Kantor BPBD Kota Yogyakarta		Bisa digunakan
69	Tenda Pengungsi	4 unit	Baik	Kantor BPBD Kota Yogyakarta		Bisa digunakan
70	Trail	2 unit	Baik	Kantor BPBD Kota Yogyakarta		Bisa digunakan untuk mobilisasi

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
						dengan bantuan BBM
71	Ranger	1 unit	Baik	Kantor BPBD Kota Yogyakarta		Bisa digunakan untuk mobilisasi dengan bantuan BBM
72	Truk	1 unit	Baik	Kantor BPBD Kota Yogyakarta		Bisa digunakan untuk mobilisasi dengan bantuan BBM
73	Pickup	1 unit	Baik	Kantor BPBD Kota Yogyakarta		Bisa digunakan untuk mobilisasi dengan bantuan BBM
74	Mobil box	1 unit	Baik	Kantor BPBD Kota Yogyakarta		Bisa digunakan untuk mobilisasi dengan bantuan BBM

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
75	Chainsaw	7 unit	Baik	Kantor BPBD Kota Yogyakarta		Bisa digunakan untuk mobilisasi dengan bantuan BBM
76	Water rescue	12 unit	Baik	Kantor BPBD Kota Yogyakarta		Bisa digunakan
77	Vertikal rescue	3 unit	Baik	Kantor BPBD Kota Yogyakarta		Bisa digunakan
78	Mobil Tangga	1	Baik	Dinas Damkarmat	Kepala Seksi Ops. Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (085747432450)	Bisa digunakan untuk evakuasi dan Pemadaman
79	Mobil Pemadam	10	Baik	Dinas Damkarmat		Digunakan Untuk Operasi Pemadaman
80	Mobil Rescue	2	Baik	Dinas Damkarmat		Digunakan untuk Evakuasi dan Penyelamatan dilengkapi dengan peralatan Rescue

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
81	Mobil Komando Operasi komunikasi	1	Baik	Dinas Damkarmat		Bisa digunakan untuk Memperkuat Jaringan Komunikasi HT UHF dilengkapi Repeater
82	Motor Pemadam	2	Baik	Dinas Damkarmat		Digunakan Untuk Kebakaran di Jalan raya dan yang Terkendala Akses Jalan sempit
83	Rescue Tools / Power Lucas	2	Baik	Dinas Damkarmat		Digunakan Untuk Proses Evakuasi
84	Pompa Apung Portable	1	Baik	Dinas Damkarmat		Digunakan Untuk Menghisap Sumber Air di daerah yg tidak bisa di akses Unit

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
85	Tenda Pleton	1	Baik	Dinas Damkarmat		Bisa Digunakan Untuk Keadaan Darurat
86	HT UHF	30	Baik	Dinas Damkarmat		Digunakan Untuk Komunikasi Personel
87	APAR	20 tabung	Baik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Bisa digunakan untuk memadamkan api ringan
88	Truk Tangki Air	9	Baik	DLH	RAIHAN RADYA PRADANA 085727194951	
89	Dump Truk	4				
90	Mobil Pick Up	3				
91	Tosa	7				
92	Chainsaw	7				

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
93	Pompa air	3				
94	Genset	1				
95	Lampu Sorot	3				
96	Crane	2				
97	Pengelolaan Sampah	4				
98	Mobil Ambulans	18	Puskesmas Kota Yogyakarta	Baik	Dinas Kesehatan	Bisa digunakan untuk evakuasi bencana dan mobilisasi dengan bantuan BBM
99	Mobil ambulans	5	PSC Kota Yogyakarta	4 baik 1 butuh perawatan		Butuh perbaikan/servis untuk mengganti komponen tertentu
100	Mobil tangki limbah	1	Baik	Kantor Dinas Kesehatan Kota		Bisa digunakan untuk mobilisasi

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
				Yogyakarta		dengan bantuan BBM
101	Tenda Posko	2	Perlu perbaikan	Kantor BPBD Kota Yogyakarta		Bisa digunakan untuk posko darurat tim Kesehatan
102	Genset 5 kva	3	Baik	PSC Kota Yogyakarta		Bisa digunakan sebagai Cadangan listrik
103	Oxygen concentrator	18	Baik	PSC Kota Yogyakarta		Oxygen concentrator
104	Apar	5	Baik	Kantor Dukcapil		
105	Genset	1	Baik	Kantor Dukcapil		Bisa digunakan dengan mobilisasi BBM
106	Minibus Carry	1	Baik	Kantor Dukcapil		Bisa digunakan dengan mobilisasi BBM

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
107	Mobil Gangguan	6	Baik	Kantor PLN Kota Yogyakarta		
108	Truck Crane Gangguan	1	Baik	Bantul		
109	Mobil Dinas Jabatan	1	Baik	Kantor Dinas Kebudayaan (Kundha kabudayan) Kota Yogyakarta		Kepala Dinas
110	Mobil Operasional	4	Baik	Kantor Dinas Kebudayaan (Kundha kabudayan) Kota Yogyakarta		Bisa digunakan untuk mobilisasi dengan bantuan BBM
111	Sepeda motor operasional	7	Baik	Kantor Dinas Kebudayaan (Kundha kabudayan) Kota Yogyakarta		Bisa digunakan untuk mobilisasi dengan bantuan BBM
112	Speaker portable	2	Baik	Kantor Dinas Kebudayaan (Kundha kabudayan) Kota Yogyakarta		Bisa digunakan untuk mobilisasi dengan bantuan BBM

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
113	Thermogun	10	Baik	Kantor Dinas Kebudayaan (<i>Kundha kabudayan</i>) Kota Yogyakarta		Siap Pakai
114	Kamera	2	Baik	Kantor Dinas Kebudayaan (<i>Kundha kabudayan</i>) Kota Yogyakarta		Siap Pakai
115	Mobil BEKO	1	Baik	Kemantren Gondomanan		
116	Motor Tossa	1	Baik	Kemantren Gondomanan		
117	APAR	3	Baik	Kemantren Gondomanan		
118	Mobil BEKO	1	Baik	Kemantren Gedongtengen		Bisa digunakan untuk evakuasi bencana dan mobilisasi dengan bantuan BBM
119	Motor Vlar roda 3	1	Baik	Kemantren Gedongtengen		Bisa digunakan untuk evakuasi bencana dan

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
						mobilisasi dengan bantuan BBM
120	APAR	40	Baik	Kemantren 4 tab Kelurahan Sosro, 14 tab Kelurahan Pringgo		Bisa digunakan untuk memadamkan api ringan
121	Pompa KOJING	1	Baik	Kampung Notoyudan		Bisa digunakan untuk memadamkan api sedang
122	Gergaji Mesin	1	Baik	Kemantren Gedongtengen		
123	Genset	1	Baik	Kelurahan Sosromenduran		Bisa digunakan untuk pembangkit listrik
124	Mobil Pick Up	1	Baik	Kantor Kemantren Kraton		
125	Roda 3 Viar	14	Baik	Kantor Kemantren Kraton dan KTB		
126	APAR	50	Baik	Kantor Kemantren		

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
				Kraton, RW, Kelurahan		
127	HT	100	Baik	Masing-masing Kampung di Kemantren Kraton		
128	Gergaji Mesin	12	Baik	Masing-masing KTB di Kemantren Kraton		
129	Roda 3 Viar	13	Baik	Masing-masing KTB di Kemantren Tegalrejo		Bisa digunakan untuk evakuasi bencana dan mobilisasi dengan bantuan BBM
130	Chainsaw	14	Baik	Masing-masing KTB di Kemantren Tegalrejo		Bisa digunakan
131	HT	58	Baik	Masing-masing KTB di Kemantren Tegalrejo		Bisa digunakan untuk Komunikasi
132	Genset	14		Masing-masing KTB di Kemantren Tegalrejo		Listrik Portable dengan BBM

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
133	Pompa air	14	Baik	Masing-masing KTB di Kemantren Tegalrejo		Menyedot Banjir
134	Motor Roda 3	19	Baik	Masing-masing Kampung di Kelurahan Umbulharjo		Bisa dimobilisasi
135	Mobil Ambulance	2	Baik	Kelurahan Sorosutan		Bisa dimobilisasi
136	Senso	19	Baik	Masing-masing Kampung di Kelurahan Umbulharjo		Bisa dimobilisasi
137	HT	95	Baik	Masing-masing Kampung di Kelurahan Umbulharjo		Bisa dimobilisasi
138	Mobil BEKO	1	Baik	Kemantren Umbulharjo		Bisa dimobilisasi
139	Mobil BEKO	1	Baik	Kantor Kemantren Jetis		Bisa digunakan untuk evakuasi bencana dan

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
						mobilisasi dengan bantuan BBM
140	Roda 3 Viar	3	Baik	Kantor Kemantren Jetis		Bisa digunakan untuk mobilisasi dengan bantuan BBM
141	APAR	2	Baik	Kantor Kemantren Jetis		Bisa digunakan untuk memadamkan api ringan
142	Sinco	1	Baik	Kantor Kemantren Jetis		Untuk mengantisipasi bila ada pohon tumbang
143	Genset	1	Baik	Kantor Kemantren Jetis		Untuk penerangan darurat bila diperlukan
144	Pompa air	1	baik	Kantor Kemantren Jetis		Untuk menyedot bila ada banjir di Wilayah

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
145	Mobil Pick Up	1 unit	Baik	Kantor Kemantren		
146	Roda 3 Viar	1 unit	Baik	Kantor Kemantren		
147	APAR		Baik	Kantor Kemantren		
148	APAR RW		Baik	Masing-masing RW se Kemantren		
149	APAR REDKAR	9 unit	baik	Masing-masing Koordinator redkar kelurahan		3 unit per kelurahan
150	HT REDKAR	4 unit	Baik	Koordinator REDKAR kelurahan dan Kemantren		1 unit dibawa koordinator
151	Hidran Kering		Baik	Wilayah Kampung Karanganyar		
152	Kojing (Kompa Jinjing)	1 unit	Baik	REDKAR Kelurahan Keparakan		
153	Roda 3 KTB	1 unit	Baik	Kampung Dipowinatan		

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
154	Roda 3 KTB	1 unit	Baik	Kampung Pujokusuman		
155	Roda 3 KTB	1 unit	Perlu perbaikan	Kampung Keparakan lor		Mesin kendaraan sudah tidak berfungsi dengan baik
156	Roda 3 KTB	1 unit	Baik	Kampung Keparakan Kidul		
157	Roda 3 KTB	1 unit	Perlu perbaikan	Kampung Bintaran		Beberapa onderdil yang vital rusak
158	Roda 3 KTB	1 unit	Baik	Kampung Surokarsan		
159	Roda 3 KTB	1 unit	Baik	Kampung Wirogunan		
160	Roda 3 KTB	1 unit	Perlu perbaikan	Kampung Joyonegaran		Kondisi kendaraan dengan usia lebih dari 10 tahun digunakan oleh semua orang di kampung tersebut.

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
161	Roda 3 KTB	1 unit	Baik	Kampung Mergangsan lor		
162	Roda 3 KTB	1 unit	Baik	Kampung Prawirotaman		
163	Roda 3 KTB	1 unit	Baik	Kampung Karangajen		
164	Roda 3 KTB	1 unit	Baik	Kampung Karanganyar		
165	Roda 3 KTB	1 unit	Baik	Kampung Lowanu		
166	Roda 3 KTB	1 unit	Baik	Kampung Brontokusuman		
167	Pompa Air	1 unit	Baik	Kampung Dipowinatan		
168	Pompa Air	1 unit	Baik	Kampung Pujokusuman		
169	Pompa Air	1 unit	Kurang baik	Kampung Keparakan lor		
170	Pompa Air	1 unit	Baik	Kampung Keparakan Kidul		

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
171	Pompa Air	1 unit	Kurang baik	Kampung Bintaran		
172	Pompa Air	1 unit	Baik	Kampung Surokarsan		
173	Pompa Air	1 unit	Baik	Kampung Wirogunan		
174	Pompa Air	1 unit	Kurang baik	Kampung Joyonegaran		
175	Pompa Air	1 unit	Baik	Kampung Mergangsan lor		
176	Pompa Air	1 unit	Baik	Kampung Prawirotaman		
177	Pompa Air	1 unit	Baik	Kampung Karangajen		
178	Pompa Air	1 unit	Baik	Kampung Karanganyar		
179	Pompa Air	1 unit	Baik	Kampung Lowanu		
180	Pompa Air	1 unit	Baik	Kampung Brontokusuman		

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
181	Genset	1 unit	Baik	Kampung Dipowinatan		
182	Genset	1 unit	Baik	Kampung Pujokusuman		
183	Genset	1 unit	Baik	Kampung Keparakan lor		
184	Genset	1 unit	Kurang Baik	Kampung Keparakan Kidul		Perlu perawatan
185	Genset	1 unit	Baik	Kampung Bintaran		
186	Genset	1 unit	Baik	Kampung Surokarsan		
187	Genset	1 unit	Baik	Kampung Wirogunan		
188	Genset	1 unit	Kurang Baik	Kampung Joyonegaran		Perlu perawatan
189	Genset	1 unit	Baik	Kampung Mergangsang lor		
190	Genset	1 unit	Baik	Kampung Prawirotaman		

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
191	Genset	1 unit	Baik	Kampung Karangajen		
192	Genset	1 unit	Baik	Kampung Karanganyar		
193	Genset	1 unit	Baik	Kampung Lowanu		
194	Genset	1 unit	Baik	Kampung Brontokusuman		
195	Chainsaw	1 unit	Baik	Kampung Dipowinatan		
196	Chainsaw	1 unit	Baik	Kampung Pujokusuman		
197	Chainsaw	1 unit	Kurang baik	Kampung Keparakan lor		
198	Chainsaw	1 unit	Baik	Kampung Keparakan Kidul		
199	Chainsaw	1 unit	Kurang baik	Kampung Bintaran		
200	Chainsaw	1 unit	Kurang baik	Kampung Surokarsan		

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
201	Chainsaw	1 unit	Baik	Kampung Wirogunan		
202	Chainsaw	1 unit	Kurang baik	Kampung Joyonegaran		
203	Chainsaw	1 unit	Baik	Kampung Mergangsan lor		
204	Chainsaw	1 unit	Baik	Kampung Prawirotaman		
205	Chainsaw	1 unit	Baik	Kampung Karangajen		
206	Chainsaw	1 unit	Baik	Kampung Karanganyar		
207	Chainsaw	1 unit	Baik	Kampung Lowanu		
208	Chainsaw	1 unit	Rusak	Kampung Brontokusuman		
209	Vertical Rescue	1 Unit	Baik	Kampung Dipowinatan		
210	Vertical Rescue	1 Unit	Baik	Kampung Pujokusuman		

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
211	Vertical Rescue	1 Unit	Baik	Kampung Keparakan lor		
212	Vertical Rescue	1 Unit	Rusak	Kampung Keparakan Kidul		
213	Vertical Rescue	1 Unit	Baik	Kampung Surokarsan		
214	Vertical Rescue	1 Unit	Baik	Kampung Wirogunan		
215	Vertical Rescue	1 Unit	Baik	Kampung Joyonegaran		
216	Vertical Rescue	1 Unit	Baik	Kampung Mergangsan lor		
217	Vertical Rescue	1 Unit	Baik	Kampung Prawirotaman		
218	Vertical Rescue	1 Unit	Baik	Kampung Karangajen		
219	Vertical Rescue	1 Unit	Baik	Kampung Karanganyar		
220	Vertical Rescue	1 Unit	Baik	Kampung Lowanu		

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
221	Vertical Rescue	1 Unit	Baik	Kampung Brontokusuman		
222	HT KTB	5 Unit	Baik	Kampung Dipowinatan		
223	HT KTB	5 Unit	Baik	Kampung Pujokusuman		
224	HT KTB	2 Unit	Baik	Kampung Keparakan lor		
225	HT KTB	4 Unit	2 baik 2 rusak	Kampung Keparakan Kidul		
226	HT KTB	5 Unit	4 Baik 1 rusak	Kampung Bintaran		
227	HT KTB	3 Unit	Baik	Kampung Surokarsan		
228	HT KTB	5 Unit	Baik	Kampung Wirogunan		
229	HT KTB	2 Unit	rusak	Kampung Joyonegaran		
230	HT KTB	5 Unit	Kurang bergungsi dengan baik	Kampung Mergangsan lor		

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
231	HT KTB	5 Unit	Baik	Kampung Prawirotaman		
232	HT KTB	5 Unit	Baik	Kampung Karangkajen		
233	HT KTB	2 Unit	Kurang bergungsi dengan baik	Kampung Karanganyar		
234	HT KTB	5 Unit	Kurang bergungsi dengan baik	Kampung Lowanu		
235	HT KTB	5 Unit	3 Baik 2 Kurang bergungsi dengan baik	Kampung Brontokusuman		
236	Tenda Pengungsi	2 Unit	Baik	KALTANA BRONTOKUSUMAN dan KTB LOWANU		Bantuan dari BPBD DIY
237	Long Spinal Board (Tandu)	1 unit	Baik	Kampung Dipowinatan		

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
238	Long Spinal Board (Tandu)	1 unit	Baik	Kampung Pujokusuman		
239	Long Spinal Board (Tandu)	1 unit	Baik	Kampung Keparakan lor		
240	Long Spinal Board (Tandu)	1 unit	Baik	Kampung Keparakan Kidul		
241	Long Spinal Board (Tandu)	1 unit	Baik	Kampung Bintaran		
242	Long Spinal Board (Tandu)	1 unit	Baik	Kampung Surokarsan		
243	Long Spinal Board (Tandu)	1 unit	Baik	Kampung Wirogunan		
244	Long Spinal Board (Tandu)	1 unit	Baik	Kampung Joyonegaran		
245	Long Spinal Board (Tandu)	1 unit	Baik	Kampung Mergangsan lor		

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
246	Long Spinal Board (Tandu)	1 unit	Baik	Kampung Prawirotaman		
247	Long Spinal Board (Tandu)	1 unit	Baik	Kampung Karangkajen		
248	Long Spinal Board (Tandu)	1 unit	Baik	Kampung Karanganyar		
249	Long Spinal Board (Tandu)	1 unit	Baik	Kampung Lowanu		
250	Long Spinal Board (Tandu)	1 unit	Baik	Kampung Brontokusuman		
251	Long Spinal Board (Tandu)	1 unit	Baik	Kampung Dipowinatan		
252	Long Spinal Board (Tandu)	1 unit	Baik	Kampung Pujokusuman		
253	Long Spinal Board (Tandu)	1 unit	Baik	Kampung Keparakan lor		

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
254	Long Spinal Board (Tandu)	1 unit	Baik	Kampung Keparakan Kidul		
255	Long Spinal Board (Tandu)	1 unit	Baik	Kampung Surokarsan		
256	Long Spinal Board (Tandu)	1 unit	Baik	Kampung Wirogunan		
257	Long Spinal Board (Tandu)	1 unit	Baik	Kampung Joyonegaran		
258	Long Spinal Board (Tandu)	1 unit	Baik	Kampung Mergangsan lor		
259	Long Spinal Board (Tandu)	1 unit	Baik	Kampung Prawirotaman		
260	Long Spinal Board (Tandu)	1 unit	Baik	Kampung Karangajen		
261	Long Spinal Board (Tandu)	1 unit	Baik	Kampung Karanganyar		

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
262	Long Spinal Board (Tandu)	1 unit	Baik	Kampung Lowanu		
263	Long Spinal Board (Tandu)	1 unit	Baik	Kampung Brontokusuman		
264	APAR	2 Tabung	Baik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)		Bisa digunakan untuk memadamkan api ringan
265	Mobil	3 Mobil	Baik	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)		Bisa digunakan untuk mobilisasi baik peralatan maupun manusia
266	Mobil Grand max	1	Baik	Parkiran Masjid Pangeran Diponegoro		Bisa digunakan untuk angkutan bantuan
267	APAR	1	Baik	Kantor Baznas Kota Yogyakarta		Bisa digunakan untuk memadamkan api ringan

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
268	APD	24 Unit	Baik	Kantor BPBD Kota Yogyakarta		Bisa Digunakan
269	HT	10 Unit	Baik	Kantor BPBD Kota Yogyakarta		Bisa Digunakan
270	Senter Rescue	5 Unit	Baik	Kantor BPBD Kota Yogyakarta		Bisa Digunakan
271	Perahu	5 Unit	Baik	Kantor BPBD Kota Yogyakarta		Bisa Digunakan
272	Tenda Pengungsi	4 Unit	Baik	Kantor BPBD Kota Yogyakarta		Bisa Digunakan
273	Trail	2 Unit	Baik	Kantor BPBD Kota Yogyakarta		Bisa Digunakan untuk mobilisasi dengan bantuan BBM
274	Ranger	1 Unit	Baik	Kantor BPBD Kota Yogyakarta		Bisa Digunakan untuk mobilisasi dengan bantuan BBM
275	Truk	1 Unit	Baik	Kantor BPBD Kota Yogyakarta		Bisa Digunakan untuk mobilisasi

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
						dengan bantuan BBM
276	Pickup	1 Unit	Baik	Kantor BPBD Kota Yogyakarta		Bisa Digunakan untuk mobilisasi dengan bantuan BBM
277	Mobil Box	1 Unit	Baik	Kantor BPBD Kota Yogyakarta		Bisa Digunakan untuk mobilisasi dengan bantuan BBM
278	Chainsaw	7 Unit	Baik	Kantor BPBD Kota Yogyakarta		Bisa Digunakan untuk mobilisasi dengan bantuan BBM
279	Water Rescue	12 Unit	Baik	Kantor BPBD Kota Yogyakarta		Bisa Digunakan
280	Vertikal Rescue	3 Unit	Baik	Kantor BPBD Kota Yogyakarta		Bisa Digunakan
281	Truk Tangki Air	9 Unit	Baik	Dinas Lingkungan Hidup		Bisa Digunakan untuk mobilisasi

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
						dengan bantuan BBM
282	Dump Truk	4 Unit	Baik	Dinas Lingkungan Hidup		Bisa Digunakan untuk mobilisasi dengan bantuan BBM
283	Mobil Pick Up	3 Unit	Baik	Dinas Lingkungan Hidup		Bisa Digunakan untuk mobilisasi dengan bantuan BBM
284	Tosa	7 Unit	Baik	Dinas Lingkungan Hidup		Bisa Digunakan untuk mobilisasi 285 dengan bantuan BBM
285	Chainsaw	7 Unit	Baik	Dinas Lingkungan Hidup		Bisa Digunakan untuk mobilisasi dengan bantuan BBM
286	Pompa Air	3 Unit	Baik	Dinas Lingkungan Hidup		Bisa Digunakan untuk mobilisasi

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
						dengan bantuan BBM
287	Genset	1 Unit	Baik	Dinas Lingkungan Hidup		Bisa Digunakan untuk mobilisasi dengan bantuan BBM
288	Lampu Sorot	3 Unit	Baik	Dinas Lingkungan Hidup		Bisa Digunakan untuk mobilisasi dengan bantuan BBM
289	Crane	2 Unit	Baik	Dinas Lingkungan Hidup		Bisa Digunakan untuk mobilisasi dengan bantuan BBM
290	Pengelolaan Sampah	4 Unit	Baik	Dinas Lingkungan Hidup		Bisa Digunakan untuk mobilisasi dengan bantuan BBM
291	Mobil Pick Up	1 Unit	Baik	Kantor Kemantren Kraton		Bisa Digunakan untuk mobilisasi

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
						dengan bantuan BBM
292	Roda 3 Viar	14 Unit	Baik	Kantor Kemantren Kraton dan KTB		Bisa Digunakan untuk mobilisasi dengan bantuan BBM
293	APAR	50 unit	Baik	RW, Kelurahan dan Kemantren		
294	HT	100 Unit	Baik	Masing-masing Kampung		
295	Gergaji Mesin	12 Unit	Baik	Masing-masing KTB		
296	Mobil Gangguan	6 Unit	Baik	Kantor PLN Kota Yogyakarta		
297	Truck Crane Gangguan	1 Unit	Baik	Bantul		Bisa Digunakan untuk mobilisasi dengan bantuan BBM

C. Ketersediaan Sumber daya Logistik

No	Jenis Logistik	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
1	Air mineral galon	7 buah	Layak	Mal Pelayanan Publik dan Kantor DPMPTSP	Made Ayu Dinda Cintya Bella, S.H (085747734719)	Tersedia
2	Obat-obatan	2 paket	Layak	Mall Pelayanan Publik	Made Ayu Dinda Cintya Bella, S.H (085747734719)	Tersedia
3	Masker	100				
4	Obat-obatan	1 paket	Baik			
5	Chain Saw/Gergaji Mesin	2	Baik	Kantor Satpol PP	Kabid Linmas	
6	Tali Carmantel	1	Layak	Kantor Satpol PP	Kabid Linmas	
7	Dragbar/Tandu	1	Layak	Kantor Satpol PP	Kabid Linmas	
8	Helm Rescue	20	Layak	Kantor Satpol PP	Kabid Linmas	

No	Jenis Logistik	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
9	Pelampung	10	Layak	Kantor Satpol PP	Kabid Linmas	
10	Sepatu Boot	5	Layak	Kantor Satpol PP	Kabid Linmas	
11	Hygiene Kit (Pakaian Bayi, Selimut)	50	Layak	Gudang Markas PMI Kota Yogyakarta		Tersedia dan siap untuk didistribusikan
12	Terpal	50 lembar	Layak	Gudang Markas PMI Kota Yogyakarta		Tersedia dan siap untuk didistribusikan
13	Paket Logistik Makanan	12	Layak	BPBD Kota Yogyakarta		Tersedia dan siap untuk didistribusikan
14	Selimut (BNPB)	61	Layak			Tersedia dan siap untuk didistribusikan
15	Terpal 5 X 7 m	88	Layak			Tersedia dan siap untuk didistribusikan
16	Terpal 6 X 8 m	33	Layak			Tersedia dan siap untuk didistribusikan

No	Jenis Logistik	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
17	Terpal 8 X 10 m	21	Layak			Tersedia dan siap untuk didistribusikan
18	Tikar	47	Layak			Tersedia dan siap untuk didistribusikan
19	Masker			Gudang farmasi dinkes kota yogyakarta	Dinas Kesehatan	Bisa dibagikan saat terjadi bencana
20	Madu			Gudang farmasi dinkes kota yogyakarta		Bisa dibagikan sebagai suplemen saat bencana
21	Sarung tangan latex			Gudang farmasi dinkes kota yogyakarta		Bisa dibagikan saat terjadi bencana
22	Obat-obatan			Gudang farmasi dinkes kota yogyakarta		Sesuai kejadian bencana
23	Oxygen Generator	22	baru	Gudang PSC 119 YES		

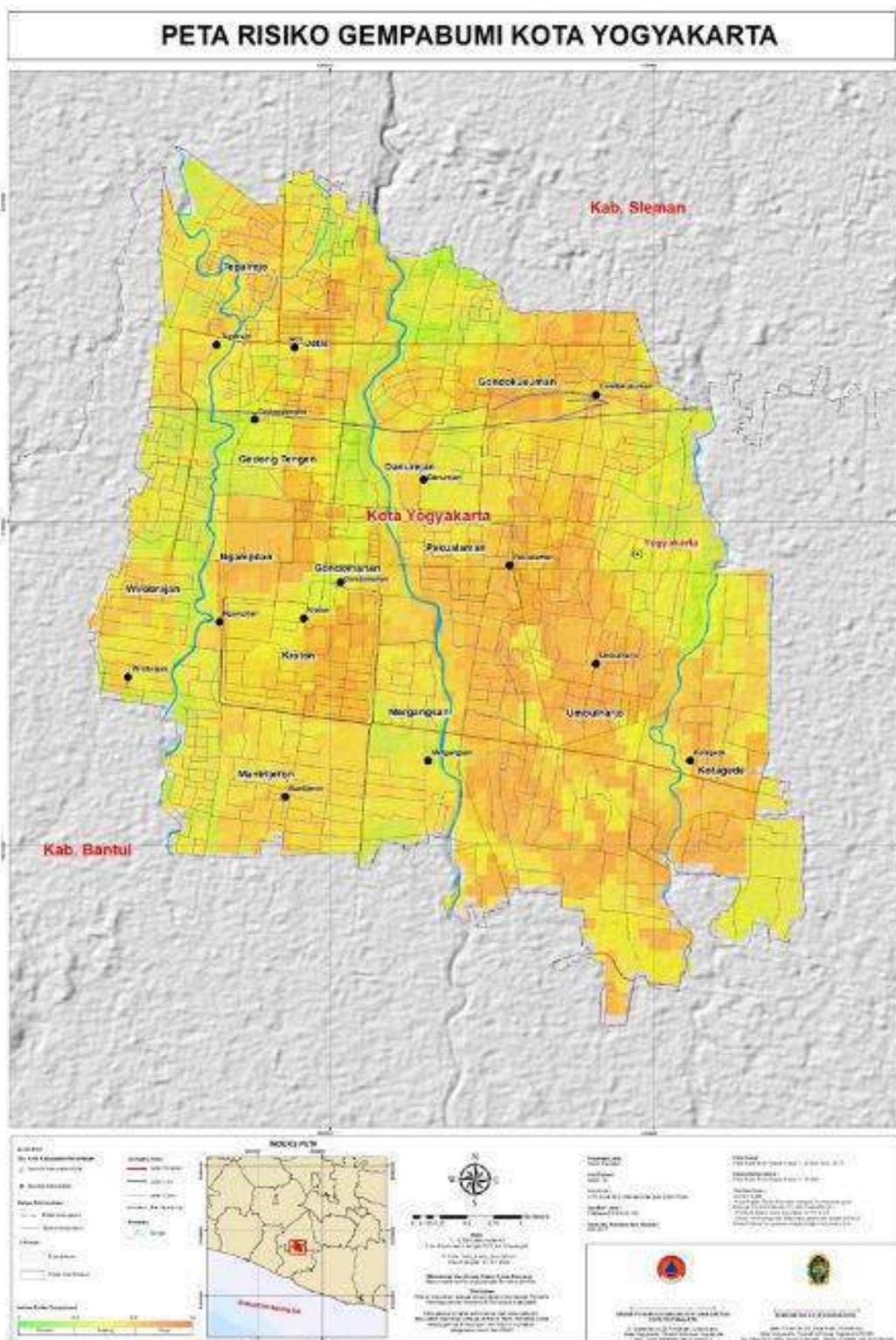
No	Jenis Logistik	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
24	Beras	1 ton	Layak	Kemantren Tegalrejo		Tersedia dan siap untuk didistribusikan
25	Air Mineral Galon	100 Buah	Layak	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi		Tersedia dan siap untuk didistribusikan
26	<i>Hygiene Kit</i> (Masker, hand sanitizier, sabun, Handuk)	100 Paket	Layak	Dinas Kesehatan		Tersedia dan siap untuk didistribusikan, logistic dapat ditambahkan sesuai dengan jumlah kebutuhan
27	Obat-obatan	100 Paket	Layak	Dinas Kesehatan		Tersedia dan siap untuk didistribusikan Tersedia dan siap untuk

No	Jenis Logistik	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
						didistribusikan, logistic dapat ditambahkan sesuai dengan jumlah kebutuhan
28	Beras	1 ton	Layak	Kemantren Jetis		Tersedia dan siap untuk didistribusikan
29	Air Mineral Galon	100 Buah	Layak	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi		Tersedia dan siap untuk didistribusikan
30	<i>Hygiene Kit</i> (Masker, hand sanitizier, sabun, Handuk)	100 Paket	Layak	Dinas Kesehatan		Tersedia dan siap untuk didistribusikan, logistic dapat ditambahkan sesuai dengan jumlah kebutuhan

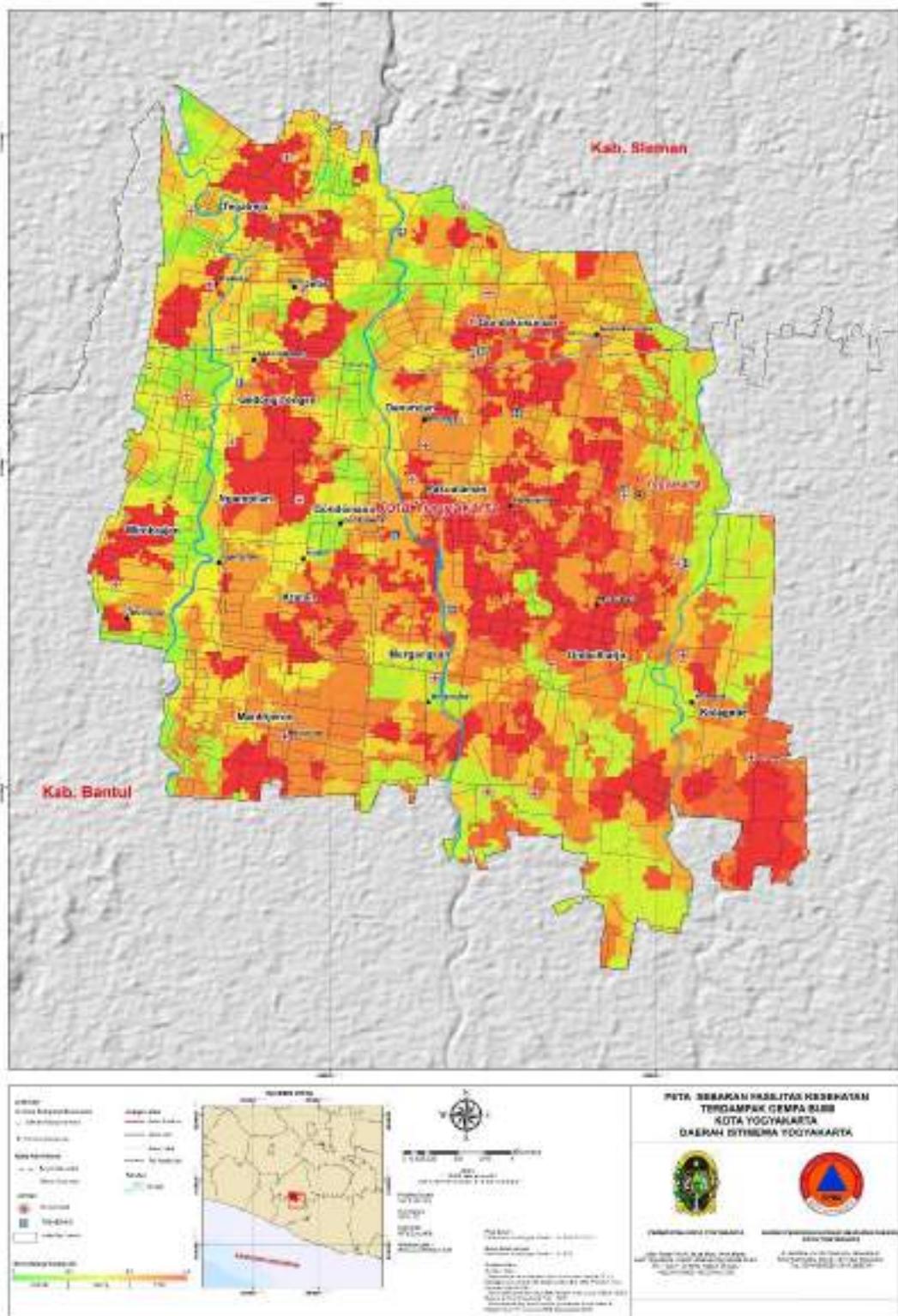
No	Jenis Logistik	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
31	Obat-obatan	100 Paket	Layak	Dinas Kesehatan		Tersedia dan siap untuk didistribusikan Tersedia dan siap untuk didistribusikan, logistic dapat ditambahkan sesuai dengan jumlah kebutuhan
32	Paket Logistik Makanan	12	Layak	BPBD Kota Yogyakarta		Tersedia dan siap untuk didistribusikan
33	Selimut (BNPB)	61	Layak	BPBD Kota Yogyakarta		Tersedia dan siap untuk didistribusikan

No	Jenis Logistik	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
34	Terpal 5x7 m	88	Layak	BPBD Kota Yogyakarta		Tersedia dan siap untuk didistribusikan
35	Terpal 6x8 m	33	Layak	BPBD Kota Yogyakarta		Tersedia dan siap untuk didistribusikan
36	Terpal 8x10 m	21	Layak	BPBD Kota Yogyakarta		Tersedia dan siap untuk didistribusikan
37	Tikar	47	Layak	BPBD Kota Yogyakarta		Tersedia dan siap untuk didistribusikan

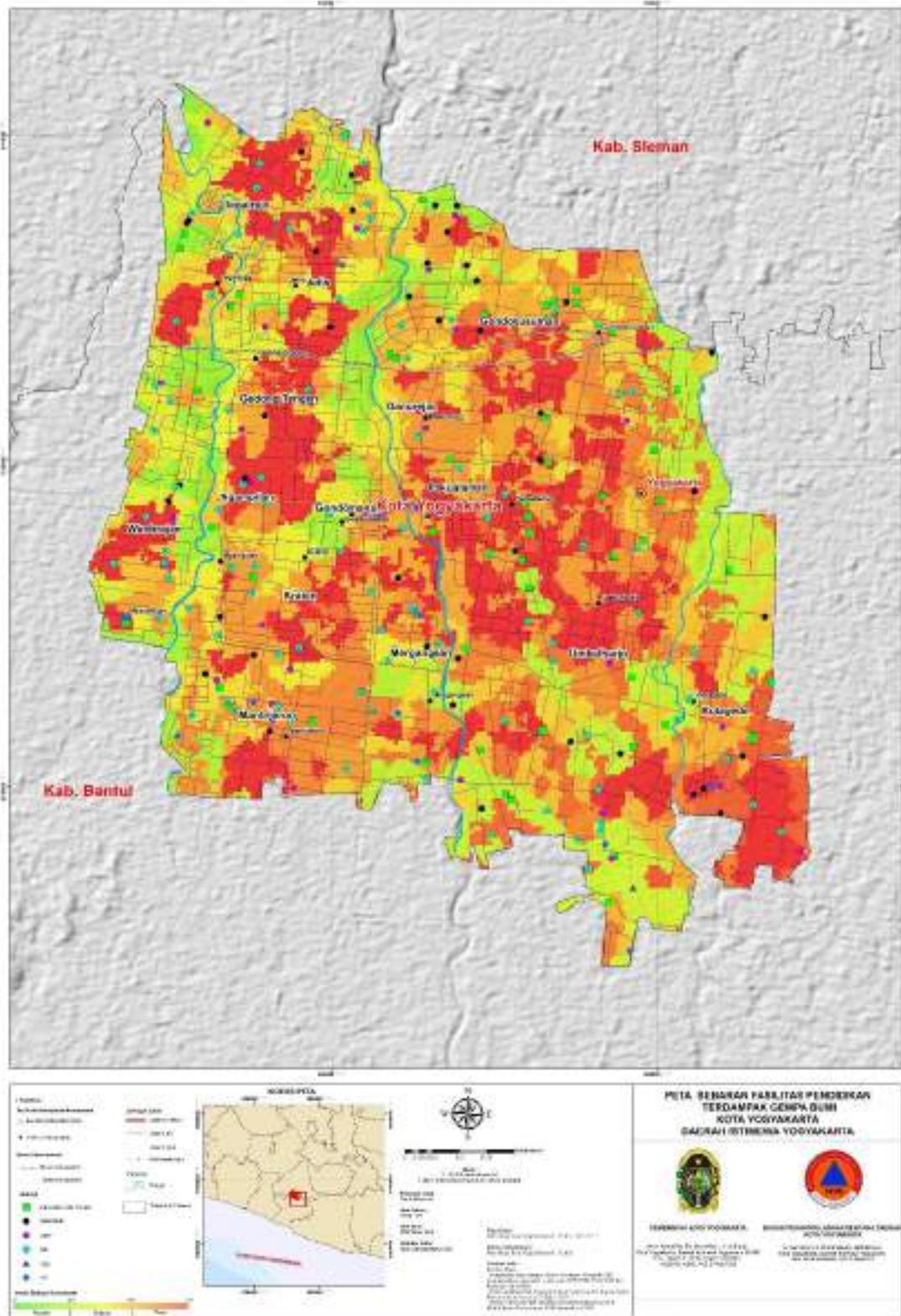
Peta 2. Peta Risiko Gempa Bumi



Peta 5. Fasilitas Kesehatan Terdampak



Peta 6. Fasilitas Pendidikan Terdampak



Lampiran 9 Standar Operasional Prosedur

No	Nama Klaster/Sub-Klaster	Tugas	Keanggotaan
1	Komandan Tanggap Darurat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memimpin dan bertanggungjawab terhadap keseluruhan operasi penanganan darurat bencana. 2) Membuat rancangan yang strategis, efektif, dan efisien dalam pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian operasi tanggap darurat bencana. 3) Mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando (Posko) Pendamping Penanganan Kedaruratan Bencana Kota Yogyakarta, sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkatan bencana. 4) Memastikan aktivasi Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dan Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana di Kota Yogyakarta. 5) Menyusun rencana operasi darurat termasuk rencana operasi harian yang terpadu berdasarkan tujuan dan prioritas yang telah ditentukan atau disepakati. 6) Melaksanakan kebijakan dan strategi penanggulangan kedaruratan bencana. 	Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta atau Sekda atau pejabat yang ditunjuk

No	Nama Klaster/Sub-Klaster	Tugas	Keanggotaan
		<p>7) Melaksanakan fungsi kendali koordinasi multi sektor yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana.</p> <p>8) Melaksanakan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistic.</p> <p>9) Melakukan evaluasi kegiatan PDB dan memastikan kegiatan operasi PDB berjalan sesuai dengan tujuan sasaran yang telah ditentukan atau disepakati.</p> <p>10) Komandan PDB bertanggung jawab langsung kepada Walikota Yogyakarta.</p> <p>11) Mengadakan rapat persiapan operasi/apel siaga di pagi</p> <p>12) Mengumpulkan data baru di siang hari berdasarkan hasil operasi di pagi hari</p> <p>13) Mengadakan rapat evaluasi operasi di petang-sore hari untuk dan menyusun rencana operasi darurat untuk keesokan harinya</p> <p>14) Bertanggung jawab atas prosedur administratif selaku Kuasa Pengguna Anggaran</p> <p>15) Mengeluarkan Surat Keputusan Komandan PDB meliputi susunan SKPDB yang mencantumkan nama personel.</p>	

No	Nama Klaster/Sub-Klaster	Tugas	Keanggotaan
2	Wakil Komandan	Tugas Wakil Komandan yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1) Membantu komandan tanggap darurat bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan menganalisis komando tanggap darurat. 2) Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, humas, keselamatan, media center dan keamanan serta perwakilan instansi/lembaga. 3) Menjadi perwakilan Komandan PDB dalam situasi dimana Komandan PDB berhalangan atau sedang dalam tugas lain. 4) Wakil komandan PDB bertanggung jawab kepada komandan PDB. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dandim 0734 2. Kapolresta Kota Yogyakarta
3	Bidang Sekretariat	Tugas Sekretariat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan administrasi umum pos komando sampai dengan pelaporan. 2) Menyediakan dan melaksanakan pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personel Satuan Komando Kota Yogyakarta. 3) Sekretariat bertanggung jawab penuh kepada komandan 	Pemimpin: BPBD Kota Yogyakarta Pendukung: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Daerah 2. Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian
4	Bidang Perencanaan	Tugas Perencanaan :	Pemimpin: BPBD Kota Yogyakarta

No	Nama Klaster/Sub-Klaster	Tugas	Keanggotaan
		<ol style="list-style-type: none"> 1) Memastikan adanya proses pelaksanaan operasi yang terukur, terpadu dan terarah, berdasarkan ruang lingkup prioritas dan tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebagai dasar pertimbangan komandan darurat dalam menyusun rencana operasi dan perintah operasi harian. 2) Mengumpulkan, mengevaluasi, menganalisis data dan informasi terkait manajemen kedaruratan, dan menyiapkan dokumen rencana (tindakan) operasional penanganan darurat bencana. 	Pendukung <ol style="list-style-type: none"> 1) BAPPEDA Kota Yogyakarta 2) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 3) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian 4) Dinas Kesehatan
5	Bidang Data, Informasi dan Humas	Tugas Data, Informasi dan Humas: <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengelola data dan informasi operasi PDB yang masuk serta memastikan akurasi data, evaluasi data (filter & konfirmasi data) dan informasi bencana sebelum dibagikan ke masyarakat. 2) Membentuk jaringan informasi dan komunikasi, serta melaksanakan penyebaran informasi bencana pada media massa dan masyarakat yang lebih luas (publik). 3) Mengelola media center sebagai pusat informasi utama operasi PDB 	Pemimpin: BPBD Kota Yogyakarta Pendukung: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian 2. Humas Protokoler 3. RRI 4. TVRI

No	Nama Klaster/Sub-Klaster	Tugas	Keanggotaan
		<p>4) Mengelola pendaftaran relawan dan wartawan/jurnalis, agar mendapatkan tanda pengenal (name tag/sticker) untuk proses identifikasi akses menuju wilayah terdampak bencana.</p> <p>Hubungan masyarakat bertanggung jawab kepada komandan PDB.</p>	
6	Bidang Perwakilan Lembaga	<p>1) Membantu koordinasi bersama Komandan PDB untuk keperluan pengerahan sumber daya yang berasal dari Instansi/Lembaga.</p> <p>Bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan instansi/lembaga terkait.</p>	<p>Perguruan Tinggi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UAD 2. UST 3. UTY MDMC
7	<p>Bidang Pengungsian dan Perlindungan</p> <p>Klaster Air Minum dan Penyehatan Lingkungan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun rencana operasi unit air, sanitasi, dan kebersihan 2) Menyediakan kebutuhan air bersih dan memastikan kualitas air bersih sesuai standar kesehatan masyarakat. 3) Menyediakan sarana sanitasi dasar dan memastikan standar kebersihan lingkungan dan kesehatan terpenuhi. 	<p>Pemimpin:</p> <p>Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta</p> <p>Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Kesehatan 3. PDAM Kota Yogyakarta 4. PMI Kota Yogyakarta 5. Private sector lain

No	Nama Klaster/Sub-Klaster	Tugas	Keanggotaan
		<p>4) Mengelola dan mendistribusikan bantuan dalam bentuk sumber air beserta peralatannya.</p> <p>5) Memastikan bantuan air minum yang dapat diminum langsung sesuai dengan standar kesehatan dan standar minimal bantuan.</p> <p>1) Memastikan dan melaksanakan pelayanan kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan saluran air (drainase), pengelolaan limbah cair dan limbah padat, pengendalian vektor serta pembuangan tinja.</p>	
	Klaster Dapur Umum	<p>1) Menyusun rencana operasi unit dapur umum</p> <p>2) Menyiapkan tim dapur umum yang terlatih</p> <p>3) Mendata kebutuhan pangan dan memastikan kebutuhan logistik dapur umum terpenuhi.</p> <p>4) Menyiapkan bahan dan lokasi dapur umum.</p> <p>5) Menyiapkan sumber daya atau relawan untuk dapur umum.</p> <p>6) Melakukan proses penyiapan kebutuhan pangan di dapur umum.</p> <p>7) Menyediakan kebutuhan pangan bagi petugas PDB dan pengungsi.</p>	<p>Koordinator: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</p> <p>Anggota: 1. MDMC 2. BAZNAS 3. Relawan Kelurahan/Kemantren PMI Kota Yogyakarta</p>

No	Nama Klaster/Sub-Klaster	Tugas	Keanggotaan
		<p>8) Melakukan distribusi hasil dapur umum sesuai dengan hasil kebutuhan pangan petugas PDB dan pengungsi.</p> <p>9) Memastikan kualitas pangan khususnya bagi kelompok rentan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan.</p> <p>1) Memastikan penggunaan bahan-bahan pangan sesuai standar kesehatan dan kontrol terhadap massa pakai bahan-bahan makanan kemasan.</p>	
	Klaster Penanganan Warga Asing	<p>1) Mengidentifikasi warga asing terdampak bencana gempa bumi, termasuk status mereka (wisatawan, pelajar, pekerja, atau pengungsi), untuk memprioritaskan kebutuhan bantuan.</p> <p>2) Menjamin keselamatan, akses bantuan, dan perlindungan bagi warga asing selama dan setelah bencana gempa bumi.</p> <p>3) Berkoordinasi dengan kedutaan besar, konsulat, atau organisasi internasional untuk mengelola kebutuhan dan informasi terkait warga asing.</p> <p>4) Memberikan informasi yang akurat kepada warga asing tentang situasi bencana gempa bumi, lokasi aman, dan prosedur evakuasi.</p>	<p>Koordinator: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta</p> <p>Pendukung: Dinas Pariwisata Satpol PP Badang Kesatuan Bangsa dan Politik</p>

No	Nama Klaster/Sub-Klaster	Tugas	Keanggotaan
		5) Membantu proses pemulangan warga asing yang terdampak bencana gempa bumi ke negara asal mereka jika diperlukan. 6) Memastikan bahwa respons terhadap bencana di Kota Yogyakarta melibatkan semua pihak tanpa terkecuali, selaras dengan standar kemanusiaan global.	
	Klaster Keamanan dan Ketertiban	1) Menyusun rencana operasi keamanan dan ketertiban 2) Memastikan keselamatan dan keamanan seluruh personel SKPDB dalam melaksanakan tugas penanganan darurat bencana. 3) Melaksanakan penjagaan keamanan penanganan kedaruratan bencana. 4) Melakukan penegakan hukum terhadap segala tindak kejahatan dalam situasi darurat bencana. 5) Melaksanakan pemantauan keberadaan petugas/militer/relawan asing.	Pemimpin: Polresta Kota Yogyakarta Pendukung: 1. KODIM 0734 2. Satpol PP 3. LinMas 4. Kelurahan/Kemantren
	Klaster Penanganan Cagar Budaya	1) Menyusun rencana operasi penanganan cagar budaya 2) Mendata/menginventarisir benda cagar budaya yang ada di lokasi terdampak bencana.	Pemimpin: Dinas Kebudayaan Pendukung: 1. Dinas Pariwisata 2. Badan Arkeologi dan Purbakala 3. NGO

No	Nama Klaster/Sub-Klaster	Tugas	Keanggotaan
		3) Menyiapkan tenaga ahli dan tim perbaikan dan perawatan benda cagar budaya sesuai bidang keahliannya. 4) Meneliti dan Mengevaluasi kondisi benda cagar budaya yang terdampak bencana 5) Menyiapkan lokasi evakuasi atau penyelamatan benda cagar budaya yang terdampak bekerjasama dengan pihak terkait. 6) Memastikan benda cagar budaya aman dari pencurian dan potensi kerusakan lainnya.	
	Klaster Penanganan Arsip Daerah	1) Menyusun rencana operasi penanganan arsip daerah. 2) Mendata/menginventarisir arsip daerah yang ada di lokasi terdampak bencana. 3) Menyiapkan tenaga ahli dan tim perbaikan dan perawatan arsip daerah sesuai bidang keahliannya. 4) Meneliti dan Mengevaluasi kondisi arsip daerah yang terdampak bencana. 5) Menyiapkan lokasi evakuasi atau penyelamatan arsip daerah yang terdampak bekerjasama dengan pihak terkait.	Pemimpin: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta Pendukung: 1. BPBD Kota Yogyakarta 2. Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Yogyakarta 3. TNI/POLRI 4. Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang Kota Yogyakarta 5. Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta

No	Nama Klaster/Sub-Klaster	Tugas	Keanggotaan
		6) Memastikan arsip daerah aman dari pencurian dan potensi kerusakan lainnya	
8	Bidang Logistik		Koordinator: BPBD Kota Yogyakarta
	Unit Transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan transportasi dalam penanganan darurat bencana. 2) Mengatur penggunaan alat transportasi bersama dengan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikannya. 3) Menyediakan dan mendistribusikan sarana transportasi untuk keperluan operasi PDB sesuai kebutuhan. 4) Mendukung kegiatan operasional PDB seperti pendistribusian logistik, distribusi sarana prasarana dan mobilisasi petugas serta korban bencana. 5) Memastikan bahan bakar kendaraan terisi dan siap digunakan saat darurat. 6) Memastikan rute, jalur aman dan lancar untuk kendaraan evakuasi. 7) Melakukan dokumentasi dalam setiap kegiatan transportasi selama proses penanganan darurat bencana. 	Pemimpin: Dinas Perhubungan Pendukung: <ol style="list-style-type: none"> 1. TNI-POLRI 2. Satpol PP Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Nama Klaster/Sub-Klaster	Tugas	Keanggotaan
	Unit Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan peralatan komunikasi (telepon, satelit, radio HT dll). 2) Memastikan keberfungsian sistem dan peralatan komunikasi. 3) Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan penyediaan dan pengaturan mekanisme komunikasi selama operasi penanganan darurat bencana. 4) Mendistribusikan peralatan komunikasi ke setiap bidang atau unit dan mendokumentasikannya. 5) Menyediakan pemenuhan peralatan komunikasi yang digunakan personel selama masa tanggap darurat. 6) Mengelola dan menerapkan jenis alat komunikasi yang digunakan saat operasi tanggap darurat. 7) Memastikan alur komunikasi antar bidang agar dapat dilaksanakan dengan baik. 	<p>Pemimpin: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian</p> <p>Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RAPI 2. ORARI 3. PMI Kota Yogyakarta
	Unit Bantuan Non Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan inventarisasi bantuan non pangan. 2) Memastikan kelayakan bantuan non pangan yang diterima sesuai standar bantuan kemanusiaan dan nilai-budaya lokal. 3) Mengumpulkan/menghimpun bantuan non pangan dan melakukan pencatatan bantuan yang diterima. 	<p>Pemimpin: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi</p> <p>Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PMI Kota Yogyakarta 2. Sektor Swasta 3. NGO

No	Nama Klaster/Sub-Klaster	Tugas	Keanggotaan
		<p>4) Memeriksa kondisi kelayakan bantuan non pangan di yang diterima dan memastikan kualitas pangan sesuai dengan standar kesehatan.</p> <p>5) Melakukan dokumentasi setiap pendistribusian bantuan non pangan.</p> <p>6) Menyediakan dan kebutuhan non pangan untuk pengungsi dan personel PDB sesuai dengan data kebutuhan dan data pilah.</p> <p>7) Memastikan kecukupan kebutuhan non pangan bagi pengungsi dan personel PDB.</p> <p>8) Melakukan distribusi bantuan non pangan pada setiap bidang/unit.</p>	
	Unit Shelter	<p>1) Menyelenggarakan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi pengungsi.</p> <p>2) Melaksanakan penyelenggaraan manajemen shelter.</p> <p>3) Memperlancar bantuan pangan, tempat hunian sementara, sandang, sanitasi, dan psikososial.</p>	<p>Pemimpin: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi</p> <p>Pendukung: 1. BPBD Kota Yogyakarta 2. PMI Kota Yogyakarta 3. Dinas Kesehatan 4. TNI 5. POLRI</p>
	Unit Peralatan dan Perlengkapan	1) Menyediakan peralatan dan perlengkapan untuk keperluan PDB sesuai kebutuhan.	Pemimpin: BPBD Kota Yogyakarta

No	Nama Klaster/Sub-Klaster	Tugas	Keanggotaan
		<p>2) Inventarisasi Peralatan dan Perlengkapan yang digunakan dan bertanggungjawab untuk mengembalikan sarana dan prasarana yang dipinjamkan untuk keperluan operasi PDB.</p> <p>3) Mendistribusikan Peralatan dan Perlengkapan keperluan PDB pada setiap bidang/unit dan mendokumentasikannya.</p>	<p>Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BASARNAS 2. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. TNI 5. Polri 6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7. Satpol PP 8. Dinas Kesehatan 9. PMI Kota Yogyakarta
9	Bidang Kesehatan		<p>Koordinator: Dinas Kesehatan</p>
	Klaster Pelayanan Kesehatan	<p>Klaster pelayanan kesehatan dalam penanggulangan bencana di Kota Yogyakarta bertanggung jawab untuk memastikan tersedianya layanan kesehatan yang memadai bagi korban bencana, baik di lokasi terdampak maupun di tempat pengungsian. Klaster ini bertugas menyelenggarakan pelayanan Kesehatan perorangan terutama pelayanan pertolongan darurat pra fasilitas pelayanan kesehatan dan rujukan.</p>	<p>Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Palang Merah Indonesia 2) RSUD 3) BPBD Kota Yogyakarta 4) Dinas Sosial 5) TNI/POLRI 6) NGO
	Klaster Pengendalian Penyakit, Penyehatan Lingkungan dan Penyiapan Air Bersih	<p>Klaster Pengendalian Penyakit, Penyehatan Lingkungan, dan Penyiapan Air Bersih memiliki peran krusial dalam</p>	<p>Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Nama Klaster/Sub-Klaster	Tugas	Keanggotaan
		<p>memastikan kesehatan masyarakat terjaga selama penanggulangan bencana di Kota Yogyakarta, khususnya dalam mencegah penyebaran penyakit menular dan memastikan ketersediaan fasilitas sanitasi serta air bersih. Klaster ini bertugas melakukan pengendalian penyakit dan upaya kesehatan lingkungan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2) Dinas Lingkungan Hidup 3) Palang Merah Indonesia 4) NGO 5) TNI/POLRI 6) Kelurahan/Kemantren
	Klaster Kesehatan Reproduksi	<p>Klaster Kesehatan Reproduksi dalam penanggulangan bencana di Kota Yogyakarta bertugas untuk memastikan layanan kesehatan reproduksi tetap tersedia bagi kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, bayi baru lahir, remaja, dan perempuan, serta untuk mencegah komplikasi reproduksi yang dapat timbul selama bencana. Klaster ini bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan reproduksi.</p>	<p>Pendukung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Palang Merah Indonesia 2) RSUD 3) BKKBN Kota Yogyakarta 4) NGO
	Klaster Kesehatan Jiwa	<p>Klaster Kesehatan Jiwa dalam penanggulangan bencana di Kota Yogyakarta berperan penting dalam memberikan dukungan psikososial dan layanan kesehatan jiwa kepada korban terdampak bencana. Tujuan utamanya adalah mencegah dan menangani gangguan kesehatan jiwa akibat trauma, stres, dan tekanan psikologis yang sering terjadi dalam situasi darurat.</p>	<p>Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Palang Merah Indonesia 2) NGO 3) RSJ/Puskesmas 4) TNI/POLRI 5) Lembaga Pendidikan/Akademisi

No	Nama Klaster/Sub-Klaster	Tugas	Keanggotaan
	Klaster DVI	Klaster <i>Disaster Victim Identification</i> (DVI) dalam penanggulangan bencana di Kota Yogyakarta bertugas untuk mengidentifikasi korban bencana, baik yang terluka parah maupun meninggal dunia, agar dapat diketahui identitasnya dan diteruskan kepada keluarga korban. DVI berperan penting dalam memastikan proses identifikasi dilakukan dengan cepat, akurat, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.	Pendukung: 1) POLRI 2) BPBD Kota Yogyakarta 3) RSUD 4) TNI 5) Palang Merah Indonesia 6) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tenaga kerja dan Transmigrasi
	Klaster Gizi	Klaster Gizi dalam penanggulangan bencana di Kota Yogyakarta bertugas memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat terdampak bencana, khususnya kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, lansia, dan penyandang disabilitas. Tujuannya adalah mencegah malnutrisi, memperbaiki status gizi, dan mendukung pemulihan kesehatan melalui intervensi gizi yang tepat.	Pendukung: 1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tenaga kerja dan Transmigrasi 2. Dinas Ketahanan Pangan 3. Palang Merah Indonesia 4. NGO
10	Bidang Pendidikan		Koordinator: Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
	Unit Pendidikan Dasar	1) Menyusun rencana operasi unit Pendidikan dasar. 2) Mengeluarkan kebijakan bidang Pendidikan dasar. 3) Menyiapkan pendidik dan tenaga kependidikan.	Pendukung: 1. Kementerian Agama Kantor Wilayah Kota Yogyakarta 2. Pramuka KwarCab Kota Yogyakarta 3. PGRI Kota Yogyakarta

No	Nama Klaster/Sub-Klaster	Tugas	Keanggotaan
		4) Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung Pendidikan dasar situasi darurat. 5) Melaksanakan layanan dukungan psikososial dan pendidikan dasar situasi darurat. 6) Menyiapkan peta persebaran dan lokasi pelaksanaan pendidikan dasar situasi darurat.	4. NGO 5. Akademisi
11	Bidang Pemulihan		Koordinator: BPBD Kota Yogyakarta
	Klaster Pemulihan Saranan dan Prasaranan Vital	1) Menyusun rencana operasi pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital. 2) Melaksanakan perbaikan dengan segera sarana dan prasarana vital yang meliputi listrik/penerangan, transportasi, energi BBM, telekomunikasi, air bersih dan fasilitas umum. 3) Memastikan kembalinya fungsi infrastruktur dan akses transportasi seperti membuka akses transportasi yang tertutup, pembersihan jalan, pemberian arah jalan alternatif, jalan sementara, dan jembatan sementara.	Pemimpin: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Permukiman Kota Yogyakarta Pendukung: 1. PDAM 2. PLN 3. Telkom 4. Pertamina
	Klaster Pemulihan Dini	1) Melakukan asesmen kerusakan, kerugian, dan kebutuhan masyarakat serta lingkungan. 2) Menyusun laporan situasi untuk mendukung perencanaan program pemulihan.	Pemimpin: BPBD Kota Yogyakarta Pendukung:

No	Nama Klaster/Sub-Klaster	Tugas	Keanggotaan
		<p>3) Merancang strategi dan rencana aksi pemulihan berdasarkan hasil asesmen.</p> <p>4) Mengutamakan aspek inklusi sosial, keberlanjutan, dan pengurangan risiko bencana.</p> <p>5) Mengkoordinasikan upaya pemulihan dengan pemerintah daerah, lembaga internasional, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah.</p> <p>6) Memastikan sinergi antara berbagai program bantuan dan pemulihan.</p> <p>7) Memberikan bantuan langsung kepada masyarakat untuk kebutuhan dasar seperti tempat tinggal sementara, kesehatan, dan pendidikan.</p> <p>8) Membantu memulihkan mata pencaharian, seperti menyediakan alat dan modal usaha kecil.</p> <p>9) Memperbaiki fasilitas umum yang rusak, seperti jalan, jembatan, sistem air bersih, dan fasilitas kesehatan.</p> <p>10) Menjamin aksesibilitas dan keselamatan dari fasilitas yang dipulihkan.</p>	<p>1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Yogyakarta</p> <p>2) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta</p> <p>3) Dinas Pertanian Kota Yogyakarta</p> <p>4) Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>5) NGO</p> <p>6) TNI/POLRI</p> <p>7) Kelurahan/Kemantren</p>

No	Nama Klaster/Sub-Klaster	Tugas	Keanggotaan
		<p>11) Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat tentang mitigasi risiko bencana dan cara memulihkan diri.</p> <p>12) Membangun kesadaran tentang pentingnya keberlanjutan dan pengurangan risiko di masa depan.</p> <p>13) Memberikan layanan dukungan psikososial kepada korban bencana.</p> <p>14) Membangun kembali komunitas melalui pendekatan partisipatif.</p> <p>15) Memantau pelaksanaan program pemulihan untuk memastikan keberhasilan.</p> <p>16) Melakukan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas di masa depan.</p> <p>17) Memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan normal dengan memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan fisik secara holistik dan berkelanjutan.</p>	
12	Bidang Pencarian dan Pertolongan		Koordinator: BASARNAS
	Klaster Rekayasa Lalu Lintas	1) Menyusun rencana operasi rekayasa lalu lintas pada saat terjadi bencana.	Pendukung: 1. POLRI 2. TNI 3. SATPOL PP

No	Nama Klaster/Sub-Klaster	Tugas	Keanggotaan
		2) Mendata lalu lintas pada lokasi-lokasi yang terdampak bencana. 3) Menyiapkan rekayasa lalu lintas pada lokasi terdampak bencana. 4) Memastikan lalu lintas dapat berjalan dengan baik pada saat terjadi bencana.	4. Kelurahan/Kemantren

Lampiran 10 Lembar Komitmen



LEMBAR PERNYATAAN KOMITMEN BERSAMA INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI DALAM PENANGANAN KEDARURATAN BENCANA GEMPABUMI DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA

Kami yang bertandatangan di bawah ini bertindak atas nama instansi/lembaga/organisasi menyatakan komitmen instansi/lembaga/organisasi kami dalam penanganan keadaan darurat akibat gempabumi wilayah Kota Yogyakarta, sebagaimana tertuang dalam Rencana Kontingensi Menghadapi Bencana Gempabumi Kota Yogyakarta. Butir-butir pernyataan komitmen tersebut adalah:

1. Peran instansi/lembaga/organisasi kami sebagaimana tertuang dalam Organisasi Penanganan Darurat Bencana Kota Yogyakarta
2. Tugas dan fungsi penanganan darurat bencana sebagaimana diberikan kepada instansi/lembaga/organisasi kami dalam penanganan kedaruratan bencana gempabumi di wilayah Kota Yogyakarta.
3. Penyediaan sumber daya instansi/lembaga/organisasi kami untuk dikerahkan dan dikelola sebagai bagian sumber daya untuk penanganan kedaruratan bencana gempabumi oleh Organisasi Penanganan Darurat Bencana Kota Yogyakarta.

Demikian lembar komitmen bersama ini kami buat dan tandatangani.

Dinyatakan di Kota Yogyakarta

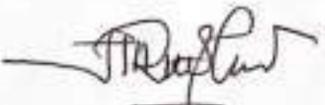
Pada Tanggal September 2024

Mengetahui,

Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta

Ir. Ajrian Yuriadijaya, M.M

**Lembar Penandatanganan Pernyataan Komitmen Penanganan Kedaruratan Bencana
Gempabumi Kota Yogyakarta**

 Ketua Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta	 Ketua MDMC Kota Yogyakarta	Direktur PLN Rayon Kota Yogyakarta
 Direktur PERUMDA PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta	 Ketua Baznas Kota Yogyakarta	Rektor Universitas Ahmad Dahlan Kota Yogyakarta
Rektor Universitas Teknologi Yogyakarta Kota Yogyakarta	Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Kota Yogyakarta	 Ketua Organisasi Amatir Radio Republik Indonesia (ORARI) Lokal Kota Yogyakarta
 Ketua Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Kota Yogyakarta	Ketua Forum Kampung Tangguh Bencana Kota Yogyakarta	Koordinator Kelurahan Tangguh Bencana Kota Yogyakarta



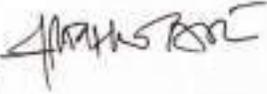
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

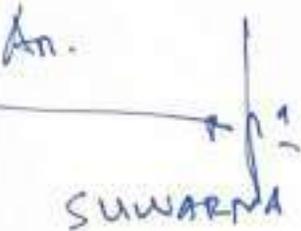
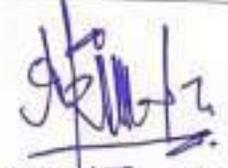
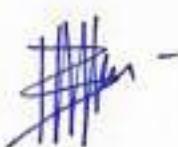
เทศบาลเมือง Yogyakarta

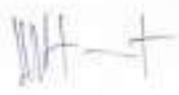
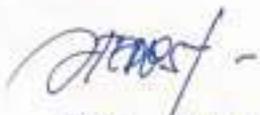
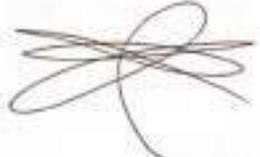
Jl. Gambiran No. 26 Yogyakarta Kode Pos: 55161 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL: bpbd@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upk@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

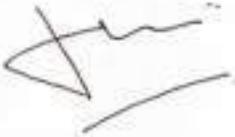
**BERITA ACARA KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI
BENCANA GEMPA BUMI
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024**

Telah dilaksanakan lokakarya Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana Gempa Bumi Kota Yogyakarta Tahun 2024 pada tanggal 15 Agustus 2024, 05 September 2024, dan 25 September 2024. Lokakarya telah dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan perwakilan dari Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil, Perguruan Tinggi/Akademisi, dan Media. Proses penyusunan dokumen rencana kontingensi bencana gempa bumi Kota Yogyakarta telah menggunakan Data dan Informasi dari Lembaga yang berpartisipasi.

 Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta	Komandan Komando Distrik Militer 0734/ Kota Yogyakarta	AN. KAPOLRESTN  Kepala Polisi Resor Kota Yogyakarta
 Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta	 Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta	 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta

<p>An.</p>  <p>SUWARNA</p> <p>Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta</p>	<p>Sekretaris BPBD Kota Yogyakarta</p>	 <p>Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta</p>
<p>An.</p>  <p>ARIF RIANTO BN Perwakilan dari Palang Merah Indonesia Kota Yogyakarta lewat Ketua PMI Kota Yogyakarta</p>	<p>"Matunoko"</p> <p>Perwakilan dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta lewat Ketua Baznas Kota Yogyakarta</p>	 <p>GALUH SATRIO B Perwakilan dari PERUMDA PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta</p>
<p>Perwakilan dari PLN Rayon Kota Yogyakarta</p>	<p>an</p>  <p>Bachor Herulaksana Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Kota Yogyakarta</p>	<p>Rektor Universitas Ahmad Dahlan Kota Yogyakarta</p>
 <p>Rektor Universitas Teknologi Yogyakarta Kota Yogyakarta</p>	<p>an.</p>  <p>WIDARTO SUTRISNO</p> <p>Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Kota Yogyakarta</p>	<p>R/N</p>  <p>AGUNG RUMOND Ketua Organisasi Amatir Radio Republik Indonesia (ORARI) Lokal Kota Yogyakarta</p>

<p>Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta</p>	<p>an  Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta</p>	<p>an.  Bagus S. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta</p>
<p>an.  Ketut Hariyanto Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta</p>	<p>Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta</p>	<p>An.  Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta</p>
<p>Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta</p>	<p>Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta</p>	<p>Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta</p>
<p>Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta</p>	<p>An  TEDI SAPARIAN Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta</p>	<p>An.  FAJAR APRIAN Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta</p>

<p>Ketua Radio Antara Penduduk Indonesia (RAPI) Kota Yogyakarta</p>	<p>Ketua Dorum Kampung Tanggub Bencana Kota Yogyakarta</p>	<p>Koordinator Kelurahan Tanggub Bencana Kota Yogyakarta</p>
 <p>Mantri Pamong Praja Kemantren Tegalrejo</p>	<p>Mantri Pamong Praja Kemantren Gondokusuman</p>	 <p>Mantri Pamong Praja Kemantren Jetis</p>
 <p>Mantri Pamong Praja Kemantren Danureja</p>	 <p>Mantri Pamong Praja Kemantren Gedongtengen</p>	 <p>Mantri Pamong Praja Kemantren Ngampilan</p>
 <p>Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan</p>	 <p>An. Mantri Pamong Praja Kemantren Mantrijeron</p>	 <p>Mantri Pamong Praja Kemantren Kraton</p>



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan Gambiran No.26, Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta

Telp. (0274) 4298225/0811 2828 911

E-mail : bpbd@jogjakota.go.id